



PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR **26** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
10. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 34 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 menjadi :
 - a. Landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun RAPBD Perubahan Tahun 2025; dan
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (3) Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan
 - Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI Penutup

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 21 SERI E



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1 - 1
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Dasar Penyusunan	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	1 - 6
1.4. Sistematika Penyusunan	1 - 6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	2 - 1
2.1. Hasil Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Tahun 2024	2 - 1
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	2 - 7
2.3. Permasalahan	2 - 14
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	3 - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3 - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah	3 - 2
3.1.2. Kebijakan Ekonomi Nasional	3 - 10
3.1.3. Tantangan dan Prospek Prekonomian Provinsi	3 - 11
3.1.4. Tantangan dan Prospek Prekonomian Kabupaten Tahun 2025	3 - 12
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3 - 14
3.2.1. Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah	3 - 15
3.2.2. Perubahan Kerangka Belanja Daerah	3 - 17
3.2.3. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah	3 - 19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4 - 1
4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.....	4 - 1
4.2. Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 - 7
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 - 8



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	5 - 1
5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan	5 - 1
5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 - 1
5.1.2. Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	5 - 2
5.1.3. Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	5 - 4
5.1.4. Program Urusan Pilihan	5 - 8
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	5 - 9
5.1.6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	5 - 10
5.1.7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	5 - 11
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum.....	5 - 11
5.1.9. Unsur Kewilayahan	5 - 11
5.2. Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan	5 - 13
 BAB VI PENUTUP	 6 – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	2 - 2
Tabel 2.2	Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	2 - 3
Tabel 2.3	Rata-rata Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	2 - 6
Tabel 2.4	Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan APBD Tahun 2025	2 - 8
Tabel 2.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	2 - 10
Tabel 3.1	Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	3 - 13
Tabel 3.2	Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	3 - 15
Tabel 3.3	Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025.....	3 - 18
Tabel 3.4	Rincian Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025.....	3 - 19
Tabel 3.5	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	3 - 20
Tabel 4.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	4 - 2
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 - 3
Tabel 4.3	Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 4
Tabel 4.4	Penyandingan Target Indikator Pembangunan Makro Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 5
Tabel 4.5	Target Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2025	4 - 5
Tabel 4.6	Keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025	4 - 7
Tabel 4.7	Target Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 8
Tabel 4.8	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 20
Tabel 4.9	Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 21



Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 24
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 37
Tabel 4.12	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	4 - 49
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Urusan Tahun 2025	5 - 13
Tabel 5.2	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025	5 - 16
Tabel 5.3	Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Bangka Barat	5 - 79
Tabel 5.4	Keterkaitan Program Daerah dan Dukungan Penganggaran Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025	5 - 19
Tabel 5.5	Keterkaitan Program Daerah dan Dukungan Penganggaran Terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.....	5 - 40
Tabel 5.6	Keterkaitan Program Daerah dan Dukungan Penganggaran Terhadap Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.....	5 - 59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Tahun 2025 s.d. Triwulan I	2 - 9
Gambar 3.1	Capaian Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024	3 - 10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan berorientasi pada hasil serta pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Bangka Barat disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai pada penyusunan anggaran.

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024. Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, sesuai dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;



3. Pergeseran pagu kegiatan dan sub kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan dan sub kegiatan, penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan sub kegiatan;
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga menindaklanjuti beberapa kebijakan pemerintah pusat antara lain :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan langkah-langkah percepatan dalam Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2025.

Beberapa kondisi yang memerlukan tindak lanjut dan penanganan segera sehingga diperlukan percepatan pada perubahan perencanaan pembangunan Tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya perubahan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025;
2. Perubahan target indikator sasaran pembangunan daerah Tahun 2025;
3. Perubahan target Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025;
4. Penetapan target Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025; dan
5. Mengakomodir kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengakomodir perubahan kondisi pembangunan daerah Tahun 2025, maka disusun Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam rangka menjaga konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Barat serta mendukung prioritas nasional.

1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bangka Barat dilakukan berdasarkan beberapa regulasi sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tata Pembantuan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
14. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
29. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 34 Seri E);
30. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 9 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 5 Seri A).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas kondisi strategis daerah. Perubahan RKPD Tahun 2025 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas dokumen Perubahan RKPD dan proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD.



BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Menjelaskan tentang evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan evaluasi terhadap hasil RPJMD untuk Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang meliputi kondisi ekonomi Tahun 2025, indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, kerangka belanja dan pembiayaan daerah, serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara singkat perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dan capaian kinerja, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan dan operasionalisasi dari Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Dalam rangka menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD maupun evaluasi terhadap hasil RKPD. Sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD serta evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I guna menilai capaian kinerja sesuai jenjang pembangunan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025.

2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2024, dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja pembangunan daerah mulai dari indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan di Tahun 2024 untuk melihat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi terhadap indikator tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah adalah dengan membandingkan capaian/realisasi dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yaitu melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang merupakan dokumen pelaksanaan tahunan pembangunan daerah.

a. Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun perencanaan pembangunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pembangunan daerah. Di dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, dari 3 (tiga) misi pembangunan daerah terdapat 5 (lima) tujuan pembangunan daerah yang diukur melalui indikator yang terdiri dari 1 (satu) indikator pada masing-masing tujuan.



Tabel 2.1 Capaian Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2024
RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target		Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	
				Tahun 2024	Tahun 2026		Tahun 2024	s.d. Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,47	4,1	5,47	122,37	133,41
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	13.427	13.349	13.199	98,30	98,88
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	71,31	70,60	71,36	100,07	101,08
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	150	150,00
5.	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Nilai Indeks	1,80	0,26	1,46	80,94	560,38

b. Evaluasi Capaian Sasaran Pembangunan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, telah ditetapkan 13 sasaran pembangunan dengan 27 indikator yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 2021-2026. Dalam pelaksanaan tahunan, dilakukan perubahan target indikator kinerja sasaran RPJMD melalui RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya serta kemampuan sumber daya yang dimiliki dengan tidak merubah target akhir RPJMD. Jika dilihat secara umum untuk ketercapaian dari masing-masing indikator, pada Tahun 2024, sebanyak 19 indikator dapat dicapai sesuai target bahkan melebihi dan 8 (delapan) indikator belum dapat mencapai target yang ditetapkan.



Tabel 2.2 Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	INDIKATOR	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024	Kriteria Capaian	Persentase Capaian dibanding Target Akhir RPJMD	Kriteria Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$(8 = (7 / 5) * 100)$	(9)	$(10 = (7 / 6) * 100)$	(11)
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	8,50	7,5	11,02	129,65	Sangat Tinggi	146,93	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11	4,64	20,8	407,05	Sangat Tinggi	448,28	Sangat Tinggi
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,6	2,43	2,43	93,46	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	20,20	28,56	17,15	84,90	Tinggi	60,05	Rendah
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.029	1.253	1.651	160,45	Sangat Tinggi	131,76	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,72	0,72	0,74	102,78	Sangat Tinggi	102,78	Sangat Tinggi
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65	71,94	70,84	108,98	Sangat Tinggi	98,47	Sangat Tinggi



No.	Sasaran Pembangunan Daerah	INDIKATOR	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024	Kriteria Capaian	Persentase Capaian dibanding Target Akhir RPJMD	Kriteria Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$(8 = (7 / 5) * 100)$	(9)	$(10 = (7 / 6) * 100)$	(11)
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	64,7	64,71	76,47	118,19	Sangat Tinggi	118,17	Sangat Tinggi
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Sedang	Tinggi	100,00	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Rendah
5.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43	2,43	2,59	93,42	Sangat Tinggi	93,42	Sangat Tinggi
6.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,77	3,61	4,88	70,56	Sedang	64,82	Rendah
7.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48	7,38	7,48	100,00	Sangat Tinggi	101,36	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,74	11,58	11,79	100,43	Sangat Tinggi	101,81	Sangat Tinggi
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	20,35	26,49	19,79	97,25	Sangat Tinggi	74,71	Sedang
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	72	71,03	72,08	100,11	Sangat Tinggi	101,48	Sangat Tinggi
		Prevalensi Stunting	%	6,4	4,79	6,5	98,44	Sangat Tinggi	64,30	Rendah
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06	91,5	90,36	99,23	Sangat Tinggi	98,75	Sangat Tinggi
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	73,3	67,77	96,81	Sangat Tinggi	92,46	Sangat Tinggi
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Terdefinisi	Berkembang	100,00	Sangat Tinggi	50,00	Sangat Rendah



*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025*

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	INDIKATOR	Satuan	Target Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024	Kriteria Capaian	Persentase Capaian dibanding Target Akhir RPJMD	Kriteria Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	$(8 = (7 / 5) * 100)$	(9)	$(10 = (7 / 6) * 100)$	(11)
		Indeks SPBE	Kategori	Baik	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,07	65,53	79,34	121,93	Sangat Tinggi	121,07	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,06	82,72	85,82	103,32	Sangat Tinggi	103,75	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39	9,43	9,49	101,06	Sangat Tinggi	100,64	Sangat Tinggi



Ringkasan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 terhadap sasaran pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rata-rata Capaian Sasaran Pembangunan Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Tahun 2024

dan Target Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran Tahun 2024 (%)	Kriteria	Rata-rata Capaian Sasaran s.d. Tahun 2026 (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	4	178,76	Sangat Tinggi	188,81	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	1	160,45	Sangat Tinggi	131,76	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	2	101,39	Sangat Tinggi	101,39	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	109,06	Sangat Tinggi	88,88	Tinggi
5.	Menurunnya angka kemiskinan	1	93,42	Sangat Tinggi	93,42	Sangat Tinggi
6.	Menurunnya angka pengangguran	1	70,56	Sedang	64,82	Rendah
7.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	3	99,22	Sangat Tinggi	92,63	Sangat Tinggi
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	2	93,27	Sangat Tinggi	82,89	Tinggi
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	2	99,62	Sangat Tinggi	99,38	Sangat Tinggi
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	1	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	5	103,75	Sangat Tinggi	92,71	Sangat Tinggi
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	1	103,32	Sangat Tinggi	103,75	Sangat Tinggi
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	101,06	Sangat Tinggi	100,64	Sangat Tinggi

c. Evaluasi Capaian Program Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaannya di Tahun 2024, program pembangunan daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, terdapat 143 program yang dilaksanakan oleh 32 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2024, berdasarkan skala peringkat kinerja realisasi dari 143 program pembangunan daerah yang telah ditetapkan, diperoleh penilaian realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Capaian Rata-rata Kinerja Program :
 - a. Program dengan kriteria capaian “sangat tinggi” sebanyak 107 program;
 - b. Program dengan kriteria capaian “tinggi” sebanyak 9 program;
 - c. Program dengan kriteria capaian “sedang” 4 program;
 - d. Program dengan kriteria capaian “rendah” 2 program;
 - e. Program dengan kriteria capaian “sangat rendah” 21 program.
2. Capaian Rata-rata Anggaran Program :
 - a. Program dengan kriteria capaian “sangat tinggi” sebanyak 70 program;
 - b. Program dengan kriteria capaian “tinggi” sebanyak 11 program;
 - c. Program dengan kriteria capaian “sedang” 7 program;
 - d. Program dengan kriteria capaian “rendah” 14 program;
 - e. Program dengan kriteria capaian “sangat rendah” 41 program.

2.2 Evaluasi terhadap Hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2024. Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2025 serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, dengan jumlah sebesar Rp1.260.612.348.230,00. Yang terdiri dari 143 program, 276 Kegiatan, dan 848



Subkegiatan termasuk program, kegiatan, dan subkegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dilaksanakan oleh 32 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.4 Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

No.	Uraian	RKPD	Mendahului Perubahan APBD	Selisih
1.	Jumlah Anggaran Belanja	1.122.282.183.064,41	1.260.612.348.230,98	138.330.165.166,67
2.	Jumlah Program	143	143	-
3.	Jumlah Kegiatan	262	276	14
4.	Jumlah Subkegiatan	776	848	72

Pada jumlah program tidak terdapat perbedaan antara RKPD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025, pada jumlah kegiatan terdapat selisih sebanyak 14 kegiatan, sementara pada subkegiatan terdapat selisih sebanyak 72 subkegiatan yang secara umum merupakan kegiatan dan subkegiatan bertambah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

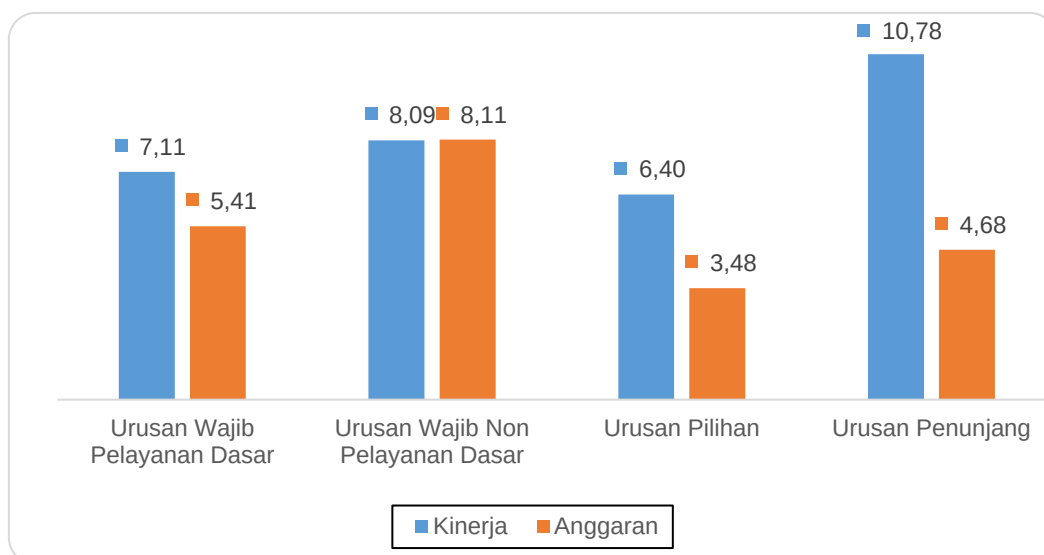
Untuk penyajian laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 menggunakan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari keseluruhan 32 urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu 24 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yang dilaksanakan dan dijabarkan melalui kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 24 urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan ditambah dengan 8 (delapan) fungsi penunjang. Pada penganggaran tahun 2024, urusan pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bidang Transmigrasi.

Dengan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi BAPPERIDA selaku perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah yang membidangi penganggaran untuk mengevaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya.

Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah :

- Total anggaran belanja pada Tahun 2025 adalah Rp1.260.612.348.230,98 dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan I sebesar Rp156.505.146.713,65 atau 12,42 persen dengan kriteria Sangat Rendah;

- b. Total rata-rata capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan I Tahun 2025 sebesar 8,10 persen dengan kriteria Sangat Rendah;
- c. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD s.d. Triwulan I Tahun 2025 sebesar 5,42 persen dengan kriteria Sangat Rendah;
- d. Jika dilihat dari capaian urusan di Tahun 2025, dijabarkan sebagai berikut :
- Urusan wajib pelayanan dasar rata-rata realisasi kinerja sebesar **7,11 persen** dan keuangan sebesar **5,41 persen**;
 - Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata kinerja sebesar **8,09 persen** dan keuangan sebesar **8,11 persen**;
 - Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar **6,40 persen** dan keuangan sebesar **3,48 persen**;
 - Untuk Fungsi Penunjang, rata-rata realisasi kinerja sebesar **10,78 persen** dan keuangan sebesar **4,68 persen**.



Gambar 2.1

Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar,
Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Tahun 2025 s.d. Triwulan I



Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2025	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2025	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025 (%)		
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	8
	<u>Urusan Wajib</u>						
1.	Pendidikan	3	14	79	0,78	6,79	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	4	14	56	8,10	5,54	Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	16	54	0,58	10,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	4	17	1,98	7,04	Dinas Perhubungan Perumahan, dan Kawasan Permukiman
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3	9	37	4,13	3,70	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana
6.	Sosial	4	7	33	15,26	5,61	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Tenaga Kerja	3	5	10	1,08	0,29	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	14	18	3,96	0,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Pangan	4	6	14	4,63	6,93	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025*

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2025	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2025	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025 (%)		
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	8
10.	Pertanahan	4	4	5	0,00	28,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Lingkungan Hidup	9	11	19	0,91	2,57	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	11	23	4,62	1,60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	4	30	23,97	5,41	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	8	28	23,43	1,94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Perhubungan	2	6	14	2,92	10,39	Dinas Perhubungan Perumahan, dan Kawasan Permukiman
16.	Komunikasi dan Informatika	2	3	20	2,45	5,15	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	7	7	11	2,74	1,02	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
18.	Penanaman Modal	4	5	9	12,50	13,36	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Kepemudaan dan Olahraga	3	6	11	0,00	0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	1	1	4	45,83	36,12	Dinas Komunikasi dan Informatika



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2025	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2025	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025 (%)		
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	8
21.	Persandian	1	1	4	0,00	7,06	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	5	7	13	9,78	15,26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23.	Perpustakaan	2	4	11	33,58	9,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	3	7	15	0,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Urusan Pilihan						
1.	Kelautan dan Perikanan	4	10	17	1,67	1,89	Dinas Perikanan
2.	Pariwisata	4	6	12	4,69	5,33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Pertanian	6	9	18	0,00	2,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4.	Kehutanan	1	1	2	0,00	0,69	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-			
6.	Perdagangan	6	7	11	20,90	5,72	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7.	Perindustrian	3	3	3	0,00	0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8.	Transmigrasi	-	-	-			
	Fungsi Penunjang						
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Keseekretariatan)	3	9	49	15,89	5,77	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD



*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025*

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2025	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2025	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I		PERANGKAT DAERAH
					TAHUN 2025 (%)		
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	8
2.	Pengawasan	2	3	12	1,85	8,11	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan Pembangunan	2	7	22	9,14	6,86	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	4	4	0,00	0,00	
5.	Kepegawaian	2	6	32	23,85	2,41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6.	Keuangan	3	6	34	5,84	5,86	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	5	12	27	16,82	9,41	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang
8.	Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)	5	5	17	12,05	3,77	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
	Rutin	1	14	54			Seluruh Perangkat Daerah
TOTAL		143	276	849			

Sumber : Laporan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan I Kab. Bangka Barat Tahun 2025



2.3 Permasalahan

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RPJMD untuk Tahun 2024 dan RKPD Tahun 2025 secara umum terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan pembangunan di Tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk capaian kinerja dan keuangan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I rata-rata realisasi kinerja hanya sebesar 8,10 persen dan untuk rata-rata realisasi keuangan sebesar 5,42 persen atau dengan kriteria sangat rendah;
2. Permasalahan yang terjadi pada triwulan I tahun anggaran 2025 adalah ketersediaan anggaran pada kas daerah tidak sesuai dengan target sehingga menyebabkan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan terjadi penundaan.
3. Pada tahun 2025 juga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja sehingga dilakukan *refocusing* dan pengurangan anggaran belanja pada seluruh perangkat daerah.
4. Berdasarkan hasil pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2024, permasalahan pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yaitu :
 - Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal;
 - Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi;
 - Tingkat risiko bencana daerah yang masih tinggi;
 - Capaian IPM masih dibawah capaian provinsi dan nasional;
 - Belum optimalnya kualitas pendidikan;
 - Kasus stunting yang masih tinggi,
 - Pelaksanaan SAKIP dan SPIP yang belum optimal; serta
 - Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal daerah lain. Namun, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal setempat.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil ataupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional.



Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.

Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan gambaran kinerja makro dari pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023

Perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi. Namun, di tengah badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi, Indonesia masih menunjukkan ketangguhan. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh lapangan usaha serta seluruh komponen pengeluaran.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 10,52 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,01 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,64 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,30 persen dan 4,85 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 18,67 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,94 persen; Pertanian, Kehutanan,



dan Perikanan sebesar 12,53 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,52 persen; serta Konstruksi sebesar 9,92 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,58 persen.

Untuk komponen pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 9,83 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,82 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,40 persen; Komponen PK-P sebesar 2,95 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,32 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) berkontraksi sebesar 1,65 persen. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,18 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,33 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,75 persen; Komponen PK-P sebesar 7,45 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,25 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,19 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 19,57 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2023 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,05 persen; diikuti Sumatera 22,01 persen; Kalimantan 8,49 persen; Sulawesi 7,10 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,77 persen; serta Maluku dan Papua 2,58 persen. Sedangkan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di semua kelompok pulau tercatat kondusif walaupun dibayangi pelemahan ekonomi global. Secara kumulatif pertumbuhan (c-to-c) tertinggi terjadi pada kelompok Pulau Maluku dan Papua yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,94 persen; diikuti Pulau Sulawesi 6,37 persen; Pulau Kalimantan 5,43 persen; Pulau Jawa 4,96 persen; dan Pulau Sumatera 4,69 persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 4,00 persen (c-to-c).

Tingkat inflasi domestik tahun 2023 bergerak moderat dan tetap terkendali seiring dengan menurunnya gejolak inflasi dunia, akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Indonesia pada Desember 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,61 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56.



Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat tingkat pengangguran terbuka mampu ditekan ke level 5,32 persen per Agustus 2023 dari periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar 5,86 persen. Penguatan pemulihan ekonomi serta berbagai program perlinsos juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54 persen per Maret 2022 menjadi 9,36 persen di 2023 lebih rendah bahkan dari masa pra covid 2019 yang sebesar 9,41 persen.

Respons bauran kebijakan Bank Indonesia, yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional oleh Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi kunci kinerja ekonomi Indonesia yang berdaya tahan. Bauran kebijakan Bank Indonesia selama 2023 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (*pro-stability*), sedangkan keempat kebijakan lain, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Bauran kebijakan Bank Indonesia ini kemudian bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional yang mencakup lima aspek penting, yaitu: (i) koordinasi fiskal dan moneter; (ii) akselerasi transformasi sektor keuangan; (iii) akselerasi transformasi sektor riil; (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan; dan (v) ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia ditempuh dengan mengoptimalkan semua instrumen yang tersedia, baik masing-masing kebijakan maupun secara bersama sehingga dapat menjaga stabilitas dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di tahun 2023, pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional. Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024.

Ekonomi Pulau Sumatera triwulan IV-2023 secara y-on-y tumbuh sebesar 4,59 persen, melambat bila dibandingkan capaian triwulan IV-2022 yang tumbuh sebesar 4,98 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan IV-2023 mencapai Rp1.162,54 triliun atau sekitar 22,06 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV



2023 memberikan kontribusi sebesar 2,27 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,50 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang diukur berdasarkan PDRB (ADHB) mencapai Rp102,64 triliun dan PDRB (ADHK) 2010 mencapai Rp60,34 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mencapai Rp67,89 juta.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 tumbuh sebesar 4,38 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 21,63 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 12,16 persen.

Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha (ADHB) pada tahun 2023 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri Pengolahan sebesar 21,15 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,49 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,69 persen; Konstruksi sebesar 9,50 persen serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,64 persen. Penyumbang terbesar bagi penciptaan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni lapangan usaha Industri Pengolahan yang mampu tumbuh sebesar 1,92 persen, namun melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 5,14 persen.

Kontraksi yang terjadi pada subkategori Industri Logam Dasar sebagai salah satu penyumbang terbesar. Rendahnya harga logam timah di pasar dunia serta adanya penertiban tata kelola pertimahan berdampak pada pengurangan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini juga terlihat pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang pada tahun 2023 berkontraksi sebesar 1,20 persen.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran didorong oleh sebagian besar komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,67 persen. Meningkatnya realisasi anggaran pemerintah untuk belanja barang, adanya realisasi anggaran pemerintah terkait persiapan kegiatan Pemilihan Umum 2024, serta adanya penambahan pegawai mendorong peningkatan kinerja komponen ini. Pertumbuhan tertinggi kedua diduduki oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT dengan laju pertumbuhan sebesar 5,54. Peningkatan ini didorong oleh adanya aktivitas kampanye oleh



partai politik, peningkatan jumlah ormas yang aktif, dan meningkatnya kegiatan lembaga keagamaan pada masa pasca pandemi. Laju pertumbuhan tertinggi ketiga dialami oleh komponen PMTB yang meningkat sebesar 4,85 persen. Adanya peningkatan pembangunan jalan sesuai Inpres No.3 Tahun 2023 serta meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah dan swasta memiliki peranan besar dalam peningkatan komponen ini.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun ini tumbuh positif namun menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen yang memiliki kontribusi terbesar yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan kinerja pada triwulan ini, dimana pada tahun sebelumnya mampu tumbuh hampir mencapai 5 persen. Selain itu, kontraksi yang dialami oleh komponen ekspor barang dan jasa juga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Inflasi tahunan gabungan antara Kota Pangkalpinang dan Kota Tanjungpandan di Tahun 2023 adalah 2,65 persen dengan IHK sebesar 117,36. Angka ini turun jika dibandingkan dengan angka inflasi tahunan gabungan di Tahun 2022 yaitu 5,38 persen. Andil inflasi y-on-y Gabungan 2 (dua) Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini utamanya disumbang oleh komoditas beras, rokok kretek filter, cabai merah, angkutan udara, dan cabai rawit.

Ekonomi Kabupaten Bangka Barat pada 2023 tumbuh sebesar 2,50 persen, menguat jika dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 2,00 persen. Nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 17,69 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 5,55 persen dibanding tahun 2022 yang terhitung sebesar 16,76 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini sejalan dengan peningkatan produksi atas dasar harga berlaku di beberapa lapangan usaha yang semakin membaik perekonomian secara nasional.

Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang dihitung atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) tahun 2023 sebesar 10,80 triliun rupiah. Berdasarkan nilai total PDRB ADHK yang dihasilkan tersebut, perekonomian di Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 ini cenderung tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya (y-o-y).

Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini



menyumbang sebesar 43,38 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan sebesar 15,06 persen; disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,57 persen.

b. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2024

Meskipun dihadapkan dengan tantangan global maupun domestik yang tinggi, perekonomian Indonesia membukukan pertumbuhan yang kuat dan stabil. Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen. Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh mencapai 4,94 persen sepanjang tahun 2024. Terjaganya konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari kenaikan okupansi hotel dan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi. APBN menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui belanja bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan untuk stabilitas harga. Selain itu, penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 4,79 juta di tahun 2024 turut mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) pada tahun 2024 tumbuh 12,48 persen. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Wilayah Jawa dan Sumatera tetap menjadi kontributor utama penopang pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,92 persen dan 4,45 persen. Aktivitas manufaktur, perdagangan, dan pembangunan konsisten menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, aktivitas hilirisasi menopang pertumbuhan tinggi di wilayah Timur Indonesia. Wilayah Maluku-Papua dan Sulawesi tumbuh tinggi masing-masing sebesar 7,81 persen dan 6,18 persen. Pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi pendorong aktivitas konstruksi di Kalimantan sehingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,52 persen. Aktivitas pariwisata tumbuh kuat mampu menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 5,04 persen.



Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan IV-2024 mencapai Rp1.259,18 triliun atau sekitar 22,22 persen dari total PDRB 38 Provinsi di Indonesia. Sementara PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan IV-2024 mencapai Rp695,81 triliun. Pada triwulan IV-2024, ekonomi di Pulau Sumatera tumbuh sebesar 4,60 persen jika dibandingkan triwulan IV-2023 (y-on-y) dan tumbuh sebesar 0,70 persen jika dibandingkan triwulan III-2024 (q-to-q). Secara kumulatif, ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2024 tumbuh sebesar 4,45 persen (c-to-c).

Struktur perekonomian Pulau Sumatera triwulan IV-2024 secara spasial masih didominasi oleh tiga provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Kontribusi ketiga provinsi tersebut mencapai 59,88 persen terhadap total PDRB ADHB Pulau Sumatera. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi yang kaya sumber daya alam. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi terendah kedua sebagai penyumbang PDRB di Pulau Sumatera diatas Provinsi Bengkulu. Kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV-2024 hanya sebesar 2,24 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,50 persen terhadap total PDRB 38 provinsi di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan triwulan IV-2023 (y-on-y), secara spasial pertumbuhan positif terjadi pada seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan y-on-y tertinggi terjadi pada Provinsi Jambi yang tumbuh sebesar 6,00 persen, diikuti Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 5,32 persen dan Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 5,14 persen. Sementara pertumbuhan y-on-y terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tumbuh sebesar 0,94 persen.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 tumbuh sebesar 0,77 persen, mengalami perlambatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,38 persen. Tren perlambatan ekonomi ini perlu diwaspadai dan didorong dengan kebijakan yang tepat.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ini didorong oleh melemahnya kinerja komponen utama dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh melambat sebesar 2,21 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 3,25 persen. Perlambatan ini merupakan imbas dari adanya permasalahan tata kelola timah yang mengakibatkan PHK di sektor pertambangan dan melemahkan daya beli



masyarakat. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga mengalami perlambatan namun masih tumbuh sebesar 4,31 persen didukung oleh adanya penerimaan pegawai PPPK dan peningkatan belanja pemerintah untuk pelaksanaan pilpres dan pilkada serentak. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRT masih tumbuh positif sebesar 7,73 persen didukung oleh adanya kampanye pilpres dan pilkada dan berbagai even maupun kegiatan keagamaan di tahun 2024.

Sementara dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi dimana kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,00 persen, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 3,93 persen. Selain kedua lapangan usaha tersebut, lapangan usaha yang juga mengalami kontraksi pada tahun 2024 adalah lapangan usaha Konstruksi yang terkontraksi sebesar 0,57 persen serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang terkontraksi sebesar 0,34 persen.

Perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun Tahun 2024 yang diukur berdasarkan PDRB ADHB mencapai Rp19,685 triliun dan PDRB ADHK 2010 mencapai Rp11,395 triliun.

Ekonomi Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 mampu tumbuh sebesar 5,47 persen, dimana pertumbuhan ekonomi ini adalah tertinggi dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hanya terdapat 3 kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi yaitu Kabupaten Bangka Barat (5,47 persen), Kabupaten Belitung (1,84 persen), serta Kabupaten Bangka Selatan (0,90 persen), sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Distribusi PDRB Kabupaten Bangka Barat terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ADHB) pada Tahun 2024 yaitu sebesar 18,30 persen, dimana capaian distribusi PDRB ini mengalami jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 17,23 persen. Secara distribusi, perekonomian di Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah kedua terbesar yang menopang perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kabupaten Bangka.

c. Pengeluaran Per Kapita

Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah, salah satu indikator yang sering digunakan adalah pengeluaran per kapita. Data

pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Merujuk data 5 (lima) Tahun terakhir, pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan trend yang positif, kecuali di Tahun 2020 yaitu efek negatif dari pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan data nasional, maka angka pengeluaran per kapita masyarakat di kabupaten Bangka Barat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian secara Nasional. Namun jika dibandingkan dengan data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian pengeluaran per kapita masyarakat di kabupaten Bangka Barat lebih rendah jika dibandingkan dengan agregat di Provinsi.



Sumber :BPS Kabupaten Bangka Barat, 2024 (diolah)

Gambar 3.1

Capaian Pengeluaran Per Kapita (dalam ribu rupiah)
Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Di Tahun 2024, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp13.199 ribu. Rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bangka Barat 5 Tahun terakhir (2020-2024) yaitu 2 persen.

3.1.2. Kebijakan Ekonomi Nasional

Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala



rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut mendorong ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh kisaran 3,2 persen pada 2025.

Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid. Indonesia, dengan pilar potensi ekonomi yang ada tetap mampu berdiri teguh di hadapan terpaan tantangan eksternal dan domestik yang merayapi laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2025 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,2 persen, dimana target tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dan resiliensi dari perekonomian Indonesia jika melihat kondisi global saat ini. Beberapa strategi akan ditempuh antara lain dengan menjaga ketat daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan sosial serta subsidi.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu. Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50 persen selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya.

Lebih lanjut, Pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian nasional. Upaya hilirisasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi

Mulai pulihnya perekonomian di tahun 2023 dan 2024 secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri masih terus menguat. Hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimis. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2025 diperkirakan akan terjadi,



sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga.

Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor row materials sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga.

Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri. Diharapkan pada tahun 2025 kedua sektor ini dapat terus tumbuh stabil dalam rangka percepatan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dalam rangka peningkatan investasi daerah, maka perlunya tetap menciptakan kondisi atau iklim yang kondusif. Hal ini terlihat adanya peningkatan jumlah investor baik dalam luar negeri dalam menanamkan modalnya dalam nilai yang besar.
3. Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tahun 2025

Gambaran ekonomi Kabupaten Bangka Barat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk Tahun 2025, lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi daerah terhadap kebijakan nasional, sedangkan pada lingkungan internal bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menjadi pemantik jalannya pembangunan baik melalui kebijakan tingkat daerah yang dikeluarkan serta melalui kelengkapan sarana prasarana pendukung perekonomian yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,28 persen.

Besar harapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, agar pelabuhan tanjung ular dapat segera beroperasi serta pembangunan Kawasan Industri Tanjung Ular



dapat berjalan dengan lancar dan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bangka Barat secara khusus. Berikut gambaran nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat (ADKH) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025.

Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

KATEGORI	URAIAN	PROYEKSI PDRB
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.601.117
B	Pertambangan dan Penggalian	1.157.021
C	Industri Pengolahan	5.541.921
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.408
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	840
F	Konstruksi	663.952
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.403.746
H	Transportasi dan Pergudangan	115.091
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.579
J	Informasi dan Komunikasi	72.044
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	55.988
L	Real Estate	271.051
M,N	Jasa Perusahaan	17.082
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	491.755
P	Jasa Pendidikan	196.651
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	93.626
R,S,T,U	Jasa lainnya	40.541
PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT		11.883.413

Sumber :Bapperida Kabupaten Bangka Barat, 2025 (diolah)

Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk periode Tahun 2025 diarahkan melalui kebijakan umum kerangka ekonomi daerah, diantaranya adalah:

- Mendorong perekonomian daerah dengan fokus mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah;
- Berupaya mendorong investasi di sektor unggulan, khususnya pada Kawasan Industri Tanjung Ular yang diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Barat;



- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya terkait pemenuhan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja infrastruktur untuk penunjang perekonomian secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat.

Melalui sinergisitas pembangunan, baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah desa serta dengan pihak swasta sebagai pelaku pembangunan diharapkan mampu menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangka Barat dan umumnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan masa transisi antara agenda tahun keempat RPJMD Tahun 2021- 2026, sekaligus merupakan tahun pertama periode Kepala Daerah Terpilih Tahun 2025-2029. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan antara lain transfer dari pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi maupun dari pendapatan asli daerah (PAD).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) PAD yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta pendapatan transfer antar daerah; serta
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, dan penerimaan pinjaman daerah. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah dalam bentuk dana perimbangan, khususnya pada komponen dana bagi hasil (DBH) terkait kondisi industri pengolahan timah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan PAD dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.2.1. Perubahan Kerangka Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 diasumsikan mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD Tahun 2025 yang semula dicanangkan sebesar Rp1.008.911.173.000,00 (satu triliun delapan milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp1.024.593.641.500 (satu triliun dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah). Secara umum perubahan kerangka pendapatan daerah terjadi pada komponen PAD maupun pada komponen pendapatan transfer. Detail perubahan proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi Pendapatan RKPD Tahun 2025	Proyeksi Pendapatan APBD Tahun 2025	Proyeksi Pendapatan P-RKPD Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	87.899.000.000,00	110.738.970.100,00	126.248.737.500,00
1.1.1	Pajak Daerah	31.540.000.000,00	50.619.970.100,00	53.619.970.100,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.059.000.000,00	47.119.000.000,00	48.558.767.400,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.300.000.000,00	3.000.000.000,00	9.000.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	815.565.095.000,00	898.172.202.900,00	903.444.904.000,00



No.	Uraian	Jumlah		
		Proyeksi Pendapatan RKPD Tahun 2025	Proyeksi Pendapatan APBD Tahun 2025	Proyeksi Pendapatan P-RKPD Tahun 2025
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	763.565.095.000,00	858.752.173.000,00	873.444.904.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	703,185,247,000.00	802.415.863.000,00	817.108.594.000,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	120.000.000.000,00	93.760.347.000,00	126.770.662.000,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	500.000.000.000,00	490.978.516.000,00	472.369.092.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	83.185.247.000,00	217.677.000.000,00	217.968.840.000,00
1.2.1.2	Dana Desa	60.379.848.000,00	56.336.310.000,00	56.336.310.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	52.000.000.000,00	39.420.029.900,00	30.000.000.000,00
1.2.2.1	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	52,000,000,000.00	39,410,029,900.00	30,000,000,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya**))	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-
1.3.1	Hibah	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	PENDAPATAN DAERAH	903.464.095.000,00	1.008.911.173.000	1.024.593.641.500

Untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diperkirakan akan stabil, yang bersumber dari PT BPD Sumsel Babel. Terkait dana BLUD dipredikasi tetap, dimana pada Tahun 2025 diasumsikan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan fasilitas BPJS dalam pelayanan kesehatan karena kebijakan terkait urusan kesehatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten



Bangka Barat. Namun perlu dicermati bahwa pendapatan yang ada pada lain-lain PAD yang sah seperti BLUD, pagu anggaran dialokasikan dan dituangkan ke dalam belanja dengan sumber pendanaan tersebut. Demikian juga dengan Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, pagu anggaran dialokasikan dan dituangkan ke dalam belanja dengan sumber pendanaan tersebut.

Untuk dana transfer yang terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah daerah, masih dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang terkait dengan keuangan negara khususnya pada komponen dana perimbangan dan keuangan provinsi.

3.2.2. Perubahan Kerangka Belanja Daerah

Kebijakan belanja yang ditempuh pada tahun anggaran 2025 adalah mengimplementasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sekaligus implementasi pelaksanaan Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Periode 2025-2029. Mengingat Tahun 2025 adalah tahun keempat pelaksanaan implementasi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sekaligus merupakan tahun pertama untuk periode kepala daerah terpilih, maka kebijakan terhadap perubahan belanja daerah menjadi sangat penting.

Uraian umum perubahan kebijakan belanja yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025 adalah :

- a. Melakukan pembayaran atas hutang belanja pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2024;
- b. Memperhatikan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pegawai khususnya terkait penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta kebijakan pegawai non ASN melalui kebijakan *Outsourcing*; dan
- c. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan tema dan prioritas pembangunan, antara lain;
 - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
 - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan standar pelayanan minimal pada urusan wajib yang bersifat dasar;



- Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan pelayanan publik;
- Memprioritaskan pada belanja terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan kasus *stunting*; serta
- Memprioritaskan pada belanja untuk perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

Terkait rincian rencana perubahan belanja daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perubahan Proyeksi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD TAHUN 2025	PROYEKSI P-RKPD TAHUN 2025
1	2	3	4
	BELANJA DAERAH		
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Rp662.001.538.717,50	Rp711.233.990.709,17
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Rp121.504.645.542,00	Rp99.947.379.322,00
3.	Urusan Pilihan	Rp23.458.792.200,00	Rp10.931.938.782,00
4.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp154.344.106.961,00	Rp157.133.430.475,00
5.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp108.419.453.043,91	Rp83.475.240.602,96
6.	Unsur Pengawasan	Rp6.880.099.800,00	Rp7.378.223.000,00
7.	Unsur Pemerintahan Umum	Rp10.186.956.000,00	Rp7.748.978.150,00
8.	Unsur Kewilayahan	Rp35.486.590.800,00	Rp36.315.460.800,00
JUMLAH BELANJA		Rp1.122.282.183.064,41	Rp 1.114.164.641.841,13

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut uraian sebagai berikut:



Tabel 3.4 Rincian Perubahan Proyeksi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025

No.	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025
1	BELANJA	Rp1.122.282.183.064,41	Rp1.253.768.958.186,96	Rp1.114.164.641.841,13
1.1	Belanja Operasi	Rp791.152.783.323,41	Rp886.008.547.768,96	Rp820.219.241.419,93
a.	Belanja Pegawai	Rp435.075.648.875	Rp476.685.347.044,50	Rp477.726.045.420,50
b.	Belanja Barang Jasa	Rp324.904.113.073,41	Rp380.157.097.599,46	Rp314.911.731.154,43
c.	Belanja Hibah	Rp25.004.171.375	Rp20.052.877.125,00	Rp20.150.469.845,00
d.	Belanja Bansos	Rp6.166.570.000	Rp9.113.226.000,00	Rp7.430.995.000,00
1.2	Belanja Modal	Rp 209.044.697.741	Rp239.285.399.618,00	Rp168.393.934.521,20
1.3	Belanja Tidak Terduga	Rp3.000.000.000	Rp3.000.000.000	Rp6.000.000.000,00
1.4	Belanja Transfer	Rp119.086.982.000	Rp125.475.010.800,00	Rp119.551.465.900,00

3.2.3. Perubahan Kerangka Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu terkait penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada upaya penutupan defisit pada belanja pembangunan serta pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Terkait penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 sebesar Rp89.571.000.341,13 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh saturupiah tiga belas sen). Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp89.471.000.341,13 (delapan puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu rupiah tiga belas sen) dan untuk penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diprediksi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dari SiLPA, perhitungannya didasarkan daya serap belanja perangkat daerah pada tahun anggaran 2024. Terkait pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2025 tidak melakukan penyertaan modal.

Dengan memperhatikan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka proyeksi netto pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp89.571.000.341,13 (delapan puluh



sembilan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu rupiah tiga belas sen).

Tabel 3.5 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

NO.	URAIAN	PROYEKSI RKPD 2025	PROYEKSI APBD 2025	PROYEKSI P-RKPD 2025
1	2	3	4	5
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	253.818.088.064,41	267.857.785.186,96	89.571.000.341,13
1.1.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	253.718.088.064,41	267.757.785.186,96	89.471.000.341,13
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.000.000.000	23.000.000.000	-
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	35.000.000.000	23.000.000.000	-
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
NETTO PEMBIAYAAN DAERAH		218.818.088.064,41	244.857.785.186,96	89.571.000.341,13



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 serta dinamika pembangunan daerah di Tahun 2025, dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka dilakukan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 yang meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan subkegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Sasaran dan Prioritas Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunan melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan
RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		2. Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
		3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Menurunnya Angka Kemiskinan
		2. Menurunnya Angka Pengangguran
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		4. Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
	2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, Tema Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 adalah **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dan Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah”**. Berdasarkan tema tersebut maka program, kegiatan dan subkegiatan strategis daerah Tahun 2025 lebih diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan dasar serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik. Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun 2025 dan permasalahan serta isu strategis pada saat penyusunan RKPD Tahun 2025.



Adapun prioritas pembangunan pada perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;
2. Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah;
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Untuk menjamin keselarasan dan ketercapaian hasil-hasil pembangunan dari level Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan penyelarasan prioritas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga ada dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Prioritas Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Tahun 2025 ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional
dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Nasional Tahun 2025		Prioritas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup
			Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah



Prioritas Nasional Tahun 2025		Prioritas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025	Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis, dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup
			Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar

Selain dukungan terhadap prioritas nasional Nawa Cita, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat turut menyinergikan dengan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional, antara lain:

- Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem;
- Pengendalian inflasi di daerah;
- Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- Dukungan swasembada pangan;
- Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan memperhatikan capaian indikator makro berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, dilakukan perubahan target indikator makro pada Perubahan RKPD 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.3. Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Target 2025	Target Perubahan 2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	4,28
2.	Pengeluaran Perkapita (Rp)	13.163.000	13.200.000



No.	Indikator Makro	Target 2025	Target Perubahan 2025
3.	Indeks Pembangunan Manusia	71,60	71,60
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,50	2,50
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,69	4,50
6.	Rasio Gini	0,185	0,197
7.	Emisi GRK (CO ₂ eqGg)	-	75,22

Adapun target indikator makro Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Penyandingan Target Indikator Pembangunan Makro Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

No.	INDIKATOR MAKRO	Perubahan Target Makro Pembangunan		
		Bangka Barat	Provinsi	Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28	2,69-4,46	5,3 - 5,6
2.	Pengeluaran Perkapita (Rp)	13.200.000	76.563.227 (PDRB Per Kapita)	-
3.	Indeks Pembangunan Manusia	71,60	0,55 (Indeks Modal Manusia)	0,56 (Indeks Modal Manusia)
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,50	4,91-4,96	7,0 - 8,0
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	4,23-4,79	4,5 - 5,0
6.	Rasio Gini	0,197	0,167	0,379 - 0,382
7.	Emisi GRK (CO ₂ eqGg)	75,22	-	38,6 (Penurunan Intensitas Emisi GRK %)

Berdasarkan evaluasi hasil capaian RPJMD Tahun 2024, dilakukan beberapa perubahan target indikator sasaran pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Target Indikator Sasaran Perubahan RKPD 2025

TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,28	4,28
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7,00	7,00
	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4,86	4,86
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,42	2,42



TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RKPD 2025	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28,22	28,22
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.141	1.141
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72
	Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94	72,94
	Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	58,82	76,47
	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Sedang
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	13.163	13.200
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,50	2,50
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,69	4,50
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,60	71,60
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,50	7,50
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,75	11,81
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,95	25,95
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,10	72,15
	Prevalensi <i>Stunting</i>	%	5,52	5,52
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,33	91,33
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Baik
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Baik	Sangat Baik
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	70
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang
	Indeks SPBE	kategori	Baik	Baik
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,30	80,00
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	86,00
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,42	1,45
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,38	10,58



Dari prioritas yang telah ditetapkan, dilakukan sinkronisasi dengan sasaran pembangunan daerah yang dimaksudkan agar implementasinya lebih fokus dan lebih terarah serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun stakeholder pembangunan yang terkait.

Tabel 4.6. Keterkaitan antara Sasaran Pembangunan Daerah
dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025
Menurunnya Angka Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar
Menurunnya Angka Pengangguran	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah
Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	

Selanjutnya dalam rangka menjabarkan program pembangunan daerah yang dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah untuk Tahun 2025 dijelaskan dalam tabel 4.10.

4.2. Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada Tahun 2025, sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga disinergikan dengan prioritas nasional, khususnya dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pencapaian prioritas nasional maupun provinsi sangat ditentukan oleh dukungan prioritas kabupaten yang dituangkan melalui program pembangunan daerah. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, dukungan program terhadap prioritas nasional maupun provinsi ditampilkan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.



4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diketahui dengan menetapkan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Utama Pembangunan (IUP). Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan menjadi IKK dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa fokus per bidang urusan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Target IKK ditentukan dengan menggunakan formula yang disajikan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017. Penetapan Target IKK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7. Target Indikator Kinerja Kunci Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1	Persentase Penduduk di atas Garis Miskin	Persentase	97.5	97.5
1.2	Persentase balita gizi buruk	Persentase	0.12	0.12
1.3	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase	2	2
1.4	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase	100	100
1.5	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persentase	9.38	9.38
1.6	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Angka	85.9	85.9
1.7	Penguatan cadangan pangan	Persentase	19.5	19.5
1.8	Rasio Gini	Indeks	0.185	0.197
1.9	Jumlah penduduk miskin	Jiwa	5,469	5,469
1.10	Jumlah Pengangguran	Orang	4,543	4,5
2.	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
2.1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persentase	45.49	45.49
2.2	Rasio Ketergantungan	Persentase	49.37	49.37
2.3	Produktivitas total daerah	Rupiah	131,600	131,600
2.4	Rasio ekspor + impor terhadap PDRB	Persentase	32.67	32.67
2.5	PDRB per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	90,941.60	95,112



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
2.6	PDRB per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	52,891.40	55,007
3.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan			
1.1	APK PAUD	Persentase	92.93	92.93
1.2	APK SD/MI	Persentase	105.89	105.89
1.2.1	APK SMP/MTs	Persentase	96.78	96.78
1.2.2	APM SD/MI	Persentase	96.78	96.78
1.3	APM SMP/MTs	Persentase	90.8	90.8
1.3.1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persentase	98	99.98
1.3.2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	91.75	91.75
1.4	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persentase	0.13	0.13
1.5	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persentase	0.92	0.92
1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	91.31	91.31
1.7	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase	100	100
1.8	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	Persentase	71.25	71.25
1.9	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	65	65
2.	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6.73	6.73
2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7.69	7.69
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	3.09	3.09
2.4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	48.49	136.7
2.5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	0.09	1.44
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0.03	0.01
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	Rasio	0.64	0.58
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)	Rasio	0.67	0.67
2.9	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	100
2.10	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Persentase	100	100
2.11	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	100	100
2.12	Pelayanan kesehatan balita	Persentase	100	100



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
2.13	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase	100	100
2.14	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	Persentase	100	100
2.15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100	100
2.16	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase	100	100
2.17	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase	100	100
2.18	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase	100	100
2.19	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase	100	100
2.20	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81.5	81.5
2.21	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	80	80
2.22	Persentase baduta <i>Stunting</i>	Persentase	5.52	8
2.23	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	Persentase	88	88
2.24	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100
2.25	Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	75	75
2.26	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	Persentase	55	55
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Persentase	82.97	74.11
3.2	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	Persentase	100	100
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase	100	100
3.4	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Persentase	100	100
3.5	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persentase	96.82	96.82
3.6	Persentase titik banjir yang dimitigasi	Persentase	62	62
3.7	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	Persentase	88	88
3.8	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	Persentase	43.75	50
3.9	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	Persentase	15.34	58.42
3.10	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	Persentase	84.09	84.09
3.11	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	Persentase	25.68	18.94
3.12	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berondisi layak	Persentase	5.83	4.42
3.13	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	Persentase	57.14	57.14



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
3.14	Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase	100	100
3.15	Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	100	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	95	95.42
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persentase	0.014	0.014
4.3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persentase	6.3	6.3
4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	2	2
4.5	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	Persentase	100	100
4.6	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	Persentase	100	100
4.7	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	Persentase	18.12	10.77
4.8	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	Persentase	3.45	3.45
4.9	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	Persentase	25	18.75
4.10	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Persentase	100	100
4.11	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase	100	100
5.	Sosial			
5.1	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	Persentase	100	100
5.2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	Persentase	100	100
5.3	persentase korban bencana yang tertangani	Persentase	100	100
5.4	Persentase PSKS yang aktif	Persentase	100	100
5.5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	100
5.6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	100
5.7	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	100
5.8	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase	100	100
5.9	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase	100	100
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
1.	Tenaga Kerja			
1.1	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	50	50
1.2	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	Persentase	36	36
1.3	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Persentase	100	100
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase	17	17
2.2	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	Persentase	65	65
2.3	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	Persentase	80	80
2.4	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100
2.5	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	Persentase	85	85
2.6	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	Persentase	85	94.39
2.7	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	100
3.	Pangan			
3.1	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase	12.76	99.18
3.2	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	Persentase	40	40
3.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Persentase	90	99.18
3.4	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persentase	50	50
3.5	Tingkat konsumsi pangan AKE	kcal/kap/hr	2,100	2,100
3.6	Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	57	66
3.7	Tingkat ketersediaan pangan AKE	kcal/kap/hr	1,440	1,000
3.8	Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	62	62
4.	Pertanahan			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persentase	20	34.78
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase	100	100
4.3	Penyelesaian izin lokasi	Persentase	100	100
4.4	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase	100	100
4.5	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	Persentase	84	-
4.6	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	Persentase	75	34.78



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
4.7	Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan	Persentase	100	100
5.	Lingkungan Hidup			
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	Dokumen	Ada	Ada
5.3	Indeks Kualitas Air	Angka	54	67.04
5.4	Indeks Kualitas Udara	Angka	90	91.02
5.5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	40	40.06
5.6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase	35	35
5.7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Angka	1	2
5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada	Ada	Ada
5.9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persentase	100	100
5.10	Timbulan sampah yang ditangani	Persentase	20.87	20.87
5.11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persentase	0.07	0.07
5.12	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Persentase	12.61	12.61
5.13	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	91	100
5.14	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase	73	20
5.15	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	Persentase	100	100
5.16	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persentase	100	100
5.17	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100
5.18	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	Persentase	58.33	
5.19	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,313.56	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Persentase	90.9	90.9



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
6.2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persentase	70.43	72.28
6.3	Persentase ketersediaan data kependudukan	Persentase	100	93.33
6.4	Persentase ketersediaan profil kependudukan	Persentase	100	100
6.5	Persentase Penduduk Memiliki KTP	Persentase	99	99.3
6.6	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	Persentase	55	55
6.7	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Persentase	100	100
6.8	Pasangan berakte nikah/ berakte perkawinan	Persentase	57	57
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Angka	8	8
7.2	Persentase PKK aktif	Persentase	100	100
7.3	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	Persentase	85	85
7.4	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	Persentase	100	100
7.5	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	Persentase	100	100
7.6	Persentase kerja sama yang diimplementasi	Persentase	35	38.33
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase	1.21	1.21
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2.27	2.27
8.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	8.17	4.52
8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase	18.71	10.15
8.5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase	14.57	79.82
8.6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase	86.63	100
8.7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase	93.95	93.95
8.8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase	81.88	89.47
8.9	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase	100	100
8.10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase	78.96	80.63
8.11	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase	100	100



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
8.12	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase	100	100
8.13	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	20	20.8
8.14	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	1
8.15	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	Persentase	79.7	79.7
8.16	persentase keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK	Persentase	87	87
8.17	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.68	88.39
9.	Perhubungan			
9.1	Rasio Izin Trayek	Angka	1	-
9.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	33,267	275,372
9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Org	22,365	275,372
9.4	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	Persentase	100	100
9.5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	Persentase	34.6	34.6
10.	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	Persentase	1.64	1.64
10.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persentase	69.09	69.09
10.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Angka	0.95	8
10.4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Angka	0.96	24.77
10.5	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	Persentase	80	80
10.6	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1,080	1,250
11.	Koperasi dan UKM			
11.1	Persentase koperasi aktif	Persentase	89	89
11.2	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	Persentase	9.09	9.09
11.3	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	Persentase	30	30
11.4	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	Persentase	4	4
11.5	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Persentase	3.45	3.45
11.6	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	75	75



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
11.7	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase	52.46	52.46
11.8	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	Persentase	61.54	61.54
12.	Penanaman Modal			
12.1	Realisasi Investasi PMA	Rupiah	189,366,369,870	189,366,369,870
12.2	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	496,206,774,396	496,206,774,396
12.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	685,573,144,266	685,573,144,266
12.4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Angka	308.12	308.12
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) berskala nasional (PMDN/PMA)	Persentase	50	50
12.6	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	Persentase	7.05	28
12.7	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	91
12.8	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persentase	27	27
12.9	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	Persentase	74	74
13.	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	100	100
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase	20.27	20.27
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	22	22
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase	40	40
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	Angka	30	30
13.6	Capaian Prestasi Olahraga	Angka	7	7
13.7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	50	50
13.8	Pencab Aktif	Jumlah	30	30
13.9	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	8
14.	Statistik			
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dokumen	Ada	Ada
14.2	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	Persentase	80	80
15.	Persandian			
15.1	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	Persentase	80	80
16.	Kebudayaan			
16.1	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	Persentase	15.13	2.63
16.2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	Jumlah	4	1
16.3	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	Jumlah	3	1



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
16.4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	44.44	46,43
16.5	Persentase museum dalam kondisi baik	Persentase	100	100
17.	Perpustakaan			
17.1	Jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustakaan	Jumlah	4	4
17.2	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase	65.61	16.94
17.3	Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	A	A
17.4	Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	Persentase	26.92	8
17.5	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	10.43	10.43
18.	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase	100	100
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	2
18.3	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	1	1
18.4	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	1	1
18.5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Persentase	5.26	100
18.6	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	83.33	100
18.7	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	7.69	100
18.8	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase	100	100
18.9	Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	Persentase	100	100
18.10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	12
3.3	Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pariwisata			
1.1	Peningkatan jumlah DTW	DTW	9	8
1.2	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100,000	100,000
1.3	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase	100	100
1.4	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	Persentase	100	100
1.5	PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	Persentase	5.45	5.45
2.	Pertanian			
2.1	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	Persentase	5	5



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
2.2	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persentase	2	2
2.3	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	Persentase	100	100
2.4	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	Persentase	30	25
2.5	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	Persentase	100	100
2.6	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	Persentase	100	100
3.	Perdagangan			
3.1	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	Persentase	83.33	83.33
3.2	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase	3.9	3.9
3.3	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	Persentase	100	100
3.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase	20	20
4.	Perindustrian			
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase	100	100
4.2	Jumlah Sentra IKM	Sentra	1	1
4.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	Persentase	100	100
4.4	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persentase	50	50
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	57,754	57,754
5.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	315.95	315.95
5.3	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	100	100
5.4	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase	23	23
	Urusan Penunjang			
1.	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	Persentase	100	100
1.2	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100
1.3	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	100	100
1.4	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100
2.	Keuangan			
2.1	Persentase SiLPA	Persentase	2.95	2.95



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
2.2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100	100
2.3	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase	100	100
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	Persentase	3.54	3.54
2.5	Persentase peningkatan retribusi daerah	Persentase	2.93	2.93
3.	Penelitian dan pengembangan			
3.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	100
3.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	50	50
3.3	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Persentase	100	100
3.4	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2	2
4.	Pengawasan			
4.1	Persentase tindak lanjut temuan	Persentase	100	100
4.2	indeks manajemen resiko	Indeks	1.9	1.9
4.3	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.3	1.3
4.4	Level Kapabilitas APIP	Level	2+	2+
5.	Sekretariat Daerah			
5.1	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	100
5.2	Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	100
5.3	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	100
5.4	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	5	3
5.5	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	100
5.6	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	100
6.	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat	Dokumen	Ada	
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2025
6.3	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perdadang Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan	Dokumen	Ada	Ada
7.	Pemerintahan Umum			
7.1	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	0
7.2	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Persentase	100	100
7.3	Persentase ormas yang aktif	Persentase	100	100
7.4	Angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	0
7.5	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	Persentase	100	100

Pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan menjadi IKU bertujuan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis daerah yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026.

Tabel 4.8. Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.28	4.28
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7	7
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4.86	4.86
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.42	2.42
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28.22	28.22
Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Miliar rupiah	1,141	1,141
Indeks konektivitas	Nilai	0.71	0.72
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik	Baik
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.94	72.94
Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	58.82	76.47
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Sedang
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	13,163	13,200
Angka kemiskinan	%	2.50	2.50
Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.69	4.5
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.6	71.6



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Perubahan Target Tahun 2025
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.5	7.5
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.75	11.81
Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25.95	25.95
Angka Harapan Hidup	Tahun	71.1	72.15
Prevalensi <i>Stunting</i>	%	5.52	5.52
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.33	91.33
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Baik
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Baik	Sangat Baik
Nilai SAKIP	Nilai	70	70
Opini BPK	Opini	WTP	WTP
Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang
Indeks SPBE	Indeks	Baik	Baik
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.3	80
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1.42	1.45
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.38	10.58

Selain pengukuran Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Utama, untuk mengukur pencapaian Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045, maka ditetapkan target indikator pembangunan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
1.	PDRB per kapita	Rp Juta	95,112
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,28
3.	Indeks Daya Saing Daerah	-	3,6
4.	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,20
5.	Indeks Reformasi Hukum	-	98,40
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	3,20
7.	Indeks Pelayanan Publik	-	3,72
8.	Indeks Integritas Nasional	-	70
9.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	46,32
10.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,42
11.	Jumlah Tamu Wisatawan (Menginap)	Orang	20.000



No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
12.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,35
13.	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian	%	42,55
14.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	99,82
15.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,82
16.	Return on Aset BUMD	%	3,10
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	52,65
19.	Indeks Inovasi Daerah	-	35,52
20.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	19
21.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	80,15
22.	Persentase Desa Mandiri	%	50,00
23.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,16
24.	Tingkat Inflasi		1 - 2
25.	Tingkat Kemiskinan	%	2,5
26.	Gini Rasio	-	0,197
27.	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,15
28.	Angka Kematian Ibu	-	136,7
29.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,78
30.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	63,27
31.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	83,47
32.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,66
33.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	SD 74,32 SMP 78,34
34.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	SD 66,98 SMP 74,95
35.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,49
36.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,80
37.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,46
38.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	%	43,88
39.	Indeks Pembangunan Keluarga	-	62
40.	Indeks Ketimpangan Gender		0,372
41.	Indeks Pelestarian Kebudayaan	-	9,16
42.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)		10,85
43.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	1.091,27
44.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0,19



*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025*

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target P-RKPD Tahun 2025
45.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	28,65
46.	Indeks Resiko Bencana	-	144
47.	Emisi GRK	-	75,22
48.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	72,94
49.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,83
50.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	28,15
51.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	9,56

Tabel 4.10. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/	2.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57	
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1.440	
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	62	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	18,12	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
					Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3,45	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	25	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
					Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96,40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
			Harapan Lama Sekolah	tahun		11,81	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%		95,57
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,95		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,25		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71,25		
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	16,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B		
						Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	8,00		
						Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10,43		
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	97	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting	%	5,52		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81,5	
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	80	
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	88	Dinas Kesehatan		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Perbup	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	55	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	75	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	25,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak	%	5,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	84,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	87	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4,86	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,42	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28,22	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	57.754,00	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	315,95	Dinas Perikanan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	100	Dinas Perikanan
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	9,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	61,54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	23	Dinas Perikanan
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	2,63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46,43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustakaan	Jumlah	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	6	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	83,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.141	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,72	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,28	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	34,60	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	43,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	15,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,94	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	91	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	76,47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	73	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	22	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	58,33	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.313,56	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	57,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Rogram Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	64	Satuan Polisi Pamong Praja
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	75	
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah
		Opini BPK	Opini	WTP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Indeks SPBE	Kategori	Baik		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,00		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1,9	Inspektorat Daerah
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,3	
					Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-	
						Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5,26	
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	83,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,69	
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100	
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1.080	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	85,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	465	
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	2.092	
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95,42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	33	
						Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	82	
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	90,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	70,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	93,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	5	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	10,58	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,54	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
						Persentase peningkatan retribusi daerah	%	2,93	
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	38,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4.11. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 6
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 6
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 6
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 6
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	PN 6
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 6
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 6
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57		
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1.440		
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	62		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 6
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 6
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	PN 6
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	18,12	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	PN 6
					Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3,45	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	PN 6
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	25	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	PN 6
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PN 6

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PN 6
					Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PN 6
					Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96,4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PN 4
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95,57		
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,25		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PN 4
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PN 4
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	16,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PN 4
						Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B		
						Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	8,00		
						Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10,43		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	PN 8
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah	8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PN 8
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PN 8
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
						Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	PN 8

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Seluruh Kecamatan	PN 8
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PN 1
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PN 1
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PN 8
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PN 8
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PN 8
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh	%	100	Kecamatan	PN 8
					Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,15	Program Pemenuhan Upaya Kesahatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan
	Prevalensi Stunting	%	5,52	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas		Nilai	81,5			
				Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit		Nilai	80			
				Persentase baduta <i>stunting</i>		%	8			
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	88	Dinas Kesehatan	PN 4
	Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Perbup	1		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4				

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	55	Dinas Kesehatan	PN 4
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	PN 4
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	75		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	25,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 4
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak	%	5,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 4
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	84,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 4
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	PN 4
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4
						Persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	87		
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PN 4
2. Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 2
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4,86	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 2
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,42	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 2
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28,22	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 2
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN 2
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 2
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	57.754,00	Dinas Perikanan	PN 2
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	315,95	Dinas Perikanan	PN 2
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	100	Dinas Perikanan	PN 2
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	9,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	61,54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PN 5
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PN 5
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PN 5
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	23	Dinas Perikanan	PN 2
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	PN 2
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	2,63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46,43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PN 3
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustnas	Jumlah	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PN 3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	6	Dinas Lingkungan Hidup	PN 3
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	83,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	PN 3
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.141						
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PN 5
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PN 5
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PN 5
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan	%	42,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 5
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,72	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,28		
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	34,6	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	PN 3
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	43,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	15,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 3
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,94	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	91	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	73	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	22	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	58,33	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.313,56	Dinas Lingkungan Hidup	PN 8
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	57,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 8
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PN 8
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	64	Satuan Polisi Pamong Praja	PN 8
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	75		
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non	%	100		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PN 8
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	PN 7
		Opini BPK	Opini	WTP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PN 7
		Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PN 7
		Indeks SPBE	Kategori	Baik		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,00		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	PN 7
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	PN 7
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PN 7

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PN 7
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1,9	Inspektorat Daerah	PN 7
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,3		
					Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah	PN 7
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD	PN 7
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	PN 7
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PN 7
						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-		
						Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5,26		
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	83,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PN 7
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,69		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PN 7
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	PN 7

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1080	Dinas Komunikasi dan Informatika	PN 7
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	85,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PN 7
						Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	465		
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	2.092		
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95,42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	PN 7
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	33		
						Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	82		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	PN 7
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	90,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PN 7
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	70,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PN 7
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	93,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PN 7

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PN 7
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	PN 7
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	PN 7
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 7
					Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 7
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 7
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	5	Sekretariat Daerah	PN 7
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	10,58	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,54	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	PN 7
						Persentase peningkatan retribusi daerah	%	2,93		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	PN 7
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	38,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PN 7

Tabel 4.12. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Program Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
1. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2.100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57		
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1.440		
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	62		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang tertangani	%	18,12	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3,45	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	25	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,5	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96,4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95,57		
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,25		
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,95	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71,25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	16,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
						Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B		
						Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	8,00		
						Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10,43		
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	50	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Seluruh Kecamatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	72,15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	97	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
		Prevalensi Stunting	%	5,52		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81,5		
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	80		
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8		
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	88	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Perbup	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	55	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	75		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	25,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	5,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	84,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79,70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
						persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	87		
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	80	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya
2. Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	4,86	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/ Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,42	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	28,22	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	57.754,00	Dinas Perikanan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	315,95	Dinas Perikanan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	100	Dinas Perikanan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	9,09	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	75	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang- undangan	%	61,54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	23	Dinas Perikanan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	2,63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46,43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustakaan	Jumlah	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	6	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	83,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.141	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7,05	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,72	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Baik		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,28		
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	34,6	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	43,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	15,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,94	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	91	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	76,47	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	73	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Sedang	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	22	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	58,33	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.313,56	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	57,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	64	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	75		
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
		Opini BPK	Opini	WTP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
		Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
		Indeks SPBE	Kategori	Baik		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,00		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1,9	Inspektorat Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,3		
					Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-		
						Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5,26		
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	83,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,69		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1080	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	85,47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
						Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	465		
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	2.092		
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95,42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	33		
						Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	82		
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	90,90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	70,43	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	93,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	85	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	5	Sekretariat Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	10,58	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,54	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
						Persentase peningkatan retribusi daerah	%	2,93		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	38,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan gambaran rencana pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pertimbangan utama dengan memanfaatkan dana dengan sebaik-baiknya, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah serta difokuskan pada pencapaian tema dan prioritas pembangunan daerah.

Pencapaian prioritas pembangunan daerah tentunya didapat melalui program-program prioritas yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Tentu saja rencana pembangunan yang telah disusun tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mengingat keterbatasan potensi anggaran.

Pelaksanaan perumusan program/kegiatan/subkegiatan diklasifikasikan atas program penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur pemerintahan umum serta unsur kewilayahan yang dilaksanakan melalui 32 perangkat daerah.

5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin perangkat daerah antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (digunakan bagi perangkat daerah yang memiliki penerimaan daerah) administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan BLUD (digunakan bagi perangkat daerah yang menggunakan sistem BLUD).



Namun ada beberapa kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperuntukkan khusus untuk pelaksanaan rutin pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) antara lain kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, penataan organisasi, pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, layanan administrasi DPRD.

5.1.2. Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan sub unit organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan dengan 4 (empat) program strategis yaitu:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

b. Sub Unit Organisasi dalam hal ini RSUD Sejiran Setason dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat”.

c. Sub Unit Organisasi dalam hal ini Puskesmas Mentok, Puskesmas Simpangteritip, Puskesmas Kundi, Puskesmas Jebus, Puskesmas Puput, Puskesmas Sekar Biru, Puskesmas Kelapa, serta Puskesmas Tempilang memiliki 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat”.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 10 (sepuluh) program strategis yaitu:



- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - 8) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - 9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; dan
 - 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pengembangan Perumahan;
 - 2) Program Kawasan Permukiman;
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 (satu) program strategis yaitu Program Penanggulangan Bencana;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) program strategis yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.



6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
- 2) Program Rehabilitasi Sosial;
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 4) Program Penanganan Bencana.

5.1.3. Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 3) Program Hubungan Industrial.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.



4. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 4 (empat) program strategis yaitu:

- 1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 2) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- 3) Program Penatagunaan Tanah; dan
- 4) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

5. **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 9 (sembilan) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; dan
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.

6. **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.



7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;



- 3) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan
- 6) Program Pengembangan UMKM.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Program Pelayanan Penanaman Modal; dan
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral”.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi”.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah;
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman.



17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 2 (dua) program strategis yaitu:

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Arsip;
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
- 3) Program Perizinan Penggunaan Arsip.

5.1.4. Program Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata; dan
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;



- 3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - 4) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
 - 5) Program Penyuluhan Pertanian.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
- Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - 3) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - 4) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
 - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan
- Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut:
- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Bidang Penelitian
- Bidang Penelitian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Penelitian dan Pengembangan Daerah”.



3. Bidang Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”.

4. Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Kepegawaian Daerah”.

5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

5.1.6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”.



5.1.7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

5.1.9. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 6 (enam) perangkat daerah yaitu Kecamatan Mentok, Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parititga serta Kecamatan Tempilang.

1. Kecamatan Mentok

Kecamatan Mentok memiliki 5 (lima) suborganisasi yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaيداeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Keranggan. Kecamatan Mentok melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



2. Kecamatan Simpang Teritip

Kecamatan Simpang Teritip melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Kecamatan Jebus

Kecamatan Jebus melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4. Kecamatan Kelapa

Kecamatan Kelapa memiliki 1 (satu) suborganisasi yaitu Kelurahan Kelapa. Kecamatan Kelapa melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5. Kecamatan Tempilang

Kecamatan Tempilang melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



6. Kecamatan Parititga

Kecamatan Parititga melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas yang ditetapkan memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini meliputi perubahan target indikator sasaran, program, kegiatan maupun subkegiatan. Perubahan ini terjadi karena adanya penyesuaian kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Rincian pagu indikatif berdasarkan urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, sedangkan perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Urusan Tahun 2025

No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
			RKPD 2025	P RKPD 2025
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		662.001.538.717,50	711.233.990.709,17
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	278.800.358.850,00	278.800.358.850,00
2	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	319.283.140.004,52	319.184.617.317,52
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.988.155.158,65	66.988.155.158,65
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	15.996.185.257,00	15.996.185.257,00



No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
			RKPD 2025	P RKPD 2025
5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.600.230.000,00	5.600.230.000,00
		Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.666.607.000,00	13.611.607.000,00
6	Bidang Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.114.087.126,00	11.052.837.126,00
B	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		121.504.645.542,00	99.947.379.322,00
1	Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.771.998.000,00	4.141.229.500,00
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.635.755.000,00	6.595.075.000,00
3	Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.352.580.000,00	17.397.493.430,00
4	Bidang Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000.000,00	649.273.500,00
5	Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	15.108.639.280,00	15.044.177.095,00
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.865.198.712,00	8.473.483.962,00
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	1.971.750.000,00	877.528.000,00
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	831.366.000,00	3.946.426.000,00
9	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	12.613.200.000,00	5.014.914.950,00
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.914.170.000,00	8.075.240.000,00
11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	7.543.668.191,00	6.959.192.191,00
12	Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.600.249.000,00	6.428.088.872,00
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	6.784.475.000,00	3.003.313.000,00
14	Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	270.000.000,00	235.870.000,00
15	Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.000.000,00	60.320.000,00



No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
			RKPD 2025	P RKPD 2025
16	Bidang Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.052.590.359,00	6.355.662.680,00
17	Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.412.386.000,00	6.432.512.842,00
18	Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	626.620.000,00	257.578.300,00
C	Urusan Pemerintahan Pilihan		23.458.792.200,00	10.931.938.782,00
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	6.455.744.800,00	4.627.872.000,00
2	Bidang Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.620.069.500,00	2.358.798.400,00
3	Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.267.000.000,00	845.004.532,00
4	Bidang Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	495.000.000,00	71.553.300,00
5	Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.020.977.900,00	2.608.720.550,00
6	Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	600.000.000,00	419.990.000,00
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		108.419.453.043,91	83.475.240.602,96
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	37.789.791.500,00	34.135.614.960,00
		Sekretariat DPRD	70.629.661.543,91	49.339.625.642,96
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		154.344.106.961,00	157.133.430.475,00
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	7.226.578.400,00	7.337.652.400,00
2	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	653.100.000,00	441.656.000,00
3	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	128.982.548.661,00	132.691.108.875,00
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.614.404.900,00	9.867.683.700,00
4	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	7.221.850.000,00	6.495.784.500,00
5	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.645.625.000,00	299.545.000,00
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		6.880.099.800,00	7.378.223.000,00
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	6.880.099.800,00	7.378.223.000,00
G	Unsur Kewilayahan		35.486.590.800,00	36.315.460.800,00



No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	
			RKPD 2025	P RKPD 2025
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Mentok	13.092.235.000,00	12.926.037.000,00
		Kecamatan Simpangteritip	3.497.780.000,00	3.692.652.500,00
		Kecamatan Jebus	4.617.275.800,00	4.835.678.300,00
		Kecamatan Parittiga	4.079.840.000,00	4.212.290.000,00
		Kecamatan Kelapa	5.913.265.000,00	6.274.008.000,00
		Kecamatan Tempilang	4.286.195.000,00	4.374.795.000,00
H	Unsur Pemerintahan Umum		10.186.956.000,00	7.748.978.150,00
1	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.186.956.000,00	7.748.978.150,00
TOTAL			1.122.282.183.064,41	1.114.164.641.841,13

Tabel 5.2 Pagu Indikatif Perubahan RKPD Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
		RKPD 2025	P RKPD 2025
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	274.163.946.050,00	281.803.671.850,00
2	Dinas Kesehatan	198.056.586.917,50	319.184.617.317,52
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	128.111.870.000,00	67.637.428.658,65
4	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	62.756.265.000,00	21.011.100.207,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.051.141.000,00	5.600.230.000,00
6	Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.886.335.000,00	13.611.607.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.344.819.750,00	11.930.365.126,00
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.371.998.000,00	4.561.219.500,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.467.121.000,00	10.541.501.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.619.580.000,00	18.242.497.962,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	15.603.639.280,00	15.115.730.395,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.865.198.712,00	8.473.483.962,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.334.170.000,00	8.371.430.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.600.249.000,00	6.428.088.872,00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.672.659.859,00	8.714.461.080,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.039.006.000,00	6.690.091.142,00
17	Dinas Perikanan	6.455.744.800,00	4.627.872.000,00
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	16.564.646.091,00	9.567.912.741,00
19	Sekretariat Daerah	37.789.791.500,00	34.135.614.960,00
20	Sekretariat DPRD	70.629.661.543,91	49.339.625.642,96



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
		RKPD 2025	P RKPD 2025
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	7.879.678.400,00	7.779.308.400,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	128.982.548.661,00	132.691.108.875,00
23	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.614.404.900,00	9.867.683.700,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm Daerah	8.867.475.000,00	6.795.329.500,00
25	Inspektorat Daerah	6.880.099.800,00	7.378.223.000,00
26	Kecamatan Mentok	13.092.235.000,00	12.926.037.000,00
27	Kecamatan Simpangteritip	3.497.780.000,00	3.692.652.500,00
28	Kecamatan Jebus	4.617.275.800,00	4.835.678.300,00
29	Kecamatan Parittiga	4.079.840.000,00	4.212.290.000,00
30	Kecamatan Kelapa	5.913.265.000,00	6.274.008.000,00
31	Kecamatan Tempilang	4.286.195.000,00	4.374.795.000,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.186.956.000,00	7.748.978.150,00
TOTAL		1.122.282.183.064,41	1.114.164.641.841,13

5.3 Dukungan Program dan Penganggaran Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Daerah, Nasional dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan di tingkat nasional dan prioritas pembangunan daerah provinsi tidak terlepas dari pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat daerah kabupaten/kota. Untuk melihat dukungan program dan penganggaran pembangunan daerah terhadap prioritas daerah, nasional maupun prioritas provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.4, Tabel 5.5 dan Tabel 5.6.



Tabel 5.4 Keterkaitan Program Daerah dan Dukungan Penganggaran Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2025

RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	1.561.431.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	1.998.841.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	228.828.032,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	375.460.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	30	94.556.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	141.160.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	50	1.357.187.950,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	57.754,00	597.300.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	315,95	181.405.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	100	170.200.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	23	170.055.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	47.125.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas,	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	9,09	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
	Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4	35.740.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,45	437.150.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	75	28.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang- undangan	%	61,54	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	2.331.078.400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	500	16.725.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	10.995.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	2,63	325.537.142,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	55.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	6.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46,43	281.060.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	197.050.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustnas	Jumlah	4	150.150.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	6	71.553.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	83,33	1.798.473.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	680.221.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	299.950,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	129.726.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
			Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82,97	31.627.238.723,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,28		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhna sarana dan prasarana LLAJ	%	34,6	4.967.789.950,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	360.971.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	84	10.215.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	75	222.525.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	55.562.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	88	4.278.614.729,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	43,75	148.062.341,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	15,34	125.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96,4	70.271.941.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95,57		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
	Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,25		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71,25	37.150.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	65	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	16,94	662.816.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B		
			Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	8,00		
			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10,43		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	97	174.474.114.706,00	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81,5		
			Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	80		
			Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	88	442.619.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Perbup	1	241.981.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,68	2.325.590.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	55	256.985.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	2.909.088.600,00	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	75		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	25,68	11.186.962.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	5,83	4.067.393.515,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	84,09	1.017.040.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	30	2.870.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79,70	1.378.855.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	87		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	65	106.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	80	500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	288.635.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	85	100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	85	32.545.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	127.075.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7,05	204.757.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	65.040.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	27	27.422.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42,86	1.680.209.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	303.915.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	79.175.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	50	36.900.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PN 6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	309.875.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	2.507.343.026,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	339.698.600,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	701.415.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	4.094.885.000,00	Kecamatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	50.219.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/hr	2.100	111.239.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	57		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
			Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1.440		
			Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	62		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	10.005.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	86.010.430,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	659.359.800,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	18,12	3.567.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3,45	2.398.581.257,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	25	2.142.169.200,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	283.029.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	7.926.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	57.058.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	584.453.630.895,48	Seluruh Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	1.146.896.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	445.120.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	441.656.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	80	235.870.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	126.584.729.725,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	241.531.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1,9	1.153.912.500,00	Inspektorat Daerah
			Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,3		
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	216.847.500,00	Inspektorat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	19.014.007.304,00	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	80	60.320.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	37.937.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
			Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-		
			Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5,26		
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	83,33	206.890.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,69		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
			Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	12.750.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	80	2.732.058.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1080	810.941.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	85,47	299.545.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	465		
			Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	2.092		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95,42	1.000.703.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	33		
			Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	82		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	293.654.200,00	Sekretariat Daerah
			Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100		
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	90,90	219.517.550,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	70,43	26.626.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	93,33	2.040.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	16.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	1.261.476.300,00	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	82.255.000,00	Seluruh Kecamatan



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	85	690.990.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	21.697.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	97.615.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	5	160.090.000,00	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,54	584.895.500,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase peningkatan retribusi daerah	%	2,93		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	38,33	67.225.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	91	350.919.940,00	Dinas Lingkungan Hidup



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
	Harmonis, dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	73	5.059.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	10.604.975,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	4.275.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	22	44.373.050,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	300.071.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola	%	58,33	22.449.900,00	Dinas Lingkungan Hidup



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.313,56	8.316.933.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	57,14	1.429.840.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	1.538.100.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
			Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	64	1.010.640.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	75		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100		



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	62	303.694.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	5.346.858.000,00	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, PORA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	50	83.313.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	12.095.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	4.300.275.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	56.952.500,00	Seluruh Kecamatan
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	43.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



RKP TAHUN 2025		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
KODE PN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL			Satuan	Nilai		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	141.617.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	375.935.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	45.465.000,00	Kecamatan



Tabel 5.5 Keterkaitan Program Daerah dan Dukungan Penganggaran Terhadap Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya dan Berbudaya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	309.875.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	2.507.343.026,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	339.698.600,00	Dinsos, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	701.415.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	4.094.885.000,00	Kecamatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	50.219.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2.100	111.239.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57		
			Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1.440		
			Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	62		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	10.005.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	86.010.430,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	659.359.800,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	18,12	3.567.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3,45	2.398.581.257,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	25	2.142.169.200,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	283.029.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	7.926.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	57.058.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96,4	70.271.941.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95,57		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,25		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71,25	37.150.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	65	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	16,94	662.816.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B		
			Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	8,00		
			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10,43		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	5.346.858.000,00	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	50	83.313.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	12.095.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	4.300.275.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	56.952.500,00	Seluruh Kecamatan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	1.561.431.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	1.998.841.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	43.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	141.617.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	375.935.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	45.465.000,00	Kecamatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	97	174.474.114.706,00	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81,5		
			Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	80		
			Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	88	442.619.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Perbup	1	241.981.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,68	2.325.590.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	55	256.985.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	2.909.088.600,00	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	75		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	25,68	11.186.962.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	5,83	4.067.393.515,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	84,09	1.017.040.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	30	2.870.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79,70	1.378.855.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	87		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	65	106.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	80	500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	288.635.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	85	100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	85	32.545.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	127.075.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
2	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	228.828.032,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/ Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	375.460.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	30	94.556.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	141.160.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	50	1.660.881.950,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	62		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	57.754,00	597.300.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	315,95	181.405.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	100	170.200.000,00	Dinas Perikanan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	9,09	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4	35.740.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,45	437.150.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	75	28.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	61,54	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	303.915.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	79.175.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	50	36.900.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	23	170.055.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	47.125.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	2.331.078.400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	500	16.725.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	10.995.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	2,63	325.537.142,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	55.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	6.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46,43	281.060.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	197.050.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustakaan	Jumlah	4	150.150.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	6	71.553.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	83,33	1.798.473.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	680.221.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	299.950,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	129.726.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7,05	204.757.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	65.040.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	27	27.422.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42,86	1.680.209.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82,97	31.627.238.723,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,28		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	34,6	4.967.789.950,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	360.971.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	84	10.215.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	75	222.525.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	55.562.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	88	4.278.614.729,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	43,75	148.062.341,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	15,34	125.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	91	350.919.940,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	73	5.059.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	10.604.975,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	4.275.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	22	44.373.050,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	300.071.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola	%	58,33	22.449.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.313,56	8.316.933.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	57,14	1.429.840.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Rogram Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	1.538.100.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
			Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	64	1.010.640.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	75		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100		
3.	Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	584.453.630.895,48	Seluruh Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	1.146.896.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	445.120.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	441.656.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	80	235.870.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	126.584.729.725,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	241.531.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1,9	1.153.912.500,00	Inspektorat Daerah
			Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,3		
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	216.847.500,00	Inspektorat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	19.014.007.304,00	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	80	60.320.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	37.937.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-		
			Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5,26		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	83,33	206.890.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,69		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
			Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	12.750.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	80	2.732.058.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1080	810.941.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	85,47	299.545.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
			Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	465		
			Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	2.092		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95,42	1.000.703.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	33		
			Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	82		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	293.654.200,00	Sekretariat Daerah
			Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	90,90	219.517.550,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	70,43	26.626.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	93,33	2.040.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	16.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	1.261.476.300,00	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	82.255.000,00	Seluruh Kecamatan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	85	690.990.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	21.697.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	97.615.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



*Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025*

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	5	160.090.000,00	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,54	584.895.500,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase peningkatan retribusi daerah	%	2,93		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	38,33	67.225.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Tabel 5.6 Keterkaitan Program Daerah dan Dukungan Penganggaran Terhadap Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
1.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	309.875.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	2.507.343.026,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	339.698.600,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	701.415.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	4.094.885.000,00	Kecamatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	50.219.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2.100	111.239.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57		
			Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1.440		
			Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	62		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	10.005.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	86.010.430,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	659.359.800,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	18,12	3.567.000.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3,45	2.398.581.257,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	25	2.142.169.200,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	283.029.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	7.926.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	57.058.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96,4	70.271.941.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95,57		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95,25		
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71,25	37.150.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	65	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	16,94	662.816.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B		
			Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	8,00		
			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10,43		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	5.346.858.000,00	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	50.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	50	83.313.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	12.095.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	4.300.275.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	56.952.500,00	Seluruh Kecamatan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	1.561.431.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	1.998.841.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	43.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	141.617.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	375.935.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	45.465.000,00	Kecamatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	97	174.474.114.706,00	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81,5		
			Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	80		
			Persentase baduta stunting	%	8		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	88	442.619.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Perbup	1	241.981.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,68	2.325.590.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	55	256.985.000,00	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	2.909.088.600,00	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	75		
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	25,68	11.186.962.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak	%	5,83	4.067.393.515,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	84,09	1.017.040.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	30	2.870.000.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79,70	1.378.855.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
			Persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	87		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	65	106.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	80	500.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	288.635.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	85	100.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	85	32.545.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	127.075.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
2.	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	228.828.032,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	375.460.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	30	94.556.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	5.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	141.160.500,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	50	1.357.187.950,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	57.754,00	597.300.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	315,95	181.405.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	100	170.200.000,00	Dinas Perikanan
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	9,09	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4	35.740.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,45	437.150.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	75	28.800.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	61,54	300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	303.915.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	79.175.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	50	36.900.000,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	23	170.055.000,00	Dinas Perikanan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	47.125.000,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	2.331.078.400,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	500	16.725.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	10.995.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	2,63	325.537.142,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	55.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	6.000.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46,43	281.060.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	197.050.000,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustnas	Jumlah	4	150.150.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	6	71.553.300,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	83,33	1.798.473.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	680.221.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	299.950,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	129.726.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7,05	204.757.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	65.040.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	27	27.422.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42,86	1.680.209.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82,97	31.627.238.723,65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	96,28		



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	34,6	4.967.789.950,00	Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	360.971.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	84	10.215.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	75	222.525.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	55.562.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	88	4.278.614.729,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	43,75	148.062.341,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	15,34	125.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	91	350.919.940,00	Dinas Lingkungan Hidup



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	73	5.059.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	10.604.975,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	4.275.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	22	44.373.050,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	300.071.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	58,33	22.449.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.313,56	8.316.933.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	57,14	1.429.840.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Rogram Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	1.538.100.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
			Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	64	1.010.640.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	75		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	50	303.694.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	584.453.630.895,48	Seluruh Perangkat Daerah



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	1.146.896.600,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	445.120.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	441.656.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2		
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	80	235.870.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	126.584.729.725,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	241.531.600,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks manajemen resiko	Indeks	1,9	1.153.912.500,00	Inspektorat Daerah
			Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,3		
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	216.847.500,00	Inspektorat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	19.014.007.304,00	Sekretariat DPRD
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	80	60.320.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	37.937.400,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
			Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-		
			Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5,26		
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	83,33	206.890.900,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,69		
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
			Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	12	12.750.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	80	2.732.058.800,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	1080	810.941.200,00	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	85,47	299.545.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	465		
			Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	2.092		
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95,42	1.000.703.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	33		
			Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	82		



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	293.654.200,00	Sekretariat Daerah
			Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100		
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	90,90	219.517.550,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	70,43	26.626.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	93,33	2.040.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	16.125.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	1.261.476.300,00	Seluruh Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	82.255.000,00	Seluruh Kecamatan



NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				Satuan	Nilai		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	85	690.990.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	21.697.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	97.615.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	5	160.090.000,00	Sekretariat Daerah
			Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3,54	584.895.500,00	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase peningkatan retribusi daerah	%	2,93		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	38,33	67.225.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TABEL 5.3. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025
KABUPATEN BANGKA BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									662.001.538.717,50	711.233.990.709,17		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									267.379.471.050,00	278.800.358.850,00		
1	01				DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									267.379.471.050,00	278.800.358.850,00		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	194.842.201.050,00	208.441.267.650,00	PN 7	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	1.228.800,00		
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	214.800,00		APBD
1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	199.000,00		APBD
2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	264.000,00		APBD
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	280.000,00		APBD
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	271.000,00		APBD
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	192.132.891.050,00	206.158.364.950,00		
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.553 Orang/ bulan	1.553 Orang/ bulan	192.131.991.050,00	206.157.590.950,00		APBD
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	274.000,00		APBD
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	240.000,00		APBD
1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	260.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	270.000,00		
1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	270.000,00		APBD
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	144.900.000,00	855.000,00		
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	95.100.000,00	0,00		APBD
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	280.000,00		APBD
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 orang	54 orang	13.500.000,00	285.000,00		APBD
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	72 orang	36.000.000,00	290.000,00		APBD
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	796.100.000,00	428.772.000,00		
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	5.500.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	106.800.000,00	79.736.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	40.000.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12.000.000,00	6.000.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	101.000.000,00	50.386.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	476.000.000,00	238.000.000,00		APBD
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	0,00		
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Unit	20.000.000,00	0,00		
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Unit	20.000.000,00	0,00		
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.617.210.000,00	1.607.310.000,00		
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	100.000,00		APBD
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	158.250.000,00	158.250.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	8.000.000,00		APBD
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.440.960.000,00	1.440.960.000,00		APBD
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	109.300.000,00	244.466.900,00		
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 unit	51 unit	52.710.000,00	18.671.900,00		APBD
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	9 unit	45.000.000,00	220.000.000,00		APBD
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	19 unit	11.590.000,00	5.795.000,00		APBD
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,5		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	96,40%	96,40%	72.450.120.000,00	70.271.941.200,00	PN 4	
								Harapan Lama Sekolah	11,81		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95,57%	95,57%				
								Persentase Sekolah Terakreditasi A	25,95%		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95,25%	95,25%				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	94,75%	94,75%	38.804.590.000,00	36.833.325.170,00		
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1 Ruang		206.760.000,00		
1	01	02	2.01	0047	Penambahan Ruang Kelas Baru						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	300.000,00	234.713.000,00		
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	32 Unit	3.081.000.000,00	2.250.666.200,00		
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 ruang	11 ruang	845.000.000,00	1.008.313.000,00		
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	84.974.000,00		
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	21 paket	21 paket	1.302.250.000,00	1.202.250.000,00		
					Pengadaan Mebelair siswa (SDN 18 Muntok 60 set)					Desa Air Putih				90.000.000,00			Renja
					Pengadaan Meubelair siswa SD SD N 11 Parittiga, Kab. Bangka Barat (30 Set)					Desa Air Gantang				45.000.000,00			Renja
					Pengadaan Meubelair siswa SD Dusun Jebu Darat SDN 12 (40 SET) , Kab. Bangka Barat					Desa Kelabat				60.000.000,00			Renja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Pengadaan Meubelair siswa SD 14 Parittiga Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kab. Bangka Barat (40 set)					Desa Kelabat				60.000.000,00			Renja
					Pengadaan Mebelair siswa SD 10 Sp. (RT 03 Dusun I Simpanggong, Kab. Bangka Barat) (50 Set)					Desa simpanggong				75.000.000,00			Renja
					Pengadaan Mebelair siswa SD 2 Sp. Teritip (Dusun II Desa Pelangas, Kab. Bangka Barat) (56 Set)					Desa Pelangas				84.000.000,00			Renja
					Pengadaan Mebelair siswa SD 17 SIMPANG TERITIP (Dusun Rumpis Desa Berang, Kab. Bangka Barat) (33 Set)					Desa Berang				49.500.000,00			Renja
					Pengadaan Mebelair siswa Dusun Bubung Tujuh dan Dusun Sangku (SDN 12 Tempilang (20 set), SDN 15 Tempilang (20 set)), Kab. Bangka Barat					Desa Sangku				60.000.000,00			Renja
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 7 Kelapa							30 Set		45.000.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 6 Parittiga							30 Set		45.000.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 9 Parittiga							36 Set		54.000.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 16 Parittiga							50 Set		75.000.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 4 Mentok							33 Paket		49.500.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 18 Mentok							35 Set		52.500.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 1 Simpang Teritip							100 Set		150.000.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 2 Simpang Teritip							25 Set		37.500.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 10 Simpang Teritip							85 Set		127.500.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SD Negeri 9 Simpang Teritip							66 Paket		100.000.000,00			Musren Kec dan Reses
					Pengadaan Meja Kursi Guru SD Negeri 6 Parittiga							7 Set		19.950.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Guru SD Negeri 16 Parittiga							2 Set		5.700.000,00			Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Guru SD Negeri 10 Simpang Teritip							6 Set		17.100.000,00			Musren Kec
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	9000 Unit	9000 Paket	315.000.000,00	315.000.000,00		APBD
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	160.000.000,00	160.000.000,00		APBD
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	255 Peserta Didik	253.500.000,00	253.500.000,00		APBD
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	370 Orang	346 Orang	7.993.600.000,00	7.464.400.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	71 orang	71 orang	355.000.000,00	29.600.000,00		APBD
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	510.000.000,00	65.936.970,00		APBD
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		1 Ruang		25.132.000,00		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	136 Satuan Pendidikan	23.852.940.000,00	23.496.080.000,00		APBD
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Orang	136 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00		APBD
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80,85%	80,85%	17.162.150.000,00	16.008.109.500,00		
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1 Ruang		5.324.000,00		
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1 Ruang		9.498.500,00		
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Ruang	400.000.000,00	400.000.000,00		
					Pembangunan Aula SMP Negeri 1 Parittiga							1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00		Musren
					Pembangunan Aula SMP Negeri 3 Parittiga							1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00		Musren
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Unit	2 Unit	1.800.000.000,00	600.000.000,00		
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					SMP 4 Simpangteritip	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	300.000.000,00	300.000.000,00		Renja
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	308.700.000,00	308.700.000,00		
					Pengadaan Mebelair siswa SMP NEGERI 2 Muntok					Kelurahan Keranggan		30 set	30 set	45.000.000,00	45.000.000,00		Renja
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 4 Parittiga							36 Set	36 Set	54.000.000,00	54.000.000,00		Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 2 Parittiga							40 Set	40 Set	60.000.000,00	60.000.000,00		Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 5 Mentok							35 Set	35 Set	52.500.000,00	52.500.000,00		Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Siswa SMP Negeri 1 Simpang Teritip							50 Set	50 Set	75.000.000,00	75.000.000,00		Musren Kec
					Pengadaan Meja Kursi Guru SMP Negeri 1 Simpang Teritip							5 Set	5 Set	14.250.000,00	14.250.000,00		Musren Kec
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2.800 Paket	2.800 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	1 unit	300.000,00	51.287.000,00		APBD
1	01	02	2.02	032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	200.000.000,00	200.000.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.640 Peserta Didik	1.640 Peserta Didik	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	193 Peserta Didik	193 Peserta Didik	253.500.000,00	253.500.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	155 Orang	138 Orang	3.287.000.000,00	2.907.600.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	22 orang	22 orang	130.000.000,00	1.600.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	209.000.000,00	83.300.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	10.094.000.000,00	10.473.400.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	34 Orang	29.650.000,00	29.650.000,00		APBD
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		4 Paket		234.250.000,00		DAK Fisik
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90,25%	90,25%	9.281.600.000,00	10.200.546.530,00		
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00		
					Pembangunan Area Bermain PAUD Sari Pati Desa Tuik												Renja
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					TK Negeri Pembina Jebus , Kab. Bangka Barat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	40.000.000,00	39.718.000,00		
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					TK Negeri Pembina di Kelapa , Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	1 unit	65.000.000,00	87.433.000,00		
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 paket	2 paket	36.000.000,00	95.820.000,00		
					Pengadaan Mebelair siswa PAUD (TK SATAP SDN 4 Kelapa, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa : 15 set)					Desa Pusuk							Renja
					Pengadaan Mebelair siswa PAUD (TK SATAP SDN 5 Simpang Teritip, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip : 15 set)					Desa Berang							Renja
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	600 Paket	Paket	28.800.000,00	0,00		APBD
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	574 orang	486 orang	4.478.800.000,00	2.599.200.000,00		APBD
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	37 orang	orang	205.000.000,00	0,00		APBD
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	305.000.000,00	278.461.810,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	3.988.000.000,00	5.817.080.000,00		APBD
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		1 Ruang		178.142.090,00		
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 Ruang		561.796.630,00		
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		8 Paket		407.895.000,00		DAK Fisik
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4,95%	4,95%	7.201.780.000,00	7.229.960.000,00		
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	439 Peserta Didik	439 Peserta Didik	10.300.000,00	10.300.000,00		APBD
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.003 orang	1.003 orang	6.208.000.000,00	6.208.000.000,00		APBD
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan						Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	16.500.000,00	16.500.000,00		APBD
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	966.980.000,00	995.160.000,00		APBD
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,5		Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	71,25%	71,25%	37.150.000,00	37.150.000,00	PN 4	
								Harapan Lama Sekolah	11,81								
								Persentase Sekolah Terakreditasi A	25,95%								
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik	71,25%	71,25%	37.150.000,00	37.150.000,00		
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	1 Dokumen	37.150.000,00	37.150.000,00		APBD
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,5		Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	65%	65%	50.000.000,00	50.000.000,00	PN 4	
								Harapan Lama Sekolah	11,81								
								Persentase Sekolah Terakreditasi A	25,95%								
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	35 sekolah	35 sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00		
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									198.056.586.917,50	319.184.617.317,52		
1	02				DINAS KESEHATAN									198.056.586.917,50	319.184.617.317,52		
					DINAS									139.253.786.917,50	220.963.382.020,50		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	89.382.930.017,50	97.212.171.767,50	PN 7	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	750.000,00		
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	84.863.163.517,50	93.231.113.517,50		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	742 Orang/bulan	84.862.263.517,50	93.230.663.517,50		
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	228.350.000,00	2.100.000,00		
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	154.350.000,00	0,00		
1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	4.000.000,00	2.050.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	17.500.000,00	50.000,00		
1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	0 orang	52.500.000,00	0,00		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	514.056.500,00	321.885.250,00		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000,00	3.000.000,00		
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket		10.000.000,00	0,00		
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000,00	5.000.000,00		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	80.600.000,00	65.500.000,00		
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000,00	25.000.000,00		
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00		
1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	65.000.000,00	74.607.000,00		
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	288.956.500,00	144.478.250,00		
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	2.500.000,00	1.300.000,00		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	30.000.000,00	568.000,00		
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit		568.000,00		
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit		10.000.000,00	0,00		
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		10.000.000,00	0,00		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	3.449.680.000,00	3.445.930.000,00		
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	145.000.000,00	145.000.000,00		
1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	3.295.680.000,00	3.296.430.000,00		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	295.880.000,00	209.675.000,00		
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	25 unit	229.040.000,00	156.845.000,00		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	8 unit	40.000.000,00	29.650.000,00		
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	44 unit	44 unit	26.840.000,00	23.180.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	44.955.571.300,00	120.174.277.653,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	72 Persen	7.820.320.000,00	73.373.293.267,00		
											Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	72 Persen				
											Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen	72 Persen				
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 unit	1 unit	2.000.000.000,00	2.696.430.484,00		
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		1 unit		18.797.620.000,00		DAK Fisik
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		9 Unit		42.900.564.000,00		DAK Fisik
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	4 Unit	4 Unit	860.000.000,00	220.000.000,00		APBD dan Reses
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 unit	4 unit	803.320.000,00	200.000.000,00		APBD dan Reses
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	0 unit	200.000.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	20 unit	0 unit	350.000.000,00	0,00		
1	02	02	2,01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai	250 unit	250 unit	100.000.000,00	352.991.500,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 paket	3 paket	3.500.000.000,00	8.086.546.783,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,01	0023	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga	5625 keluarga	0 keluarga	6.700.000,00	0,00		
1	02	02	2,01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 paket	1 paket	300.000,00	119.140.500,00		
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	100 Persen	37.130.551.300,00	46.788.344.278,00		
											Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 Persen	100 Persen				
											Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen	100 Persen				
											Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen	100 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
											Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	100 Persen	100 Persen				
											Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	100 Persen	100 Persen				
											Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	100 Persen				
											Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98340 Jiwa	98340 Jiwa				
											Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100 Persen	100 Persen				
											Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai	100 Persen	100 Persen				
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.293 orang	4.293 orang	133.383.000,00	120.540.000,00		
1	02	02	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.049 orang	4.049 orang	10.788.500,00	64.098.000,00		
1	02	02	2,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.022 orang	4.022 orang	11.493.500,00	4.744.300,00		
1	02	02	2,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.934 orang	17.934 orang	90.127.500,00	1.783.500,00		
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45.419 orang	45.419 orang	800.000.000,00	320.748.100,00		
1	02	02	2,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	138.660 orang	138.660 orang	75.195.000,00	15.989.000,00		
1	02	02	2,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21.128 orang	21.128 orang	78.320.000,00	74.420.000,00		
1	02	02	2,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48.523 orang	48.523 orang	23.050.000,00	9.619.000,00		
1	02	02	2,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.968 orang	3.968 orang	26.950.000,00	6.504.000,00		
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	503 orang	503 orang	67.410.000,00	43.534.000,00		
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3520 orang	3520 orang	429.125.000,00	429.125.000,00		
1	02	02	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	500 orang	500 orang	85.280.000,00	8.920.000,00		
1	02	02	2,02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 dokumen	1 dokumen	520.000,00	1.034.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1.624.250.000,00	757.484.000,00		
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 dokumen	2 dokumen	3.835.000,00	17.135.000,00		
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	30.030.000,00	9.060.000,00		
1	02	02	2,02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	8.450.000,00	183.437.400,00		
1	02	02	2,02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,Akupunktur,Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1 dokumen	0 dokumen	6.160.000,00	0,00		
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	47.220.000,00	105.010.000,00		
1	02	02	2,02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	orang				
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 dokumen	2 dokumen	293.355.000,00	558.325.270,00		
1	02	02	2,02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	32.202.909.800,00	42.695.161.966,00		
1	02	02	2,02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 Paket		3.080.000,00		
1	02	02	2,02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 dokumen	1 dokumen	11.900.000,00	300.000,00		
1	02	02	2,02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen	327.440.000,00	437.401.342,00		
1	02	02	2,02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	8 unit	0 unit	300.000,00	0,00		
1	02	02	2,02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						Jumlah public safety center (psc 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (spgdt)	1 unit	0 unit	150.000.000,00	0,00		
1	02	02	2,02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	652 orang	652 orang	87.220.000,00	143.436.400,00		
1	02	02	2,02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	60 Orang	48.680.000,00	48.680.000,00		
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5.000 orang	5.000 orang	353.000.000,00	392.950.000,00		
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 dokumen	0 dokumen	73.959.000,00	0,00		
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 dokumen	1 dokumen	30.200.000,00	335.824.000,00		
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas	90 Persen	90 Persen	300.000,00	10.168.108,00		
1	02	02	2,03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	10.168.108,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	100 Persen	100 Persen	4.400.000,00	2.472.000,00		
1	02	02	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	18 unit	0 unit	0,00	0,00		
1	02	02	2,04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	15 unit	15 unit	2.000.000,00	2.172.000,00		
1	02	02	2,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (inm) pelayanan kesehatan	8 unit	8 unit	2.400.000,00	300.000,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	4.612.975.600,00	2.909.088.600,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	75%	75%				
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	1 Buku	4.462.975.600,00	2.430.445.600,00		
1	02	03	2,02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	93 orang	93 orang	4.446.975.600,00	2.430.445.600,00		
1	02	03	2,02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	16.000.000,00	0,00		
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan tehnik kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	91 Persen	91 Persen	150.000.000,00	478.643.000,00		
1	02	03	2,03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	50 orang	50 orang	150.000.000,00	478.643.000,00		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	88%	88%	2.720.000,00	442.619.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										73.172.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	04	2,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		1 Dokumen		73.172.000,00		
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										156.964.000,00		
1	02	04	2,03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		1 Dokumen		156.964.000,00		
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Persentase hasil permintaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	2.720.000,00	170.000,00		
1	02	04	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	1 dokumen	2.720.000,00	170.000,00		
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										212.313.000,00		
1	02	04	2,06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						Jumlah Produk dan Sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		1 unit		212.313.000,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	55%	55%	299.590.000,00	225.225.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah rumah tangga yang ber PHBS	5201 RT	5201 RT	50.000.000,00	6.000.000,00		
1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	6.000.000,00		
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rata-rata capaian indikator PHBS	42 Persen	Persen	50.000.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	05	2,02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	dokumen	50.000.000,00	0,00		
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	65 Persen	65 Persen	199.590.000,00	219.225.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen	199.590.000,00	219.225.000,00		
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJIRAN SETASON									43.266.800.000,00	73.497.840.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	22.500.000.000,00	28.000.000.000,00	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									22.500.000.000,00	28.000.000.000,00		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	12 bulan unit kerja	22.500.000.000,00	28.000.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Indeks kepuasan layanan Puskesmas	80,5 Angka	80,5 Angka	20.766.800.000,00	45.497.840.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Indeks kepuasan layanan rumah sakit	78 Angka	78 Angka				
											Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93 Persen	93 Persen				
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									8.600.000.000,00	32.627.000.000,00		
1	02	02	2,01	0014	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 unit	7 unit	1.600.000.000,00	21.144.509.400,00		DAK Fisik
1	02	02	2,01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 unit	unit	1.000.000.000,00	0,00		
1	02	02	2,01	0022	Pengembangan Rumah Sakit						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	1 unit	6.000.000.000,00	11.482.490.600,00		DAK Fisik
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									12.166.800.000,00	12.870.840.000,00		
1	02	02	2,02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 dokumen	1 dokumen	12.166.800.000,00	12.870.840.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Mentok									2.450.000.000,00	3.804.806.630,09		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.450.000.000,00	2.771.869.630,09	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									2.450.000.000,00	2.771.869.630,09		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	2.450.000.000,00	2.771.869.630,09		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	0,00	1.029.117.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									0,00	1.029.117.000,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		64.800.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		34.860.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		18.720.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		53.160.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		168.600.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		360.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		10.080.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		42.240.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		14.400.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		133.221.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen		403.956.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		2.700.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		2.400.000,00		DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		75.840.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		3.820.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		3.820.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		3.820.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus									2.000.000.000,00	2.910.520.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.600.000.000,00	1.640.000.000,00	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									1.600.000.000,00	1.640.000.000,00		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1.600.000.000,00	1.640.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	400.000.000,00	1.266.700.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									400.000.000,00	1.266.700.000,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		50.700.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		22.140.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		7.200.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		3.600.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		166.770.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		9.840.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		25.800.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		12.960.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		59.940.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	400.000.000,00	854.050.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		1.980.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		840.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		46.800.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		3.820.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		3.820.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		3.820.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput									960.000.000,00	1.765.380.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	870.000.000,00	1.015.000.000,00	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									870.000.000,00	1.015.000.000,00		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	870.000.000,00	1.015.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	90.000.000,00	746.560.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									90.000.000,00	746.560.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		331 Orang		38.220.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		4497 Orang		14.580.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		55 Orang		7.200.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		360 Orang		21.720.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		108.460.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		8.160.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		25.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		4.560.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		56.580.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	90.000.000,00	429.060.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		720.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		25.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		3.820.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		3.820.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		3.820.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa									2.550.000.000,00	4.282.779.073,82		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.550.000.000,00	3.035.300.925,82	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									2.550.000.000,00	3.035.300.925,82		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	2.550.000.000,00	3.035.300.925,82		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	0,00	1.243.058.148,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									0,00	1.243.058.148,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		63.180.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		37.080.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		10.800.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		9.960.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		383.916.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		10.560.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		26.040.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		16.080.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		57.960.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	0,00	538.562.148,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		2.520.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		720.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		81.600.000,00		DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		4.420.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		4.420.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		4.420.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang									2.540.000.000,00	3.663.070.939,91		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.940.000.000,00	2.393.655.939,91	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									1.940.000.000,00	2.393.655.939,91		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1.940.000.000,00	2.393.655.939,91		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	600.000.000,00	1.265.595.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									600.000.000,00	1.265.595.000,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		49.680.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		25.200.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		20.160.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		17.280.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		131.980.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		22.680.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		17.040.000,00		DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		13.920.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		85.920.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	600.000.000,00	823.775.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		600.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		53.280.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		3.820.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		3.820.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		3.820.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simpangteritip									1.794.000.000,00	3.060.975.000,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	1.544.000.000,00	1.723.045.000,00	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									1.544.000.000,00	1.723.045.000,00		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1.544.000.000,00	1.723.045.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	250.000.000,00	1.333.510.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									250.000.000,00	1.333.510.000,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		35.100.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		26.220.000,00		DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		12.240.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		19.080.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		238.070.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		9.960.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		17.040.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		12.480.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		57.660.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	250.000.000,00	860.240.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		1.800.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		37.200.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		4.420.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		4.420.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		4.420.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru									2.350.000.000,00	3.451.180.748,20		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.150.000.000,00	2.450.766.748,20	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									2.150.000.000,00	2.450.766.748,20		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	2.150.000.000,00	2.450.766.748,20		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	200.000.000,00	996.594.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									200.000.000,00	996.594.000,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		29.040.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		13.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		3.600.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		7.680.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		97.194.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		20.400.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		18.000.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		5.760.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		28.740.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	200.000.000,00	749.160.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		1.260.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		720.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		17.520.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		3.820.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		3.820.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		3.820.000,00		DAK Non Fisik
					Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundi									892.000.000,00	1.784.682.905,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	696.000.000,00	860.000.000,00	PN 7	
1	02	01	2,10		Peningkatan Pelayanan BLUD									696.000.000,00	860.000.000,00		
1	02	01	2,10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	696.000.000,00	860.000.000,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	97%	97%	196.000.000,00	920.862.905,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81,5	81,5				
											Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	80	80				
											Persentase baduta stunting	8%	8%				
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									196.000.000,00	920.862.905,00		
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		25.920.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang		11.940.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Orang		4.320.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		Orang		5.880.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1 dokumen		154.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga		1 dokumen		300.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1 dokumen		8.520.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan		1 dokumen		7.560.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Orang		7.200.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		1 dokumen		37.560.000,00		DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	02	02	2,02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1 dokumen	196.000.000,00	633.142.905,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Orang		720.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1 dokumen		2.340.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1 dokumen		1.200.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		1 dokumen		1.440.000,00		DAK Non Fisik
1	02	02	2,02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		1 dokumen		18.480.000,00		DAK Non Fisik
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS		55%		3.820.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif		65 Persen		3.820.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		3.820.000,00		DAK Non Fisik
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									116.111.870.000,00	66.988.155.158,65		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									116.111.870.000,00	66.988.155.158,65		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	10.299.360.000,00	9.766.611.800,00	PN 7	
1	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	680.000,00		
1	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	140.000,00		
1	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	03	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	100.000,00		
1	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		
1	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	140.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.500.900.000,00	6.863.040.000,00		
1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 OB	39 OB	4.500.000.000,00	6.862.600.000,00		
1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	180.000,00		
1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	120.000,00		
1	03	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	140.000,00		
1	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	100.000,00		
1	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	100.000,00		
1	03	01	2,04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	100.000,00		
1	03	01	2,04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	100.000,00		
1	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	132.750.000,00	140.000,00		
1	03	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 paket	103.200.000,00	0,00		
1	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	140.000,00		
1	03	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 orang	0 orang	19.500.000,00	0,00		
1	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39 orang	0 orang	9.750.000,00	0,00		
1	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	702.300.000,00	327.518.000,00		
1	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00		
1	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	40.000.000,00	0,00		
1	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.930.000,00		
1	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	39.215.000,00		
1	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	29.050.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	50 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		
1	03	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	37.353.000,00		
1	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	209.330.000,00		
1	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	140.000,00		
1	03	01	2,08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	2.000.000.000,00	0,00		
1	03	01	2,08	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit				
1	03	01	2,08	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	2.000.000.000,00	0,00		
1	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	2.389.940.000,00	2.380.255.000,00		
1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00		
1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00		
1	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00		
1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.164.940.000,00	2.155.255.000,00		
1	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	571.370.000,00	194.778.800,00		
1	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	368.320.000,00	112.628.000,00		
1	03	01	2,09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 unit	5 unit	185.550.000,00	64.650.800,00		
1	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	17.500.000,00	17.500.000,00		
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	50%	50%	2.686.000.000,00	1.357.187.950,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
						Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase titik banjir yang dimitigasi	62%	62%	2.265.000.000,00	303.694.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi	3	3	2.686.000.000,00	1.357.187.950,00		
1	03	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00		
1	03	02	2,01	0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0 KM	0,07 KM	928.000.000,00	15.060.000,00		
					Pembayaran Hutang 2024 Pembangunan Talud Pantai Batu Berani - Muntok										8.505.000,00		Bayar Hutang 2024
					Pembayaran Hutang 2024 Pembangunan Talud Air Bakong Desa Terentang										6.555.000,00		Bayar Hutang 2025
1	03	02	2,01	0093	Normalisasi/Restorasi Pemeliharaan Sungai						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3,5 KM	3,5 KM	1.558.000.000,00	1.104.327.950,00		
					- Normalisasi Sungai Ciulong Kec. Mentok					Kecamatan Mentok		1 KM	1,0 KM	200.000.000,00	200.000.000,00		
					- Normalisasi Sungai di Desa Sinar Manik					Kecamatan Jebus		1 KM	2 KM	200.000.000,00	200.000.000,00		
					- Normalisasi Sungai di Desa Puput berbatasan dengan Desa Sekar Biru					Kecamatan Parittiga		0,5 KM	0,15 KM	1.100.000.000,00	658.647.950,00		Musren Kec
					- Pembuatan talud aliran sungai jalan menara air					Kecamatan Mentok		30 M	0,015 KM	40.000.000,00	40.000.000,00		RESES
					Pembayaran Hutang 2024 Pembangunan Talud Samping Rumah Mang Uyan Kampung Senang Hati, Sungai Daeng										5.680.000,00		
1	03	02	2,01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam						Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	37.800.000,00		
					Pemeliharaan Check Dam Ciulong					Kecamatan Mentok		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	36.000.000,00		
					Pembayaran Hutang 2024 Belanja Modal Alat Pembersih								1 Unit		1.800.000,00		
1	03	02	2,01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					Kab. Bangka Barat, Parittiga, Kelabat	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,4 Km	0,018 Km	100.000.000,00	200.000.000,00		
					- Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Penanggulungan Bencana Alam Talud Batu Berani Kecamatan Mentok								0,018 Km		200.000.000,00		
					- perbaikan talud balembang					Kecamatan Parittiga		10 M		100.000.000,00	0,00		RESES
1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	62,43%	62,43%	2.265.000.000,00	303.694.000,00		
1	03	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang						
1	03	02	2,02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,022 KM	0 KM	1.265.000.000,00	0,00		
1	03	02	2,02	0000	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa						Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	03	02	2,02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan				0,00		
1	03	02	2,02	0000	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa						Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan				0,00		
1	03	02	2,02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	2 KM	0,08 KM	600.000.000,00	103.754.000,00		
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tebing Bulin					Kecamatan Kelapa	0.5 KM	0,08 KM	600.000.000,00	103.754.000,00			
1	03	02	2,02	0000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa						Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang direhabilitasi	2,22 KM					
1	03	02	2,02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	1 KM	400.000.000,00	199.940.000,00		
					Pembersihan/ pengerukan/ Normalisasi saluran Daerah Irigasi Buyan Kelumbi					Kecamatan Tempilang	1 KM	1 KM	200.000.000,00	199.940.000,00			
1	03	02	2,02	0000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara						
1	03	02	2,02	0000	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi						Panjang bendung irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara						
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	84,09%	84,09%	1.280.000.000,00	1.017.040.900,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
1	03	06	02		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						panjang drainase kondisi baik	1600 meter	1600 meter	1.280.000.000,00	1.017.040.900,00		
1	03	06	02	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1300 meter	1 Dokumen	1.000.000.000,00	737.040.900,00		
1	03	06	02	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					Kecamatan Parittiga dan Kecamatan Mentok	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	300 meter	1 Sistem Drainase Perkotaan	280.000.000,00	280.000.000,00		
					- normalisasi saluran jl. pasar desa puput					Parittiga		1 Km	1 Km	80.000.000,00	80.000.000,00		RESES
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	82,97%	82,97%	79.691.320.000,00	31.627.238.723,65	PN 3	
								Indeks Bangunan Gedung	Baik		Persentase jembatan dalam kondisi baik	96,28%	96,28%				
1	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	82,97%	82,97%	79.691.320.000,00	31.627.238.723,65		
											Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	96,28%	96,28%				
1	03	10	2,01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000,00	1.308.426.000,00		
					Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan Kabupaten Bangka Barat					Kab. Bangka Barat	1 dokumen			500.000.000,00	350.000.000,00		
					Penyusunan DED Jalan Pendukung Tematik					Kab. Bangka Barat	1 dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00		
					Pelaksanaan Tata Batas Ruas Jalan Air Limau-Tanjung Ular (Gagal Bayar 2024)										650.399.000,00		
					DED Jembatan Kawasan Strategis (Gagal Bayar 2024)											4.279.000,00	
					Perencanaan Perservasi Jembatan (Gagal Bayar 2024)											3.748.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Ganti Rugi Nilai Tegakan Jalan Air Limau - Tanjung Ular										200.000.000,00		
1	03	10	2,01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	26.472 KM	26.472 KM	500.000.000,00	0,00		
1	03	10	2,01	0032	Pembangunan Jalan						Panjang Jalan yang Dibangun	1.001 KM	1,2 KM	1.200.000.000,00	1.608.323.608,00		
					- pembangunan jalan Gang Tajwid kampung menjelang					Kec. Mentok	200 M	0,2 KM		120.000.000,00	120.000.000,00		RESES
					- pembangunan jalan tembus Gang nurshoba					Mentok	700 M			420.000.000,00	61.792.000,00		RESES
					- Pembangunan Jalan Menuju TPST Jebus								1 KM		700.000.000,00		
					- Pembangunan Jalan Menuju Pelabuhan Roro Bakit										726.531.608,00		
1	03	10	2,01	0033	Rekonstruksi Jalan						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10,002 KM	0,3 KM	23.226.000.000,00	8.352.558.895,00		
					- Peningkatan Jalan Air Limau - Tanjung Ular					Kec. Mentok	0,5 KM			1.000.000.000,00			
					- Rekonstruksi Jalan Simpang Bulin - Petar					Kec. Kelapa; Kec. Jebus	0 KM						APBN
					- Peningkatan Jalan Ganjan - Pangkal Perahu					Kec. Kelapa	0 KM						
					- Peningkatan Jalan Tugang - Air Nyatoh					Kec. Kelapa; Kec. Simpang Teritip	0 KM						DBH 2024
					- Peningkatan Jalan Lingkar Pusuk					Kec. Kelapa	1 KM			2.000.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan Air Nangka					Kec. Tempilang							
					- Peningkatan Jalan Alhidayah - Parit 10					Kec. Tempilang	1,1 KM			3.000.000.000,00			DBH
					- Rekonstruksi Jalan Kelumbi - Simpang Kelumbi					Kec. Tempilang	0 KM			0,00			
					- Peningkatan Jalan Sp. Langgem - Langgem					Kec. Tempilang	0,5 KM			1.500.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan Rebak - Air Ibul					Kec. Simpang Teritip	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan Ibul - Peradong					Kec. Simpang Teritip	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Rekonstruksi Jalan Rajek - Belar					Kec. Simpang Teritip	0,28 KM			812.000.000,00			
					- Rekonstruksi Jalan Simpang Tiga - Rumpis					Kec. Simpang Teritip	0,2 KM			0,00			
					- Rekonstruksi Jalan Simpang Johar - Ranggal					Kec. Jebus				0,00			
					- Rekonstruksi Jalan Simpang SMPN 1 Jebus - Air Kuang					Kec. Jebus	0,40 KM			0,00			
					- Peningkatan Jalan Rukam - Pancur					Kec. Jebus	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan BMI					Kec. Parittiga	0,16 KM			464.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan Sungai Lalang					Kec. Parittiga	0,294 KM			0,00			
					- Peningkatan Jalan Hilarius					Kec. Parittiga							
					- Peningkatan Jalan Aik Kemang					Kec. Mentok	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan Jend. Sudirman					Kec. Mentok	0,512 KM						
					- Rekonstruksi Jalan Tembelok					Kec. Mentok	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Peningkatan Jalan PAUD RT.04 Desa Air Nyatoh					Kec. Simpang Teritip	0,100 KM			300.000.000,00			Musren Kec
					- Peningkatan Jalan Desa Peradong Dusun I RT.01					Kec. Simpang Teritip	0,100 KM			300.000.000,00			Musren Kec
					- Peningkatan Jalan Desa Penyampak					Kec. Tempilang	0,090 KM			245.000.000,00			Musren Kec
					- pengaspalan Gang Lapang Bola Desa Tumbak Petar					Jebus	250 M	0,025 KM		87.500.000,00	87.500.000,00		RESES
					- pengaspalan jalan Gang Muhaimin Desa tumbak Petar					Jebus	200 M			70.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan mustari keranggan					Mentok	300 M			105.000.000,00			RESES
					- Lanjutan peningkatan jalan lintas timur desa Sinar Sari					Kec. Kelapa	100 M	0,1 Km		300.000.000,00	300.000.000,00		RESES
					- peningkatan jalan aek play desa sinar sari					Kelapa	100 M	0,1 KM		287.500.000,00	287.500.000,00		RESES
					- peningkatan jalan seberang sungai tanjung ular					Mentok	200 M			600.000.000,00			RESES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- Peningkatan Jalan Damai Kelurahan Menjelang					Mentok		100 M		350.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan lingk ar timur Kundi					Simpang Teritip		300 M		1.000.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan aspal dusun juru desa dendang					Kelapa		50 M		150.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan dari RT 01 sampai RT 02 atau jalan SD					Kelapa		100 M		300.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan lingk ar RT 01 ke RT 07 Desa kacung					Kelapa		70 M		200.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan lingk ar puru kelurahan kelapa					Kelapa		100 M		275.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan raya kantor pos Desa Puput					Parittiga		100 M	0,1 KM	350.000.000,00	350.000.000,00		RESES
					- peningkatan jalan air kelubi desa air belo					Mentok		700 M		2.000.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan kuburan destiwisata desa kolong cepakek					Mentok		50 M		150.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan gang warnapura Keranggan					Mentok		50 M		105.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan rebak- air ibul Belo Laut					Mentok		70 M		200.000.000,00			RESES
					- Peningkatan Jalan Masuk Sekolah SDN 18 Parittiga Desa Teluk Limau					Parittiga		100 M		175.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan air sian,punggur ke pacing desa ranggi asam					Jebus		600 M		300.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan puru di dusun II Air Mas Desa Air Limau					Mentok		70 M		200.000.000,00			RESES
					- Peningkatan jalan pondok pesantren Darul Khoirot, pangkalan beras Desa Kacung					Kelapa		400 M		1.400.000.000,00			RESES
					[#] Rekonstruksi Jalan Tugang - Air Nyatoh (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										931.496.345,00		
					[#] Peningkatan Jalan Desa Simpang Tiga Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										195.275.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Desa Air Menduyung (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										609.800.900,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Desa Berang (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										196.208.800,00		
					[#] Peningkatan Jalan Rebak - Air Ibul (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										1.043.189.140,00		
					[#] Peningkatan Jalan Siliwangi RT. 17 Desa Cupat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										248.307.260,00		
					[#] Peningkatan Jalan Tanjung Siangau (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										690.411.200,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					[#] Peningkatan Jalan Desa Beruas Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										196.198.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Timor Desa Air Nyatoh (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										520.551.110,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Paud Melati Dusun Rajek Desa Berang (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										414.615.820,00		
					[#] Rekonstruksi jalan lingk. RT. 08 Dusun Perumnas Desa Sekar Biru (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										253.191.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Rambat - Air Mas (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										833.546.820,00		
					[#] Peningkatan Jalan Dusun Petar Desa Tumbak Petar (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.926.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Tower, Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										4.010.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Kebun Bukit Lintang (Bukit Manik) Desa Puput (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.913.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Dusun Tumbak Desa Tumbak Petar Kec. Jebus (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.963.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Jompong (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.952.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Desa Telak, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										4.005.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Kebun Kelompok Kelurahan Kelapa (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.978.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Mak Bunge Desa Air Belo (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.903.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					[#] Rekonstruksi Jalan Raflesia Kelurahan Menjelang (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										3.892.000,00		
					[#] Penanganan Long Segment Jalan Teluk Rubiah (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										4.974.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Cik Idris, Gang Paud, Gang Gotong Royong Desa Air Belo (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										3.911.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Masjid Kelurahan Sungai Daeng (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										3.918.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan TPA Hidayatul Islam Dusun Kemang Masam Desa Air Putih (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										3.998.500,00		
					[#] Peningkatan Jalan Setia RT.02 Rw.01 Kel. Menjelang, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										2.648.000,00		
					[#] Peningkatan Jalan Lingkar Dusun Unar Desa Pebuar (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat										4.013.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Parittiga - Paritempat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										402.008.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan Hilarius Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										181.372.000,00		
					[#] Rekonstruksi Jalan BMI Dusun Suntai Desa Air Gantang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										552.383.000,00		
1	03	10	2,01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8,389 KM	1 KM	31.990.000.000,00	10.926.730.413,65		
					- Pemeliharaan berkala jalan Khusus DBH Sawit					Kabupaten Bangka Barat							
					- Pemeliharaan berkala jalan Dendang - Baginda					Kec. Kelapa	0,39 KM			600.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala Jalan BBI Kelapa					Kec. Kelapa	0,165 KM			0,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Pusuk - Tuik					Kec. Kelapa	0,2 KM			560.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Beruas - Tuik					Kec. Kelapa	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala jalan Dalam Kota Kelapa (Jalan Begadang, Damai, Padat Karya)					Kec. Kelapa	0,25 KM			750.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala jalan Tempilang - Tanjung Niur					Kec. Tempilang	0,3 KM			1.000.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala jalan Penyampak - Tanjung nibung					Kec. Tempilang			1 Km		3.753.588.000,00		DBH
					- Pemeliharaan berkala jalan saing - sangku					Kec. Tempilang							DBH
					- Pemeliharaan berkala Jalan Mayang - Rambat					Kec. Simpang Teritip	0,5 KM			1.500.000.000,00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- Pemeliharaan berkala Jalan Peraceh - Belanak					Kec. Simpang Teritip		0,3 KM		1.000.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala jalan Simpang Gong - Tungau					Kec. Simpang Teritip		0,3 KM		1.000.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Rambat - Air Mas					Kec. Simpang Teritip		0,3 KM		800.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Jebus - Kampak					Kec. Jebus		0,3 KM		500.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Ketap - Simpang SMPN 1 Jebus					Kec. Jebus		0,18 KM		504.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Pala					Kec. Parittiga		0,27 KM		756.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala Jalan Rumah Sakit					Kec. Mentok		0,4 KM		1.200.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Pait - Pait Laut					Kec. Mentok		0,15 KM		420.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Pemda					Kec. Mentok		0,5 KM		1.400.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala jalan Mentok - Tanjung Ular					Kec. Mentok		0,3 KM		1.000.000.000,00			
					- Pemeliharaan Berkala Jalan Terabek - Sukal					Kec. Mentok							DBH
					- Pemeliharaan berkala Jalan Kadur Dalam					Kec. Mentok		0,5 KM		1.500.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala Jalan Basuki Rahmad					Kec. Mentok		0,14 KM		400.000.000,00			
					- Pemeliharaan berkala Jalan Lingkar SDLB					Kec. Mentok		0,2 KM		600.000.000,00			
					pemeliharaan berkala jalan saing - sangku							0,3 KM		1.000.000.000,00			
					pemeliharaan berkala jalan Penyampak - Tanjung nibung							2,4 KM		10.000.000.000,00			DBH
					Pemeliharaan Berkala Jalan Terabek - Sukal							0,3 KM		1.000.000.000,00			
					Pemeliharaan Berkala Jalan Kundi - Sukal							0,3 KM		1.000.000.000,00			
					Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Johar-Ranggi							0,3 KM		1.000.000.000,00			
					Pemeliharaan Berkala Jalan Parittiga - Penganak							1 KM		1.500.000.000,00			
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Bulin - Petar (Gagal Bayar 2024)										1.074.572.115,00		
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Parittiga-Pelawan (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										2.762.331.000,00		
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Pait - Pait Laut (Gagal Bayar 2024)										480.880.000,00		
					[#] Pembangunan Siring Dusun Tayu, Desa Ketap (Gagal Bayar 2024) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum										96.288.500,00		
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Sinar Kelabat (Gagal Bayar 2024)										344.641.660,00		
					[#] Pembangunan Siring Jalan Tembus Tikungan Tiga Dusun VII Desa Belo Laut (Gagal Bayar 2024)										226.381.108,65		
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Pala (Gagal Bayar 2024)										1.035.681.680,00		
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Pelangas - Kundi (Gagal Bayar 2024)										628.229.950,00		
					[#] Pembangunan Siring Desa Air Menduyung (Gagal Bayar 2024)										81.194.000,00		
					[#] Rehab Siring Jalan Koklong Teluk Rubiah Kel. Tanjung (Gagal Bayar 2024)										29.915.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					[#] Pembangunan Siring Dusun Lembu Kec. Simpang Teritip (Gagal Bayar 2024)										66.400.000,00		
					[#] Pembangunan Siring Jalan Desa Sungai Buluh (Gagal Bayar 2024)										108.638.000,00		
					[#] Rehab Siring Jalan Gang Sadar Rt.02 Rw.02 Kel. Tanjung (Gagal Bayar 2024)										26.919.500,00		
					[#] Pembangunan Siring Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat (Gagal Bayar 2024)										196.179.000,00		
					[#] Pemeliharaan Berkala Jalan Kacung - Pangkal Beras (Gagal Bayar 2024)										4.057.400,00		
					[#] Rehab Siring Jalan di Kelurahan Kelapa (Gagal Bayar 2024)										1.488.500,00		
					[#] Pembangunan Siring Dusun Belit (Gagal Bayar 2024)										3.220.000,00		
					[#] Pembangunan Siring Ruas Jalan Parittiga - Penganak Dusun Suntai Desa Air Gantang (Gagal Bayar 2024)										2.222.000,00		
					[#] Pembangunan Siring Jl. Culong Rt.002 Rw.003 (Gagal Bayar 2024)										3.903.000,00		
1	03	10	2,01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5 jembatan	5 jembatan	637.500.000,00	388.734.200,00		
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Bangka Barat										323.345.000,00		
					[#] Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Bangka Barat (Gagal Bayar 2024)										65.389.200,00		
1	03	10	2,01	0039	Rehabilitasi Jembatan						Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	2 jembatan	0 jembatan	680.000.000,00	0,00		
					Rehabilitasi Jembatan Air Menduyung (Simpang Tiga - Rumpis)					Kec. Simpang Teritip		1 Jembatan		180.000.000,00			
					Rehabilitasi Jembatan Air Sukal (Kundi - Sukal)					Kec. Simpang Teritip; Kec. Mentok		1 Jembatan		500.000.000,00			
1	03	10	2,01	0040	Pembangunan Jembatan						Panjang Jembatan yang Dibangun	4 jembatan	2 jembatan	5.455.920.000,00	2.039.487.850,00		
					Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Air Limau - Tanjung Ular					Kecamatan Mentok		2 jembatan		5.455.920.000,00			
					[#] Pembangunan Jembatan Air Nibung (Gagal Bayar 2024)										2.039.487.850,00		
1	03	10	2,01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	809.305 KM	809.305 KM	300.000.000,00	306.061.500,00		
					[#] Survei Kondisi Jalan										200.000.000,00		
					[#] Survei Kondisi Jembatan										100.000.000,00		
					[#] Survei Kondisi Jalan (Gagal Bayar 2024)										3.188.000,00		
					[#] Survei Kondisi Jembatan (Gagal Bayar 2024)										2.873.500,00		
1	03	10	2,01	0044	Rehabilitasi Jalan						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	16,787 KM	2,7 KM	11.101.900.000,00	2.597.081.028,00		
					- Rehabilitasi Jalan Rintis 3					Kec. Mentok		1,5 KM		800.000.000,00			
					- Rehabilitasi Jalan Air Samak					Kec. Mentok		0,8 KM	0,13 Km	400.000.000,00	400.000.000,00		
					- Rehabilitasi Jalan Kelumbi - Buyan					Kec. Tempilang		1,4 KM		700.000.000,00			
					- Rehabilitasi Jalan Tara Gunung - Pinangyang					Kec. Simpang Teritip		0,8 KM	0,8 Km	400.000.000,00	400.000.000,00		
					- Rehabilitasi Jalan Pangek - Tungau					Kec. Simpang Teritip		1,6 Km		0,00			
					- Rehabilitasi Jalan Mentibak					Kec. Simpang Teritip		1,2 KM	0,6 Km	600.000.000,00	346.581.028,00		
					- Rehabilitasi Jalan Kelekak Bukit					Kec. Simpang Teritip							
					- Rehabilitasi Jalan Unar - Bernbang					Kec. Jebus		1 KM		500.000.000,00			
					- Rehabilitasi Jalan Penganak - Jebu Laut					Kec. Parittiga		1,5 KM		750.000.000,00			
					- Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Bangun Jaya Desa Air Kuang					Kec. Jebus		0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Jebus - Kampak					Kec. Jebus		0,35 KM		210.000.000,00			Musren Kec

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- Pembangunan Drainase Jalan di Rt.07 Dusun Sepana Desa Beruas					Kec. Kelapa		0,38 KM		230.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Unar dan Dusun Pebuar Desa Pebuar					Kec. Jebus		0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Ganjan							0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Payak RT.11 Desa Air Bulin							0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Palem Kp. Sidorejo RT 002/RW 001							0,05 KM		35.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Setiabudi RT.08/RW.03 Desa Air Lintang					Kec. Tempilang		0,47 KM		280.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Telkom Dusun Tempilang II RT. 011 Desa Tempilang					Kec. Tempilang		0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Merabok RT.04/II Desa Benteng Kota					Kec. Tempilang		0,11 KM		70.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Mang Abot RT. 14 Kel. Kelapa					Kec. Kelapa		0,43 KM		260.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Basun RT. 003 Desa Sinar Surya					Kec. Tempilang				0,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Air Lintang - Basun Dusun Dam RT. 002 Desa Sinar Surya					Kec. Tempilang		0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan Vihara RT. 02 dan Jalan Bukit Lintang RT. 09 Desa Puput Kecamatan Parittiga					Kec. Parittiga		0,5 KM		300.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan di Desa Tanjung Niur RT.01-RT.03					Kec. Tempilang		0,25 KM		150.000.000,00			Musren Kec
					- Pembangunan Drainase Jalan di Dusun Sika Desa Tanjung Niur					Kec. Tempilang		0,25 KM		150.000.000,00			Musren Kec
					- Pembuatan siring dan pemasangan conblok jalan setapak samping rumah Bapak Seli gang Semot Rt 02 Kelurahan Kelapa					Kec. Kelapa		200 M	200 M	140.000.000,00	140.000.000,00		RESES
					- pembangunan siring di Gang Kelenteng Perumnas					Kec. Mentok		175 M		105.000.000,00			RESES
					- Pembangunan siring di gang bukit melintang perumnas					Kec. Mentok		400 M		280.000.000,00			RESES
					- pembangunan siring di kampung tegalrejo depan rumah yanto					Kec. Mentok		150 M	150 M	105.000.000,00	105.000.000,00		RESES
					- Pembangunan siring jalan Dusun Tanjung Punai Belo Laut					Mentok		100 M	100 M	70.000.000,00	70.000.000,00		RESES
					- pembangunan siring rumah Ozik desa Beruas					Kelapa		250 M	250 M	175.000.000,00	100.000.000,00		RESES
					- pembangunan siring dusun juru desa dendang					Kelapa		100 M	100 M	70.000.000,00	70.000.000,00		RESES
					- Pembangunan siring rumah boni Desa Dendang					Kelapa		300 M		200.000.000,00			RESES
					- pembangunan siring jalan desa rukam					Jebus		80 M	80 M	56.000.000,00	56.000.000,00		RESES
					- pembangunan siring jalan lingk kelapa					Kelapa		300 M	300 M	210.000.000,00	210.000.000,00		RESES
					- pembangunan siring baru di jalan vihara (depan rumah sumo) Desa Puput					Parittiga		35 M	35 M	24.500.000,00	24.500.000,00		RESES
					- pembangunan siring jalan RT.07 Depan kuten					Parittiga		100 M	100 M	140.000.000,00	140.000.000,00		RESES
					- pembangunan siring BPP desa air belo					Mentok		1 KM		700.000.000,00			RESES
					- Pembangunan siring simpang 3 lapangan chan Desa Puput					Parittiga		100 M		70.000.000,00			RESES
					- Bantuan gorong-gorong jalan BNI RT. 15 Desa Puput					Parittiga		2 M		1.400.000,00			RESES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- Perbaikan siring Rt 03 Sungai Baru					Mentok		150 M		105.000.000,00			RESES
					- Perbaikan siring Rt 01 Sungai Baru					Mentok		200 M		140.000.000,00			RESES
					- pembangunan siring jalan tembus tikungan tiga Jl. gang Siswa RT I Dusun VII Belo Laut					Mentok		100 M	100 M	35.000.000,00	85.000.000,00		RESES
					- rehab siring jalan gang siswa Dusun VII Belo Laut					Mentok		100 M		35.000.000,00			RESES
					- Pembangunan Siring SDN 13 Teluk Limau					Parittiga		200 M		140.000.000,00			RESES
					- Pembangunan Siring Pembangunan RT 10 Desa Teluk Limau					Parittiga		150 M		105.000.000,00			RESES
					- Pembangunan Siring RT 14 Dusun Pelawan Desa Teluk Limau					Parittiga		500 M	500 M	350.000.000,00	350.000.000,00		RESES
					- Pembangunan Siring RT 07 Dusun Pelawan Desa Teluk Limau					Parittiga		200 M		140.000.000,00			RESES
					- Rehab siring Rt 01 Kelurahan sungai baru					Mentok		100 M	100 M	70.000.000,00	100.000.000,00		RESES
1	03	10	2,01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan					Kabupaten Bangka Barat	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	40 KM	40 KM	4.000.000.000,00	4.099.835.229,00		
					[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Barat										3.507.845.000,00		
					[#] Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Bangka Barat (Gagal Bayar 2024)										591.990.229,00		
1	03	10	2,01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2 KM	KM				
1	03	10	2,01	0016	Penggantian Jembatan						Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1 jembatan	jembatan				
1	03	10	2,01	0022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	50 KM	KM				
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.141 Milyar Rupiah		persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	57,14%	42,86%	3.000.000.000,00	1.680.209.200,00	PN 5	
1	03	12	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						Jumlah RTRW dan RRTR yang sudah ditetapkan	4 Peraturan	4 Peraturan	550.000.000,00	241.475.000,00		
1	03	12	2,01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					Kecamatan Parittiga	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	400.000.000,00	203.025.000,00		
1	03	12	2,01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					Kecamatan Parittiga	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	38.450.000,00		
1	03	12	2,01	0013	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	30 orang	0 orang	50.000.000,00	0,00		
1	03	12	2,01	0000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRWKabupaten/Kota						Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	0,00	0,00		
1	03	12	2,02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun	2 Rancangan kebijakan	2 Rancangan kebijakan	1.850.000.000,00	1.138.524.200,00		
1	03	12	2,02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	1.350.000.000,00	1.138.524.200,00		
1	03	12	2,02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	500.000.000,00	0,00		
1	03	12	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Jenis data base pemanfaatan ruang	1 Jenis	1 Jenis	150.000.000,00	43.600.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000,00	43.600.000,00		
					Pelaksanaan PersetujuanKesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			0,00	0,00		
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Persentase objek ruang yang dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	100%	450.000.000,00	256.610.000,00		
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						Jumlah Dokumen KoordinasiPelaksanaan Penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	122.220.000,00		
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	134.390.000,00		
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	25,68%	25,68%	6.428.190.000,00	11.186.962.000,00	PN 4	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	5,52%		Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100%	100%	6.428.190.000,00	11.186.962.000,00		
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	60 orang	60 orang	25.000.000,00	27.500.000,00		
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00		
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Simpang Teritip, Air Menduyung , Simpang Tiga, Mayang, Pusuk, Terentang, Sangku, Teluk Limau	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	4 liter/detik	4 liter/detik	815.000.000,00	4.099.125.000,00		DAK Fisik-Reguler
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Lanjutan Tj. Ular	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	14 liter/ detik	0 liter/ detik	4.518.190.000,00	0,00		
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 unit	6 unit	250.000.000,00	314.382.000,00		
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Mentok dan Jebus	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR	150 SR	775.000.000,00	6.700.955.000,00		DAK Fisik-Tematik Kumuh
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	5,83%	5,83%	4.687.000.000,00	4.067.393.515,00	PN 4	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	5,52%		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100%	100%	4.687.000.000,00	4.067.393.515,00		
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 unit	1 unit	750.000.000,00	300.000.000,00		
1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1 unit	1 unit	300.000.000,00	300.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	03	05	2,01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	400 rumah tangga	400 rumah tangga	352.000.000,00	380.811.100,00		
1	03	05	2,01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 unit	1 unit	500.000.000,00	300.000.000,00		
1	03	05	2,01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 unit	5 unit	250.000.000,00	354.332.202,00		
1	03	05	2,01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	144 rumah tangga	144 rumah tangga	2.035.000.000,00	1.908.583.000,00		DAK Fisik - Tematik
					- pembangunan WC desa tumbak petar					Kec. Simpang Tertitip		5 RT		75.000.000,00			RESES
					- Pembangunan WC di Rt.08 Dusun Tegak Desa Benteng Kota					Tempilang		7 RT		105.000.000,00			RESES
					- Bantuan WC 5 unit di Desa Sangku					Tempilang		5 RT		75.000.000,00			RESES
					- bantuan pembangunan toilet (wc) ibu anya Desa Bakit					Parittiga		1 RT		15.000.000,00			RESES
					- pembangunan wc desa kelabat					Parittiga		4 RT		60.000.000,00			RESES
					- Pembangunan WC untuk masyarakat desa Belo laut					Mentok		2 RT		30.000.000,00			RESES
					- pembangunan wc individual Desa Rambat					Simpang Teritip		4 RT		60.000.000,00			RESES
					- Pembangunan jamban Dusun Jebu Darat Desa Kelabat					Parittiga		30 RT		450.000.000,00			RESES
					- Pembuatan Jamban Kampung Suka Mulya Desa Air Gantang					Parittiga		10 RT		150.000.000,00			RESES
					- pembangunan wc individual					Jebus dan Parittiga		1 RT		10.000.000,00			RESES
1	03	05	2,01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000,00	523.667.213,00		
1	03	05	2,01	0000	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	0	0	0,00	0,00		
1	03	05	2,01	0000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			0,00	0,00		
1	03	05	2,01	0000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun			0,00	0,00		
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tertangani	88%	88%	2.875.000.000,00	4.278.614.729,00	PN 3	
								Indeks Bangunan Gedung	Baik								
1	03	08	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani/Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan SLF	100%	100%	2.875.000.000,00	4.278.614.729,00		
1	03	08	2,01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	1 Orang	1 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00		
1	03	08	2,01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	33 bangunan gedung	bangunan gedung	175.000.000,00	44.697.629,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- OP Kawasan Spot Center										44.697.629,00		
					- Rehab bangunan Gedung kordik Kecamatan Kelapa					Kelapa		1 bangunan gedung		175.000.000,00			RESES
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00		
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1 bantuan teknis	1 bantuan teknis	100.000.000,00	102.450.000,00		
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	2.250.000.000,00	3.801.367.100,00		
					- Pembangunan Gedung Kelurahan Kelapa					Kelapa		1 dokumen		750.000.000,00	475.000.000,00		RESES
					- Pembangunan Gedung Olahraga Mini di Kecamatan Kelapa					Kelapa		1 Dokumen		500.000.000,00	500.000.000,00		RESES
					- Pembayaran Hutang Tahun 2024										2.826.367.100,00		
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	30 orang	orang	30.000.000,00			
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250 dokumen	250 dokumen	250.000.000,00	260.100.000,00		
1	03	08	2.01	0000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	0	0	0,00	0,00		
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan (TPA & TPST)	57,14%	57,14%	600.000.000,00	1.429.840.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota						Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi	57,14%	57,14%	600.000.000,00	1.429.840.000,00		
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0.204 ton/liter	0.204 ton/liter	500.000.000,00	1.409.840.000,00		DAK Fisik- Tematik
					DAK TPS3R										873.000.000,00		
					Penyusunan UKL/UPL TPST Jebus										100.000.000,00		
					Penyusunan DED TPST Jebus										200.000.000,00		
					Penyusunan Masterplan TPST Jebus										200.000.000,00		
					Administrasi Proyek										36.840.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS						Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi		1 unit		20.000.000,00		
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS						Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1 unit		100.000.000,00			
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	43,75%	43,75%	2.100.000.000,00	148.062.341,00	PN 3	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Bangunan Gedung	Baik		Jumlah Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani tahun n	100%	100%	2.100.000.000,00	148.062.341,00		
1	03	09	2.01	0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan						Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	7.050.000,00		
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 kawasan	0 kawasan	2.000.000.000,00	0,00		
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	141.012.341,00		
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	15,34%	15,34%	200.000.000,00	125.300.000,00		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Indeks Bangunan Gedung	Baik		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n	50 orang	50 orang	150.000.000,00	100.000.000,00		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 orang		150.000.000,00			
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		50 orang		100.000.000,00		
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 sistem informasi	1 sistem informasi	25.000.000,00	25.000.000,00		
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha						Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen		25.000.000,00			
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		1 Dokumen		25.000.000,00		
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						Jumlah kegiatan terlaksana	1 sistem informasi	1 sistem informasi	25.000.000,00	300.000,00		
1	03	11	2.04	0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	300.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									50.143.065.000,00	15.996.185.257,00		
					DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN									50.143.065.000,00	15.996.185.257,00		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	6.305.450.000,00	7.229.075.000,00	PN 7	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		APBD
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	3.700.900.000,00	5.097.050.000,00		APBD
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang / bulan	31 orang / bulan	3.700.000.000,00	5.096.600.000,00		APBD
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	238.000.000,00	237.920.000,00		APBD
1	04	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	238.000.000,00	237.920.000,00		APBD
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	96.050.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	80.250.000,00	0,00		APBD
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	0 Orang	7.750.000,00	0,00		APBD
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31Orang	0 Orang	7.750.000,00	0,00		APBD
1	04	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	442.900.000,00	211.450.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00		APBD
1	04	01	2.05	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.600.000,00	40.300.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	32.500.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	105.000.000,00		APBD
1	04	01	2.05	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20.000.000,00	0,00		
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit kendaraan Dinas atau Lapangan yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		
1	04	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar						Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan						
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						APBD
1	04	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						
1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00		APBD
1	04	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						APBD
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.753.290.000,00	1.638.060.000,00		APBD
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00		APBD
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.627.290.000,00	1.516.560.000,00		APBD
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	52.510.000,00	43.545.000,00		APBD
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		APBD
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	34.580.000,00	34.580.000,00		APBD
1	04	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Kab. Bangka Barat	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya						
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					Kab. Bangka Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		APBD
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 Unit	6 Unit	7.930.000,00	3.965.000,00		APBD
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			0,00	0,00		APBD
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase Rumah Akibat Bencana Alam / Sosial yang tertangani	100%	100%	540.000.000,00	659.359.800,00	PN 6	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terdata	6 Dokumen	6 Dokumen	165.000.000,00	264.100.800,00		APBD
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan - Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	139.100.800,00		APBD
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum Tertangani					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00		APBD
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00		APBD
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota						Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	13 Unit Rumah	13 Unit Rumah	350.000.000,00	378.759.000,00		APBD
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Kab. Bangka Barat	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	200.000.000,00	200.000.000,00		APBD
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana					Kab. Bangka Barat	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	150.000.000,00	178.759.000,00		APBD
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	100%	100%	25.000.000,00	16.500.000,00		APBD
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	16.500.000,00		APBD
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%	Kab. Bangka Barat	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	3,45%	3,45%	780.000.000,00	2.398.581.257,00	PN 6	APBD
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman						Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan			0,00	0,00		APBD
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			0,00	0,00		APBD
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha						Jumlah dokumen Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00	105.295.000,00		APBD
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	98.847.500,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.447.500,00		APBD
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						Persentase luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani	20%	20%	620.000.000,00	2.293.286.257,00		APBD
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Kab. Bangka Barat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	6 Unit Rumah	21 Unit Rumah	220.000.000,00	538.615.950,00		DAK Fisik- Tematik
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	6.379.950,00		APBD
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Kab. Bangka Barat	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Unit	4 Unit	90.000.000,00	238.959.975,00		DAK Fisik- Tematik
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh					Kampung palembang (sinar manik, air kuang)	Luas Permukiman Kumuh yang di Pugar	0,5 Ha	4,23 Ha	300.000.000,00	1.509.330.382,00		DAK Fisik- Tematik
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0 Dokumen	Dokumen	0,00	0,00		APBD
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	18,12%	18,12%	34.415.000.000,00	3.567.000.000,00	PN 6	APBD
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun / direhabilitasi pada Daerah Kabupaten / Kota	335 unit	113 unit	34.415.000.000,00	3.567.000.000,00		APBD
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha					Kab. Bangka Barat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1.342 Unit Rumah	113 Unit Rumah	34.415.000.000,00	3.567.000.000,00		APBD & Musren Kec
					- Perbaikan RTLH					Kab. Bangka Barat		30 unit	20 unit	945.000.000,00	675.000.000,00		Renja APBD
					- Perbaikan RTLH berdasarkan Musrenbang					Kab. Bangka Barat		55 unit	25 unit	1.650.000.000,00	750.000.000,00		Musren Kec
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Ersan Ismail Keranggan					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Yadi Sungai Daeng					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Yani sungai daeng					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Jumiye sungai daeng					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Kalsumi Kampung Ulu					Mentok		1 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama yanto tegalrejo					Mentok		1 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Ibnu Chatab Keranggan Tengah					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni atas nama Raiti Keranggan					Mentok		1 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00		RESES
					- perbaikan rumah atas nama Eldi Tanjung Punai					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah atas nama Indah Tanjung Punai					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- perbaikan rumah atas nama Haironi Tanjung laut					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah atas nama Rosbiyah Sukal					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah atas nama Nurmaya Sukal					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- Perbaikan rumah atas nama Lisawati Sukal					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah atas nama Hastuti Eko Wardani kampung senang hati					Mentok		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- mengusulkan 10 unti rumah layak huni untuk masyarakat di kecamatan tempilang					Tempilang		10 Unit	10 unit	450.000.000,00	315.000.000,00		RESES
					- pembangunan rumah kecamatan kelapa					Kelapa		1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah di kecamatan kelapa					Kelapa		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	31.500.000,00		RESES
					- pembangunan rumah layak huni di RT.08 Dusun Tegek Desa Benteng Kota					Tempilang		3 Unit	0 unit	135.000.000,00	0,00		RESES
					- bantuan rumah layak huni					Mentok		5 Unit	5 unit	225.000.000,00	157.500.000,00		RESES
					- perbaikan rumah layak huni Desa Dendang					Kelapa		5 Unit	0 unit	150.000.000,00	0,00		RESES
					- peningkatan rumah layak huni Desa air belo					Mentok		300 Unit	10 unit	9.000.000.000,00	315.000.000,00		RESES
					- bantuan rumah layak huni Desa Puput					Mentok		2 Unit	2 unit	90.000.000,00	63.000.000,00		RESES
					- peningkatan rumah layak huni keranggan					Mentok		300 Unit	2 unit	9.000.000.000,00	63.000.000,00		RESES
					- peningkatan rumah layak huni desa air limau					Mentok		300 Unit	6 unit	9.000.000.000,00	189.000.000,00		RESES
					- Pembangunan Rumah untuk masyarakat desa Air Limau					Mentok		2 Unit	3 unit	90.000.000,00	94.500.000,00		RESES
					-Pembangunanan Rumah Tidak Layak Huni					Mentok dan Simter		10 Unit	0 unit	425.000.000,00	0,00		RESES
					- Permohonan bantuan rumah tidak layak huni Dusun Jebu Darat Desa Kelabat					Parittiga		34 Unit	5 unit	1.530.000.000,00	157.500.000,00		RESES
					- Pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni					Parittiga		20 Unit	5 unit	900.000.000,00	157.500.000,00		RESES
					- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni					Jebus-Parittiga		7 Unit	6 unit	210.000.000,00	189.000.000,00		RESES
					- Pembangunan rumah layak huni untuk Desa Bakit					Parittiga		9 Unit	0 unit	90.000.000,00	0,00		RESES
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	25%	25%	8.102.615.000,00	2.142.169.200,00	PN 6	APBD
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi baik	100%	100%	8.102.615.000,00	2.142.169.200,00		APBD
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Dokumen	60.000.000,00	0,00		APBD
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	37 Lokasi	8 Lokasi	8.042.615.000,00	2.142.169.200,00		APBD & Musren Kec
					- Penyediaan PSU					Kab. Bangka Barat		4 Lokasi	6 Lokasi	800.000.000,00	1.072.169.200,00		Renja APBD
					- Penyediaan PSU					Kab. Bangka Barat		11 Lokasi	0 Lokasi	1.445.115.000,00			Musren Kec
					- perbaikan jalan lintas Dusun II ke Dusun I Desa Rambat					Kec. Simpang Teritip		13 KM	0 KM	709.000.000,00			RESES
					- bantuan drainase Sungai Tanggok Desa Sekar Biru					Parittiga		100 M	100 M	80.000.000,00	80.000.000,00		RESES
					- bantuan pembangunan drainase di rt 07 mushola ranti barat Desa Semulut					Parittiga		200 M	0 M	160.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan lingkar dari SDN 1 S/d pasar walet Air Lintang					Tempilang		800 M	0 M	692.000.000,00			RESES
					- pengaspalan jalan lingkar balai cina dusun Penganak Air Gantang					Parittiga		500 M	0 M	432.500.000,00			RESES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- peningkatan jalan gang durian tembus gang damai dusun parit 4							200 M	0 M	173.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan Gang Sirjin Daya Baru Air Belo					Mentok		100 M	100 M	50.000.000,00	190.000.000,00		RESES
					- rehab jalan Gang mayor Nursoba					Mentok		100 M	100 M	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- Pembuatan jalan setapak gg akasia RT 02 dusun V belo laut					Mentok		300 M	0 M	150.000.000,00			RESES
					- Pembuatan jalan setapak gang sakura Rt 02 Dusun V Belo Laut					Mentok		200 M	0 M	120.000.000,00			RESES
					- Peningkatan jalan Gang Mawar Dusun V Belo Laut					Mentok		100 M	0 M	200.000.000,00			RESES
					- peningkatan jalan tembus simpang tiga Jl. gang Siswa Dusun VII Belo Laut					Mentok		200 M	200 M	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES
					- Pembangunan Jalan Lingkungan Gg.cempaka, kp.tegalrejo, Sungai Baru					Mentok		150 M	0 M	100.000.000,00			RESES
					- Pengaspalan jalan lingkari dari RT 12 sampai RT 16 Teluk Limau					Parittiga		500 M	0 M	432.500.000,00			RESES
					- pembangunan jalan RT. 14 Kp. jawa dusun jebu darat desa kelabat					Parittiga		600 M	600 M	250.000.000,00	300.000.000,00		RESES
					- Pembangunan jalan gang Rt 06 lorong 3 Kaolin Dusun Jebu Darat Desa Kelabat					Parittiga		800 M	0 M	692.000.000,00			RESES
					- Pembangunan Jalan di RT 01 Desa Teluk Limau					Parittiga		500 M	0 M	500.000.000,00			RESES
					- Penimbunan Tanah Purih Jalan Kampung Bugis RT 11 Kampung Bugis RT 11 desa teluk limau					Parittiga		600 M	0 M	300.000.000,00			RESES
					- Gg.batu terus masuk Gg.alim dusun pait jaya RT 03 Belo Laut					Mentok		200 M	0 M	200.000.000,00			RESES
					- Perbaikan Jl. Gang Padang di Dusun II Rt 05 Desa Air Limau					Mentok		100 M	100 M	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- Pengaspalan jalan belakang Masjid sampai ke kuburan dusun I Rt 04 desa Air Limau					Mentok		100 M	100 M	50.000.000,00	200.000.000,00		RESES
					- Rehab Jl. Tembus dari jalan sukun tembus - ke jalan anang karjo kelurahan sungai baru					Mentok		200 M	200 M	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES
					- Pembangunan Jalan Lingkungan jalan dekat rumah bapak Fakim Desa Bakit					Parittiga		100 M	0 M	86.500.000,00			RESES
					- Pembuatan Jalan Baru RT. 01 Dusun V Belo Laut					Mentok		200 M	0 M	120.000.000,00			RESES
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Laporan	0,00	0,00		APBD
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									18.937.476.000,00	19.211.837.000,00		
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									6.051.141.000,00	5.600.230.000,00		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.779.271.000,00	4.062.130.000,00	PN 7	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.396.900.000,00	3.342.250.000,00		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	2.396.000.000,00	3.341.800.000,00		APBD
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	65.300.000,00	575.000,00		
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	60.750.000,00			
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 orang	17 orang	4.250.000,00	425.000,00		APBD
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	474.900.000,00	231.300.000,00		
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	10.000.000,00			APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	2.370.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.600.000,00	40.780.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	32.500.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	125.000.000,00		APBD
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	330.000.000,00	0,00		
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Unit	300.000.000,00			APBD
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00			APBD
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00			APBD
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00			APBD
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	471.831.000,00	462.880.000,00		
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Laporan	2.000.000,00			APBD
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.151.000,00	48.000.000,00		APBD
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	413.680.000,00	411.380.000,00		APBD
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	38.540.000,00	24.225.000,00		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	2.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	6 unit	8.540.000,00	4.225.000,00		APBD
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	15.000.000,00	7.500.000,00		APBD
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94					2.271.870.000,00	1.538.100.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%		Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	1.568.460.000,00	1.300.255.000,00		
								Indeks Resiko Bencana	Sedang		Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	656.410.000,00	194.960.000,00		
											Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	47.000.000,00	42.885.000,00		
											Ketersediaan data/informasi rawan bencana	100%	100%	47.000.000,00	42.885.000,00		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Ketersediaan data/informasi rawan bencana	100%	100%	47.000.000,00	42.885.000,00		
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	2769 Orang	2769 Orang	47.000.000,00	42.885.000,00		APBD
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	1.568.460.000,00	1.300.255.000,00		
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	24 unit	39 unit	118.500.000,00	62.900.000,00		APBD
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kab/Kota	100 Orang	100 Orang	65.000.000,00	50.250.000,00		APBD
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	28 Orang	28 Orang	1.099.960.000,00	939.830.000,00		APBD
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontinjensi					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000,00	100.600.000,00		APBD
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	9.260.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	100.600.000,00		
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	6 Kawasan	6 Kawasan	50.000.000,00	36.815.000,00		APBD
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	481.410.000,00	194.660.000,00		
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.650.000,00		APBD
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00		APBD
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500 Orang	1500 Orang	220.410.000,00	107.610.000,00		APBD
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	71.350.000,00		APBD
	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	50.000,00		APBD
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	175.000.000,00	300.000,00		
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	50.000,00		APBD
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / Kota	5 dokumen	1 dokumen	5.000.000,00	50.000,00		APBD
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	50.000,00		APBD
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000,00		APBD
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	50.000,00		APBD
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	10 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	50.000,00		APBD
					KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									12.886.335.000,00	13.611.607.000,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang	Nilai SAKIP Opini BPK	70 WTP		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.761.570.000,00	8.300.692.000,00	PN 7	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					KABUPATEN/KOTA	Daerah.	profesional dan akuntabel	Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	1.000.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	200.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	200.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	200.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	200.000,00		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	200.000,00		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.500.900.000,00	7.482.400.000,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	15 Orang/ Bulan	4.500.000.000,00	7.481.800.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	200.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	200.000,00		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	200.000,00		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	200.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	200.000,00		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	199.050.000,00	200.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	175.500.000,00	0,00		
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	200.000,00		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	0 Orang	7.750.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	0 Orang	15.500.000,00	0,00		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	470.100.000,00	266.802.000,00		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.210.000,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.925.000,00		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.785.000,00		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.600.000,00	40.924.000,00		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	29.340.000,00		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00		
					Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	49.618.000,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	120.000.000,00		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	25.000.000,00	14.900.000,00		
					Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	15.000.000,00	14.900.000,00		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	406.220.000,00	405.220.000,00		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	337.220.000,00	337.220.000,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	158.500.000,00	129.970.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	143.130.000,00	114.600.000,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	6.100.000,00	6.100.000,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	4.270.000,00	4.270.000,00		
1	5	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	100 Persen	100 Persen	4.657.025.000,00	4.300.275.000,00	PN 8	
1	5	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100 Persen	100 Persen	4.473.525.000,00	4.176.210.000,00		
1	5	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindung Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	12.100.000,00	6.050.000,00		
1	5	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	3.500.000,00		
1	5	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.428 Orang	1.404 Orang	3.665.360.000,00	3.665.360.000,00		
1	5	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatanan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	155.495.000,00		
1	5	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	168 Laporan	168 Laporan	233.000.000,00	249.230.000,00		
1	5	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	62 Kasus	35 Laporan	193.065.000,00	96.575.000,00		
1	5	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		Unit	0,00	0,00		
1	5	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	100 persen	183.500.000,00	124.065.000,00		
1	5	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	6 Laporan	33.850.000,00	27.275.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	5	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	100 Laporan	100 Laporan	107.625.000,00	64.610.000,00		
1	5	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan	55 Laporan	42.025.000,00	32.180.000,00		
1	5	4			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	64%	64%	2.467.740.000,00	1.010.640.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	75%	75%				
								Indeks Resiko Bencana	Sedang		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	100%	100%				
1	5	4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100 persen	100 persen	2.452.140.000,00	995.140.000,00		
1	5	4	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	64.300.000,00	64.300.000,00		
1	5	4	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	237.700.000,00	237.700.000,00		
1	5	4	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	627.840.000,00	627.840.000,00		
1	5	4	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00		
1	5	4	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00		
1	5	4	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kabakaran						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	15 Orang	15 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	5	4	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	0 Unit	1.457.000.000,00	0,00		
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 persen	100 persen	300.000,00	200.000,00		
1	5	4	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	200.000,00		
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 persen	100 persen	15.300.000,00	15.300.000,00		
1	5	4	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang	60 Orang	15.300.000,00	15.300.000,00		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									11.373.069.750,00	11.052.837.126,00		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									11.373.069.750,00	11.052.837.126,00		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	6.483.580.000,00	7.194.505.500,00	PN 7	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.500.000,00	750.000,00		
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.500.900.000,00	5.961.450.000,00		
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	4.500.000.000,00	5.961.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	06	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	81.900.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	59.850.000,00			
1	06	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	0 Orang	7.250.000,00	0,00		
1	06	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	0 Orang	14.500.000,00	0,00		
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	467.900.000,00	228.950.000,00		
1	06	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		
1	06	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00		
1	06	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		
1	06	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	80.600.000,00	40.300.000,00		
1	06	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		
1	06	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		
1	06	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	32.500.000,00		
1	06	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00	122.500.000,00		
1	06	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	%	380.000.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	06	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	0 Unit	350.000.000,00	0,00		
1	06	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
1	06	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00		
1	06	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00		
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	908.840.000,00	909.660.000,00		
1	06	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
1	06	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	46.500.000,00	56.000.000,00		
1	06	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00		
1	06	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	853.340.000,00	845.660.000,00		
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	142.240.000,00	93.395.500,00		
1	06	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	122.240.000,00	80.895.500,00		
1	06	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	7.500.000,00		
1	06	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pembangunan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase PSKS yang aktif	100 %	100 %	754.300.000,00	701.415.000,00	PN 6	
1	06	02	2,02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Persentase Lembaga/organisasi/ perusahaan yang memperoleh layanan izin UGB dan pengumpulan uang atau barang	100 %	0%	19.100.000,00	0,00		
1	06	02	2,02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 Dokumen	0 Dokumen	19.100.000,00	0,00		
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi	100 %	100 %	735.200.000,00	701.415.000,00		
1	06	02	2,02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	78 Orang	78 Orang	608.400.000,00	608.400.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	06	02	2,02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	46.800.000,00	46.800.000,00		
1	06	02	2,03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	15 Lembaga	30.000.000,00	15.147.500,00		
1	06	02	2,03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	10 Sertifikat	50.000.000,00	31.067.500,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	100 %	100 %	2.961.400.000,00	2.507.343.026,00	PN 6	
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					Kabupaten Bangka Barat	Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	100 %	100 %	2.866.100.000,00	2.430.803.026,00		
1	06	04	2,01	0001	Penyediaan Permakanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1090 Orang	922 Orang	2.300.550.000,00	1.865.253.026,00		
1	06	04	2,01	0002	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	161.200.000,00	161.200.000,00		
1	06	04	2,01	0003	Penyediaan Alat Bantu						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	41.200.000,00	41.200.000,00		
1	06	04	2,01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	26.200.000,00	26.200.000,00		
1	06	04	2,01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	14 Orang	68.250.000,00	68.250.000,00		
1	06	04	2,01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	21.200.000,00	21.200.000,00		
1	06	04	2,01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupate/Kota	20 Orang	20 Orang	31.200.000,00	31.200.000,00		
1	06	04	2,01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	61.200.000,00	61.200.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	06	04	2,01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	11.500.000,00	11.500.000,00		
1	06	04	2,01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	36.200.000,00	36.200.000,00		
1	06	04	2,01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang	9 Orang	21.200.000,00	21.200.000,00		
1	06	04	2,01	0012	Pemberian Layanan Rujukan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	86.200.000,00	86.200.000,00		
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					Kabupaten Bangka Barat	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	100 %	95.300.000,00	76.540.000,00		
1	06	04	2,02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	300.000,00	300.000,00		
1	06	04	2,02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	06	04	2,02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	690.000,00		
1	06	04	2,02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	2 orang	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	04	2,02	0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	55.550.000,00		
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%	Kabupaten Bangka Barat	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	694.650.000,00	309.875.000,00	PN 6	
1	06	05	2,01		Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar					Kabupaten Bangka Barat	Persentase anak - anak terlantar yang dipelihara	100 %	100 %	0,00	0,00		
1	06	05	2,01	0001	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar						Jumlah Anak - Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00		
1	06	05	2,01	0002	Rujukan Anak - Anak Terlantar						Jumlah Anak - Anak Terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00		
1	06	05	2,01	0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar						Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00		
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS	100 %	100 %	694.650.000,00	309.875.000,00		
1	06	05	2,02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	56.267 Orang	56.267 Orang	50.000.000,00	25.170.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
1	06	05	2,02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	20.525 Keluarga	20.525 Keluarga	50.000.000,00	37.150.000,00		
1	06	05	2,02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	156 Keluarga	156 Keluarga	494.650.000,00	247.555.000,00		
1	06	05	2,02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%	Kabupaten Bangka Barat	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	479.139.750,00	339.698.600,00	PN 6	
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	230.829.750,00	230.829.750,00		
1	06	06	2,01	0001	Penyediaan Makanan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	103.142.250,00	103.142.250,00		
1	06	06	2,01	0002	Penyediaan Sandang						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	60.637.500,00	60.637.500,00		
1	06	06	2,01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	22.250.000,00	22.250.000,00		
1	06	06	2,01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	22.550.000,00	22.550.000,00		
1	06	06	2,01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	22.250.000,00	22.250.000,00		
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana	100 %	100 %	248.310.000,00	108.868.850,00		
1	06	06	2,02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	0 Kampung	15.000.000,00	0,00		
1	06	06	2,02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	47 Orang	233.310.000,00	108.868.850,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									121.504.645.542,00	99.947.379.322,00		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									6.771.998.000,00	4.141.229.500,00		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									6.771.998.000,00	4.141.229.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	6.064.860.000,00	3.793.216.500,00	PN 7	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	750.000,00		
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.850.900.000,00	2.943.650.000,00		
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	22 orang	2.850.000.000,00	2.943.200.000,00		APBD
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	150.000,00		
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	150.000,00		
2	07	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	42.800.000,00	150.000,00		
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	31.500.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	0 orang	5.500.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	0 orang	5.500.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	472.900.000,00	267.161.500,00		
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	4.015.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	3.906.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.600.000,00	46.095.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	33.685.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.000.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	43.310.500,00		APBD
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	125.000.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2.030.000.000,00	5.000.000,00		
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Unit	10.000.000,00			APBD
2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	2.000.000.000,00			
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	10.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	611.640.000,00	559.985.000,00		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	790.000,00		APBD
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00		APBD
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	2.400.000,00		APBD
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	514.640.000,00	466.795.000,00		APBD
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	54.520.000,00	16.220.000,00		
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						APBD
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	33.300.000,00	5.000.000,00		APBD
2	07	01	2.09	0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	1.220.000,00	1.220.000,00		APBD
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,70%		Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50 persen	50 persen	588.280.000,00	283.029.000,00	PN 6	
2	07	03	2.01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan	4 jenis pelatihan	4 jenis pelatihan	588.280.000,00	283.029.000,00		
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	60 orang	588.280.000,00	283.029.000,00		APBD & Musren Kec
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten /Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			0,00	0,00		APBD
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,70%		Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	36 persen	36 persen	20.000.000,00	7.926.000,00	PN 6	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						Cakupan pemberi kerja yang melakukan antar kerja	10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.742.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25 Orang	20 Orang	5.000.000,00	5.742.500,00		
2	07	04	2.03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						jumlah pencari kerja berdasarkan (ak-1) dan yang diberdayakan yang ditempatkan		60 orang	0,00	2.183.500,00		APBD
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		50 orang		2.183.500,00		APBD
2	07	04	3.05		Kegiatan Penerbitan perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota						Persentase tenaga kerja asing yang memiliki IMTA	6 persen	persen	15.000.000,00	0,00		
2	07	04	3.05	0002	Validasi pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKPTKA) untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota						Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	2 SKRD	SKRD	15.000.000,00			APBD
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	4,70%		Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100 persen	100 persen	98.858.000,00	57.058.000,00	PN 6	
2	07	05	2.01		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	100 persen	100 persen	24.000.000,00	1.615.000,00		
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1 perusahaan	1 perusahaan	8.000.000,00	650.000,00		APBD
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 perusahaan	1 perusahaan	8.000.000,00	480.000,00		APBD
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	485.000,00		APBD
2	07	05	2.02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diselesaikan	100 persen	100 persen	74.858.000,00	55.443.000,00		
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 perkara	4 perkara	9.000.000,00	500.000,00		APBD
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 asosiasi dan serikat pekerja	3 asosiasi dan serikat pekerja	3.000.000,00	405.000,00		APBD
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	1 lembaga	57.858.000,00	54.008.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2982 orang	2982 orang	5.000.000,00	530.000,00		APBD
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									5.635.755.000,00	6.595.075.000,00		
2	8				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									5.635.755.000,00	6.595.075.000,00		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.858.240.000,00	6.039.820.000,00	PN 7	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	50.000,00		
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.800.900.000,00	4.454.230.000,00		
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	2.800.000.000,00	4.454.200.000,00		
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	300.000,00	10.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	08	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	80.550.000,00	10.000,00		
2	08	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	63.000.000,00	0,00		
2	08	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	23 Orang	0 Orang	5.750.000,00	0,00		
2	08	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Orang	0 Orang	11.500.000,00	0,00		
2	08	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	650.300.000,00	398.660.000,00		
2	08	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00		
2	08	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	44.900.000,00		
2	08	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00		
2	08	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	95.000.000,00	62.200.000,00		
2	08	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	35.000.000,00		
2	08	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12.000.000,00	3.000.000,00		
2	08	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	91.000.000,00	73.900.000,00		
2	08	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	167.650.000,00		
2	08	01	2,06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	10.000,00		
2	08	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	%	20.000.000,00	0,00		
2	08	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	Unit	20.000.000,00	0,00		
2	08	01	2,07	0006	Pengadaan Aset Lainnya						Jumlah Unit Aset Lainnya yang disediakan			0,00	0,00		
2	08	01	2,07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			0,00	0,00		
2	08	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	995.900.000,00	994.400.000,00		
2	08	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	500.000,00		
2	08	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	82.500.000,00	82.500.000,00		
2	08	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	08	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	896.400.000,00	896.400.000,00		
2	08	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kabupaten Bangka Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	308.790.000,00	192.460.000,00		
2	08	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	202.080.000,00	120.750.000,00		
2	08	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperlihara	4 Unit	4 Unit	7.190.000,00	7.190.000,00		
2	08	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	50.000.000,00		
2	08	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	32 Unit	32 Unit	19.520.000,00	14.520.000,00		
2	08	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,00	0,00		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	91,33		Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	65%	65%	276.850.000,00	106.400.000,00	PN 4	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Status Kabupaten Layak Anak	Madya	Kabupaten Bangka Barat	Penerapan PUG di Lembaga Pemerintah Daerah	65%	65%	21.850.000,00	6.400.000,00		
2	08	02	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG						Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	31 Perangkat Daerah		9.350.000,00			
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG						Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Perangkat Daerah		12.500.000,00			
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		31 orang		6.350.000,00		
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota		10 orang		50.000,00		
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	50%	50%	255.000.000,00	100.000.000,00		
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	50 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	235.000.000,00	100.000.000,00		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	91,33		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	100 %	30.000.000,00	288.635.000,00	PN 4	
								Status Kabupaten Layak Anak	Madya								
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi	30%	30%	10.000.000,00	105.000.000,00		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	105.000.000,00		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						persentase jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	112.115.000,00		
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		0 Orang		0,00		
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	20.000.000,00	112.115.000,00		
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										71.520.000,00		
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		80 Orang		71.520.000,00		DAK Non Fisik
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	91,33		Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	85%	85%	166.670.000,00	100.000,00	PN 4	
								Status Kabupaten Layak Anak	Madya								
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	85%	85%	81.670.000,00	50.000,00		
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	1 Dokumen	81.670.000,00	50.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						persentase penguatan lembaga penyedia layanan	80%	80%	20.000.000,00	50.000,00		
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	50.000,00		
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah unit layanan bagi keluarga	2 unit	0 unit	65.000.000,00	0,00		
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Layanan	0 Layanan	65.000.000,00	0,00		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	91,33		Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	80%	80%	16.000.000,00	500.000,00	PN 4	
								Status Kabupaten Layak Anak	Madya								
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data					Kabupaten Bangka Barat	cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100 %	100 %	16.000.000,00	500.000,00		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota						jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	500.000,00		
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	91,33		Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	85%	85%	207.995.000,00	32.545.000,00	PN 4	
								Status Kabupaten Layak Anak	Madya								
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	0 Lembaga PHA	9.995.000,00	0,00		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	0 Organisasi	9.995.000,00	0,00		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						persentase penguatan kualitas hidup anak	80%	80%	198.000.000,00	32.545.000,00		
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	100 orang	65 orang	165.000.000,00	26.250.000,00		
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingann Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingann Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6 dokumen	6 dokumen	33.000.000,00	6.295.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	91,33	Kabupaten Bangka Barat	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100 %	100 %	80.000.000,00	127.075.000,00	PN 4	
							Status Kabupaten Layak Anak	Madya									
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak	80%	80%	20.000.000,00	0,00		
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00		
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak	40%	40%	50.000.000,00	127.025.000,00		
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						jumlah layanan tidak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	20 layanan	20 layanan	0,00	0,00		
2	08	07	2.02	07	Koordinsi pelaksanaan layanan AMPK						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 Orang	20 Layanan	50.000.000,00	127.025.000,00		
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	80%	80%	10.000.000,00	50.000,00		
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	10.000.000,00	0,00		
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak		1 Dokumen		50.000,00		
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									15.352.580.000,00	17.397.493.430,00		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN									15.352.580.000,00	17.397.493.430,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	14.802.580.000,00	17.140.019.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	12.039.820.000,00	14.723.970.000,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat	Tjumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan	108 Orang/bulan	12.038.920.000,00	14.723.520.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat	jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat	jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	157.300.000,00	150.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat	jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	132.000.000,00	0,00		APBD
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	50 Orang	0 Orang	12.500.000,00	0,00		APBD
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0 Orang	12.500.000,00	0,00		APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Tersedianya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	468.280.000,00	340.836.000,00		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.997.000,00		APBD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	JumlahPaket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0 Paket	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.836.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	62.890.000,00		APBD
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	23.651.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	41.237.000,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	238.980.000,00	205.075.000,00		APBD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	40.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	0,00		DAK Fisik
					Pengadaan Mebel					Kab. Babar	Jumlah Pengadaan Mebel	40 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Bangka Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.018.580.000,00	2.017.915.000,00		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat	Jumlah paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat	jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	98.000.000,00	98.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.455.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat	jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	1.910.580.000,00	1.910.460.000,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	76.800.000,00	56.248.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74 Unit	74 Unit	18.500.000,00	18.448.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 Unit	4 Unit	40.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	jumlah pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	30 Unit	18.300.000,00	17.800.000,00		APBD
2	9	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	40%	40%	20.000.000,00	10.005.000,00	PN 6	
2	9	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	40%	40%	20.000.000,00	10.005.000,00		
2	9	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	2.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	9	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik					Kab. Bangka Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.505.000,00		APBD
2	9	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	9	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Tingkat konsumsi pangan AKE	2100	2100 kkal/kap/hr	315.000.000,00	111.239.500,00	PN 6	
				Tingkat konsumsi pangan AKP							57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr					
				Tingkat ketersediaan pangan AKE							1440	1440 kkal/kap/hr					
				Tingkat ketersediaan pangan AKP							62 gr/kap/hr	62 gr/kap/hr					
2	9	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 dokumen	3 dokumen	290.000.000,00	104.796.500,00		
2	9	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Kab. Bangka Barat	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	150.000,00		APBD & Musren Kec
2	9	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	300.000,00		APBD
2	9	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	5.410.000,00		APBD
2	9	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					Kab. Bangka Barat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	98.936.500,00		APBD
2	9	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						Jumlah Dokumen pencapaian target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai degan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	6.443.000,00		
				jumlah Capaian target konsumsikelompok pangan perkapita per tahun sesuai AKG (beras, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan dan pagan hewani)							Beras : 85 kg/kap/th Umbi2an : 38,33 kg/kap/th Sayur dan buah : 96,63 kg/kap/th Kacang2an : 13,51 kg/kap/th Pangan hewani : 57,31 kg/kap/th	Beras : 85 kg/kap/th Umbi2an : 38,33 kg/kap/th Sayur dan buah : 96,63 kg/kap/th Kacang2an : 13,51 kg/kap/th Pangan hewani : 57,31 kg/kap/th					
2	9	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun					Kab. Bangka Barat	jumlah Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.885.000,00		APBD
2	9	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	2.558.000,00		APBD
2	9	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase penanganan daerah rawan pangan	50%	50%	120.000.000,00	50.219.500,00	PN 6	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	9	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						Dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	23.575.000,00		
2	9	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					Kab. Bangka Barat	jumlah Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	23.575.000,00		APBD
2	9	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	26.644.500,00		
											jumlah Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	3 Dokumen	3 Dokumen				
2	9	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	16.424.500,00		APBD
2	9	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	10.220.000,00		APBD
2	9	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	90%	95.000.000,00	86.010.430,00	PN 6	
2	9	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	4 kali	95.000.000,00	86.010.430,00		
2	9	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.862.930,00		APBD
2	9	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					Kab. Bangka Barat	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	11.147.500,00		APBD
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									12.000.000.000,00	649.273.500,00		
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									12.000.000.000,00	649.273.500,00		
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	100%	11.350.000.000,00	360.971.000,00		
								Indeks Bangunan Gedung	Baik								
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	20%	20%	11.350.000.000,00	360.971.000,00		
2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima santunan Tanah dalam 1 Daerah Kabupaten						Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	3 Dokumen	11.250.000.000,00	316.196.000,00		
2	10	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Untuk Pembangunan oleh Pemda Kabupaten						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	44.775.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	84%	84%	100.000.000,00	10.215.000,00		
								Indeks Bangunan Gedung	Baik								
2	10	08	2,02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong	15,34	15,34	100.000.000,00	10.215.000,00		
2	10	08	2,02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	10.215.000,00		
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	75%	75%	400.000.000,00	222.525.000,00		
								Indeks Bangunan Gedung	Baik								
2	10	10	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						Ketersediaan Data Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten			400.000.000,00	222.525.000,00		
2	10	10	2,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	79.805.000,00		
2	10	10	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	120 persil	50 persil	300.000.000,00	142.720.000,00		
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,71		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	100%	150.000.000,00	55.562.500,00		
								Indeks Bangunan Gedung	Baik								
2	10	04	2,04		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten						Persentase konflik lahan tanah garapan yang di selesaikan	100%	100%	150.000.000,00	55.562.500,00		
2	10	04	2,04	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	1 berita acara	50.000.000,00	27.750.000,00		
2	10	04	2,04	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	27.812.500,00		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									15.108.639.280,00	15.044.177.095,00		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									15.108.639.280,00	15.044.177.095,00		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.178.311.280,00	5.977.396.230,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	750.000,00		
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.135.900.000,00	4.403.250.000,00		
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/ bulan	26 orang/ bulan	3.135.000.000,00	4.402.800.000,00		APBD
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	150.000,00		
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	14.141.280,00	14.141.280,00		
2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	14.141.280,00	14.141.280,00		APBD
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	80.800.000,00	150.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket	67.500.000,00	0,00		APBD
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	0 Orang	6.500.000,00	0,00		APBD
2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	0 Orang	6.500.000,00	0,00		APBD
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	457.900.000,00	262.448.950,00		
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	0,00	15.000.000,00		APBD
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		APBD
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.600.000,00	40.300.000,00		APBD
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	24.999.950,00		APBD
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	0 dokumen	3.000.000,00	0,00		APBD
2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	52.499.000,00		APBD
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	245.000.000,00	122.500.000,00		APBD
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	40.000.000,00	0,00		
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket mebel yang disediakan	14 Unit	Unit	40.000.000,00	0,00		
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		DAK Fisik
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		APBD
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.329.260.000,00	1.256.236.000,00		
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	216.000.000,00	166.000.000,00		APBD
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	7.000.000,00	3.796.000,00		APBD
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.104.260.000,00	1.085.440.000,00		APBD
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	118.510.000,00	40.270.000,00		
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	39.360.000,00	36.000.000,00		APBD
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	0 unit	20.000.000,00	0,00		APBD
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 unit	15 unit	9.150.000,00	4.270.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	0 unit	50.000.000,00	0,00		APBD
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	91 persen	91 persen	350.000.000,00	350.919.940,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	25 persen	25 persen	350.000.000,00	350.919.940,00		
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1 dokumen		3.820.000,00		
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000,00	347.099.940,00		APBD
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	600.000.000,00	300.071.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Persentase terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	100%	500.000.000,00	225.071.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	6.660.000,00		APBD
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	7 Lokasi	7 Lokasi	100.000.000,00	84.690.000,00		APBD
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	133.721.000,00		APBD
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 persen	100 persen	100.000.000,00	75.000.000,00		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	75.000.000,00		APBD
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	58,33 persen	58,33 persen	55.000.000,00	22.449.900,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	100 Persen	100 Persen	55.000.000,00	22.449.900,00		
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9,92 Ha	9,92 Ha	35.000.000,00	22.449.900,00		APBD
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati						Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 orang	0 orang	20.000.000,00	0,00		APBD
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	73%	73%	30.000.000,00	5.059.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3						Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha	100 persen	100 persen	30.000.000,00	5.059.000,00		
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	5.059.000,00		APBD
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	100 persen	100 persen	105.000.000,00	10.604.975,00	PN 8	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	dan Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%		terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)						
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	105.000.000,00	10.604.975,00		
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	7.425.000,00		APBD
2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	3 orang	0 orang	15.000.000,00	0,00		APBD
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1Orang	0 orang	15.000.000,00	0,00		APBD
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	56 badan usaha	30 badan usaha	55.000.000,00	3.179.975,00		APBD
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	100 persen	100 persen	5.200.000,00	4.275.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						Persentase Terselaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	100 persen	100 persen	5.200.000,00	4.275.000,00		
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 pengaduan	1 pengaduan	5.200.000,00	4.275.000,00		APBD
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	22 persen	22 persen	100.000.000,00	44.373.050,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	100.000.000,00	44.373.050,00		
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	22 Entitas	10 Entitas	100.000.000,00	44.373.050,00		APBD
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,94		Jumlah sampah yang dikelola	5.313,56 Ton/Thn	5.313,56 Ton/Thn	8.635.128.000,00	8.316.933.000,00	PN 8	
								Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	76,47%								
								Indeks Resiko Bencana	Sedang								
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah						Persentase sampah yang dikelola	62,89%	62,89%	8.635.128.000,00	8.316.933.000,00		
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan sampah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	2 Laporan	7.343.512.000,00	7.050.317.000,00		APBD
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.311,56 ton	5.311,56 ton	1.241.616.000,00	1.241.616.000,00		APBD
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Jumlah komunitas pencinta lingkungan	1 komunitas	1 komunitas	50.000.000,00	12.095.000,00	PN 8	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	100 persen	50.000.000,00	12.095.000,00		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.825.000,00		APBD
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	500 orang	500 orang	25.000.000,00	7.270.000,00		APBD
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									6.865.198.712,00	8.473.483.962,00		
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									6.865.198.712,00	8.473.483.962,00		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	6.189.704.312,00	8.209.175.412,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	250.000,00		APBD
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 laporan	4 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	3.765.254.312,00	6.384.704.312,00		APBD
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.764.354.312,00	6.384.554.312,00		APBD
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	85.050.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	67.500.000,00	0,00		APBD
2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	23 orang	0 orang	5.750.000,00	0,00		APBD
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	0 orang	11.500.000,00	0,00		APBD
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	702.400.000,00	409.218.300,00		APBD
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.500.000,00	2.975.000,00		APBD
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.500.000,00	4.383.000,00		APBD
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	95.600.000,00	30.121.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	65.000.000,00	28.299.800,00		APBD
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	10.500.000,00	2.640.000,00		APBD
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	85.000.000,00	125.749.500,00		APBD
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	420.000.000,00	210.000.000,00		APBD
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	30.000.000,00	0,00		APBD
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0,00	0,00		
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0,00	0,00		
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.512.390.000,00	1.386.897.000,00		APBD
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	3.000.000,00		APBD
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	64.972.000,00		APBD
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	38.000.000,00		APBD
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.340.390.000,00	1.280.925.000,00		APBD
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	92.810.000,00	28.005.800,00		APBD
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	38.330.000,00	20.705.800,00		APBD
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel						Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	0 unit	4.000.000,00	0,00		APBD
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 unit	10 unit	14.380.000,00	4.000.000,00		
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	0 unit	25.000.000,00	0,00		
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	5 unit	6.100.000,00	3.300.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0 unit	5.000.000,00	0,00		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	90,9 persen	90,9 persen	525.814.400,00	219.517.550,00	PN 7	APBD
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 persen	100 persen	38.503.000,00	16.611.300,00		APBD
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	6.684.000,00	650.300,00		APBD
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	31.819.000,00	15.961.000,00		APBD
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk						Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk	100 persen	100 persen	468.000.000,00	202.906.250,00		APBD
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	25000 Dokumen	25000 Dokumen	468.000.000,00	202.906.250,00		APBD
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan aturan yang berlaku (SPM Kemendagri)	100 persen	0 persen	18.000.000,00	0,00		APBD
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0 Laporan	18.000.000,00	0,00		APBD
2	12	02	2.04		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk						Persentase pembinaan pendaftaran penduduk yang terselenggara	100 persen	0 persen	1.311.400,00	0,00		APBD
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0 Laporan	1.311.400,00	0,00		APBD
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	70,43 persen	70,43 persen	95.820.000,00	26.626.000,00	PN 7	APBD
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil	100 persen	100 persen	30.700.000,00	18.025.000,00		APBD
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000 Dokumen	7000 Dokumen	13.700.000,00	1.400.000,00		APBD
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	2.000.000,00	1.625.000,00		APBD
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100 persen	100 persen	46.370.000,00	8.601.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang beragama Islam						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagiPenduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	2 Laporan	11.854.000,00	5.050.000,00		APBD
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Laporan	5 Laporan	5.531.000,00	1.051.000,00		APBD
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	0 Laporan	16.985.000,00	0,00		APBD
2	12	03	2.02	09	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil						Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	2.500.000,00		APBD
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						Persentase Pembinaan Pencatatan Sipil terhadap pihak terkait yang terselenggara	100 Persen	0 Persen	18.750.000,00	0,00		APBD
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	0 Laporan	18.750.000,00	0,00		APBD
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Persentase ketersediaan data kependudukan	93,33 persen	93,33 persen	26.100.000,00	2.040.000,00	PN 7	APBD
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat	100 Persen	100 Persen	3.900.000,00	1.125.000,00		APBD
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	525.000,00		APBD
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	25 Dokumen	25 Dokumen	300.000,00	250.000,00		APBD
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	350.000,00		APBD
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara dengan baik	100 Persen	100 Persen	6.900.000,00	615.000,00		APBD
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	300.000,00		APBD
2	12	04	2.03	07	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00		APBD
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	315.000,00		APBD
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100 Persen	100 Persen	15.300.000,00	300.000,00		APBD
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	300.000,00		APBD
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Persentase ketersediaan profil kependudukan	100 persen	100 persen	27.760.000,00	16.125.000,00	PN 7	APBD
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan						Persentase Penyusunan profil kependudukan	100 %	100 %	27.760.000,00	16.125.000,00		APBD
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00		APBD
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	22.760.000,00	14.625.000,00		APBD
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									1.971.750.000,00	877.528.000,00		
					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA									1.971.750.000,00	877.528.000,00		
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kabupaten Bangka Barat	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	100 %	100 %	70.000.000,00	21.697.500,00	PN 7	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa	100 Desa	100 Desa	70.000.000,00	21.697.500,00		
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1 Desa	1 Desa	25.000.000,00	8.082.500,00		
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	60 Desa	60 Desa	20.000.000,00	7.245.000,00		
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60 Desa	60 Desa	15.000.000,00	6.370.000,00		
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa						Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	0 Desa	10.000.000,00	0,00		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kabupaten Bangka Barat	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	100 %	100 %	373.000.000,00	97.615.000,00	PN 7	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	100 Desa	100 Desa	373.000.000,00	97.615.000,00		
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.570.000,00		
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	9.977.500,00		
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	20.000.000,00	10.405.000,00		
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	12.975.000,00		
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang	0 Orang	65.000.000,00	0,00		Musren Kec
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	13	04	2,01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	6.125.000,00		
2	13	04	2,01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	7.800.000,00		
2	13	04	2,01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00		
2	13	04	2,01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	3.525.000,00		
2	13	04	2,01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						Jumlah Dokumen Profil Desa	60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00	5.830.000,00		
2	13	04	2,01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.635.000,00		
2	13	04	2,01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	7.387.500,00		
2	13	04	2,01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang	0 Orang	53.000.000,00	0,00		Musren Kec
2	13	04	2,01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						Jumlah Desa yang Difasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Desa	1 Desa	25.000.000,00	17.685.000,00		
2	13	04	2,01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	60 Laporan	60 Laporan	7.500.000,00	2.700.000,00		
2	13	04	2,01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0 Dokumen	65.000.000,00	0,00		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kabupaten Bangka Barat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	85%	85%	1.443.750.000,00	690.990.500,00	PN 7	
2	13	05	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang					Kabupaten Bangka Barat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100 %	100 %	1.443.750.000,00	690.990.500,00		
											Lembaga adat desa yang aktif	13 Lembaga Adat	13 Lembaga Adat				
											Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	2 Alat	2 Alat				
2	13	05	2,01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	60 Dokumen	65.000.000,00	57.000.000,00		
2	13	05	2,01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	183.000.000,00	100.000.000,00		Musren Kec
2	13	05	2,01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	70.000.000,00	68.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	13	05	2,01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00		
2	13	05	2,01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	315.750.000,00	108.545.000,00		
2	13	05	2,01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	57.445.500,00		
2	13	05	2,01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00		
2	13	05	2,01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	300.000.000,00		
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	10,58%	Kabupaten Bangka Barat	Persentase kerja sama yang diimplementasi	38, 33 %	38, 33 %	85.000.000,00	67.225.000,00	PN 7	
2	13	03	2,01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah kerjasama yang terbentuk antar desa	25 Kerjasama	25 Kerjasama	85.000.000,00	67.225.000,00		
2	13	03	2,01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	16.075.000,00		
2	13	03	2,01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen	25 Dokumen	30.000.000,00	25.425.000,00		
2	13	03	2,01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	25.725.000,00		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									831.366.000,00	3.946.426.000,00		
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									831.366.000,00	3.946.426.000,00		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15	Kabupaten Bangka Barat	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	1 perbup	1 perbup	56.815.000,00	241.981.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
2	14	02	2,01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantatis Penduduk					Kabupaten Bangka Barat	jumlah kebijakan terkait kuantitas/kualitas penduduk di Pemerintah daerah dengan jumlah kebijakan yang disusun Pemerintah Provinsi	100%	100%	40.300.000,00	24.425.000,00		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan		
												Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
2	14	02	2.01	06		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal						jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI, dan SLTP, MTS , Jalur Non Formal dan Informal	2 Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan	40.000.000,00				
2	14	02	2.01	01		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						jumlah dokumen hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana)	1 Dokumen	Dokumen	300.000,00				
2	14	02	2.01	0019		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal						Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal		2 Kegiatan		24.125.000,00			
2	14	02	2.01	0020		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		1 Dokumen		300.000,00			
2	14	02	2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang disusun	100%	100%	16.515.000,00	217.556.000,00			
2	14	02	2.02	0009		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan		71.346.000,00		DAK Non Fisik	
2	14	02	2.02	0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	12.100.000,00	75.710.000,00			
2	14	02	2.02	0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		36 Dokumen		70.500.000,00		DAK Non Fisik	
2	14	02	2.02	0020		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Dokumen		0,00			
2	14	02	2.02	03		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Dokumen	4.415.000,00	0,00			
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15	Kabupaten Bangka Barat	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	80,68	80,68	595.251.000,00	2.325.590.000,00	PN 4		
								Prevalensi Stunting	5,52%										
2	14	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					Kabupaten Bangka Barat	persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	100%	50.000.000,00	607.670.000,00			
2	14	03	2.01	04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Dokumen	50.000.000,00				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		60 Laporan		263.970.000,00		DAK Non Fisik
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		60 Laporan		170.100.000,00		
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Dokumen		97.200.000,00		
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		4 Organisasi		76.400.000,00		DAK Non Fisik
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						Jumlah PLKB yang aktif terhadap PLKB yang ada	100%	100%	466.596.000,00	1.261.911.000,00		
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah sarana pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia	6 unit	unit	30.000.000,00	0,00		
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		320 Orang		196.500.000,00		DAK Non Fisik
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		12 Laporan		1.065.411.000,00		
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						jumlah laporan hasil penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	12 Laporan	436.596.000,00	0,00		
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						persentase pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	53.655.000,00	281.274.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Laporan	6 Laporan	37.655.000,00	30.455.000,00		
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		409 Orang		235.219.000,00		DAK Non Fisik
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	1 unit	0 unit	3.000.000,00	0,00		
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		3 Laporan		15.600.000,00		DAK Non Fisik
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		0 orang		0,00		
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		0 Orang		0,00		
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kopentensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						jumlah akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarna Penunjang Pelayanan KB	10 orang		3.000.000,00			
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan						jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	50 orang		10.000.000,00			
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakat Tingkat Daerah	100%	100%	25.000.000,00	174.735.000,00		
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		Laporan				
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	29 Kampung	25 Kampung	25.000.000,00	174.735.000,00		DAK Non Fisik
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	79,70%	79,70%	179.300.000,00	1.378.855.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%		persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	87%	87%				
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						terpenuhinya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	144.300.000,00	315.855.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	46.900.000,00		
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		48 Laporan / Dokumen		47.880.000,00		DAK Non Fisik
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		320 Laporan		212.625.000,00		DAK Non Fisik
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		50 Orang		8.450.000,00		
2	14	04	2.01	0019	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		0 Kelompok		0,00		
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	108 orang		24.000.000,00			
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	198 orang		300.000,00			
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	35.000.000,00	1.063.000.000,00		
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	30.000.000,00		
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		465 Laporan		475.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		154 Laporan		558.000.000,00		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									12.613.200.000,00	5.014.914.950,00		
					DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN									12.613.200.000,00	5.014.914.950,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas Indeks Bangunan Gedung	0,71 Baik	Kab. Bangka Barat	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana LLAJ	34,60%	34,60%	12.563.200.000,00	4.967.789.950,00	PN 3	APBD
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Jumlah Rancangan Kebijakan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Rancangan Kebijakan	1 Rancangan Kebijakan	0,00	0,00		APBD
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	0,00	0,00		APBD
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	0,00	0,00		APBD
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten						Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik	100%	100%	10.323.200.000,00	4.331.845.000,00		APBD
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	846 Unit	292 Unit	8.460.000.000,00	3.240.000.000,00		APBD & Musren Kec
					- Penyediaan Lampu Jalan					Kab. Bangka Barat		10 unit	100 Unit	100.000.000,00	1.000.000.000,00		Renja APBD
					- lampu penerangan jalan dusun sukal Belo Laut					Mentok		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan gang raflesia air samak					Mentok		5 Unit	2 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan gang tajwid menjelang					Mentok		5 Unit	1 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan di teluk rubiah tanjung Pak Dan					Mentok		3 Unit	2 Unit	30.000.000,00	20.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan perumahan					Mentok		17 Unit	8 Unit	170.000.000,00	80.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan Dusun ahoi Belo Laut					Mentok		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00		RESES
					- Pengadaan lampu untuk jalan baru kelapa					Kelapa		10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES
					- Pengadaan lampu penerangan jalan Desa tempilang					Tempilang		10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan di kecamatan tempilang					Tempilang		10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00		RESES
					- penambahan lampu jalan sebanyak 30 titik di kecamatan tempilang					Tempilang		30 Unit	7 Unit	300.000.000,00	70.000.000,00		RESES
					- penerangan lampu jalan Simpang Teritip					Simpang Teritip		20 Unit	0 unit	200.000.000,00	0,00		RESES
					- Penyediaan Lampu Keranggan					Mentok		5 Unit	0 unit	50.000.000,00			RESES
					- belum adanya penerangan jalan di RT.01 Kelurahan Menjelang					Mentok		5 Unit	0 unit	50.000.000,00			RESES
					- Penyediaan Lampu Jalan Sungai Tanggok Desa Sekar Biru					Parittiga		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- bantuan lampu jalan sebanyak 2 buah masuk dan keluar halaman puskesmas sekar biru					Parittiga		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan kecamatan kelapa					Kelapa		10 Unit	0 unit	100.000.000,00			RESES
					- bantuan lampu jalan Desa Bakit					Parittiga		10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					- Bantuan lampu penerangan jalan 24 titik di Dusun Kemang Masam					Mentok		24 Unit	15 Unit	240.000.000,00	150.000.000,00		RESES
					- bantuan LPU di Dusun Tanjung Punai					Mentok		24 Unit	18 Unit	240.000.000,00	180.000.000,00		RESES
					- bantuan LPU di kampung Air Samak					Mentok		12 Titik	15 Unit	120.000.000,00	150.000.000,00		RESES
					- bantuan LPU di gang tembus jalan raya peltim Dusun VI Belo Laut					Mentok		12 Titik	12 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00		RESES
					- lampu jalan desa dendang					Kelapa		20 Unit	8 Unit	200.000.000,00	80.000.000,00		RESES
					- bantuan lampu jalan Desa Kelabat					Parittiga		6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00		RESES
					- Lampu jalan 5 titik desa kelabat					Parittiga		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan 25 titik di RT desa kacung					Kelapa		45 Unit	0 Unit	450.000.000,00	0,00		RESES
					- lampu penerangan jalan RT 8 Desa kacung					Kelapa		6 Unit	0 Unit	60.000.000,00	0,00		RESES
					- pemasangan lampu penerangan jalan untuk desa Belo Laut					Mentok		10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan setiap perempatan Dusun Penganak Desa Air Gantang					Parittiga		5 Unit	3 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan desa air limau					Mentok		5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00		RESES
					- lampu penerangan jalan keranggan					Mentok		5 Unit	3 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan desa air belo					Mentok		100 Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	40.000.000,00		RESES
					- bantuan LPU simpang wihara RT.7 Desa Puput					Parittiga		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00		RESES
					- lampu penerangan jalan 5 titik di gang Binjai							5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00		RESES
					- Bantuan lampu jalan Sungai Baru					Mentok		2 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00		RESES
					- lampu penerangan jalan keramat							2 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00		RESES
					- Bantuan lampu jalan 3 titik di rt 02 rw 2 sungai Daeng					Mentok		3 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00		RESES
					- pengadaan lampu penerangan jalan untuk desa air limau					Mentok		15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00		RESES
					- Bantuan lampu jalan gg akasia RT 02 dusun V belo laut					Mentok		5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00		RESES
					- Bantuan lampu jalan RT 03 Dusun V Belo Laut					Mentok		5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00		RESES
					- pengadaan lampu penerangan jalan di jl. Balai Tegalrejo					Mentok		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- Penyediaan Lampu perumahan nusa indah. kp.tegarjo. sungai baru					Mentok		7 Unit	0 Unit	70.000.000,00	0,00		RESES
					- Pemasangan lampu jalan di RT. 17 Dusun Tambang 25 Cupat					Parittiga		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00		RESES
					- Penyediaan Lampu gang mesjid Rt 01 Rw 02 Sungai baru					Mentok		4 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00		RESES
					- Penyediaan Lampu samping gerasi, bedeng maras RT 01 RW 02 Sungai Baru					Mentok		1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00		RESES
					- Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya Teluk Limau					Parittiga		30 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00		RESES
					- Bantuan Pemasangan Lampu Jalan Kp Suka Mulya Air Gantang					Parittiga		5 Unit	8 Unit	50.000.000,00	80.000.000,00		RESES
					- Penyediaan Lampu Jalan Desa Ranggi Asam					Jebus		15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00		RESES
					- Penyediaan Lampu Jalan kp. senang hati pal 1, sungai daeng					Mentok		10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00		RESES
					- Pengadaan lampu jalan untuk desa Sekar Biru					Parittiga		5 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00		RESES
					- Penyediaan Lampu Penerangan Desa Bakit					Parittiga		10 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00		RESES
					- Penyediaan Lampu Jalan Skip Senang Hati					Mentok		10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		RESES
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1.985 Unit	1.985 Unit	1.863.200.000,00	1.091.845.000,00		APBD
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Tipe C						Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	100%	0%	1.030.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal. Tipe C yang terpenuhi	3 Orang	Orang	30.000.000,00	0,00		APBD
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang)					Kec. Kelapa	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	Unit	1.000.000.000,00			APBD
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji KIR	100%	100%	425.000.000,00	274.999.950,00		APBD
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	Unit	100.000.000,00			APBD
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya	2 orang	orang	50.000.000,00	0,00		APBD
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11 Unit	11 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00		APBD
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.950,00		APBD
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00		APBD
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten						Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tahun n	100%	100%	275.000.000,00	158.945.000,00		APBD
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	145.090.000,00		APBD
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	11.855.000,00		APBD
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100%	510.000.000,00	202.000.000,00		APBD
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 Laporan	3 Laporan	280.000.000,00	200.000.000,00		APBD
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	Orang	80.000.000,00	0,00		APBD
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Memenuhi Persyaratan Teknis Pengelolaan Pelabuhan	100%	100%	50.000.000,00	47.125.000,00	PN 2	APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Kondisi Baik	100%	100%	50.000.000,00	47.125.000,00		APBD
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun			0,00	0,00		APBD
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara			0,00	0,00		APBD
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	47.125.000,00		APBD
2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia						APBD
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									8.914.170.000,00	8.075.240.000,00		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									8.914.170.000,00	8.075.240.000,00		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.421.300.000,00	4.532.240.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.850.900.000,00	3.474.250.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	21 orang	2.850.000.000,00	3.473.800.000,00		APBD
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		
2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	59.550.000,00	150.000,00		
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket	48.750.000,00	0,00		APBD
2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	0 orang	5.250.000,00	0,00		APBD
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21orang	0 orang	5.250.000,00	0,00		APBD
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	599.900.000,00	289.950.000,00		
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	20.000.000,00	0,00		APBD
2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	70.600.000,00	35.300.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	40.000.000,00	20.000.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket	12 paket	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	12 paket	55.000.000,00	27.500.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	400.000.000,00	200.000.000,00		APBD
2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	0,00		
07	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit	20.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	819.080.000,00	750.580.000,00		
2	16	01	2.08	'0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air/Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	90.000.000,00	90.000.000,00		APBD
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	2.500.000,00		APBD
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	722.080.000,00	657.080.000,00		APBD
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	70.070.000,00	16.410.000,00		
2	16	01	2.09	'0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
2	16	01	2.09	'0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	2.750.000,00	2.750.000,00		APBD
2	16	01	2.09	'0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
2	16	01	2.09	'0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 unit	1 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	16	01	2.09	'0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	6 unit	7.320.000,00	3.660.000,00		APBD
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	50.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	1.080	1.080	1.395.000.000,00	810.941.200,00	PN 7	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	650 Informasi	500 Informasi	1.395.000.000,00	810.941.200,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	16	02	2,01	0014	Relasi Media						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan	1 laporan	1 laporan	700.000.000,00	527.800.000,00		
2	16	02	2,01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 komunitas	0 komunitas	50.000.000,00	0,00		APBD
2	16	02	2,01	0017	Pelayanan Informasi Publik						Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan	400 permohonan	200 permohonan	405.000.000,00	201.049.500,00		APBD
2	16	02	2,01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daeah	1 rekomendasi	1 rekomendasi	40.000.000,00	14.210.000,00		APBD
2	16	02	2,01	0021	Pengelolaan media komunikasi publik						Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 media	5 media	30.000.000,00	29.982.700,00		APBD
2	16	02	2,01	0023	Penyusunan Konten						Jumlah konten informasi publik	960 konten	500 konten	40.000.000,00	37.899.000,00		APBD
2	16	02	2,01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	31 orang	0 Orang	130.000.000,00	0,00		APBD
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	80%	80%	3.097.870.000,00	2.732.058.800,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase OPD, Desa dan Kelurahan Kabupaten Bangka Barat yang memiliki nama domain	75%	75%	30.000.000,00	29.300.000,00		
2	16	3	2,01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain pemerintah Desa	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	29.300.000,00		APBD
2	16	03	2,01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah												APBD
2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Layanan E-Government yang dikelola	48	51	3.067.870.000,00	2.702.758.800,00		
2	16	03	2,02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional						Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 unit	1 Aplikasi	497.870.000,00	191.012.000,00		APBD
2	16	03	2,02	0015	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda						Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 dokumen	1 laporan	50.000.000,00	38.084.600,00		APBD
2	16	03	2,02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi						Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	5 Perangkat Daerah	1 dokumen	30.000.000,00	4.917.900,00		APBD
2	16	03	2,02	0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE						Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	39.850.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah						Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 unit	2 aplikasi	250.000.000,00	106.292.000,00		APBD
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah						Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	2 aplikasi	30.000.000,00	29.850.000,00		APBD
2	16	03	2.02	0022	Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah						Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000,00	7.057.100,00		APBD
2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	1 dokumen	5 unit	10.000.000,00	150.000,00		APBD
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengna Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	7 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	275.000.000,00	474.247.500,00		
2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	11.297.700,00		APBD
2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE						Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	0 dokumen	30.000.000,00	0,00		APBD
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE						Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	1 dokumen	31 Perangkat Daerah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00		APBD
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									7.543.668.191,00	6.959.192.191,00		
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN									7.543.668.191,00	6.959.192.191,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	6.090.700.191,00	6.456.602.191,00	PN 7	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	749.500,00		
					Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	3 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	149.750,00		APBD
					Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	149.750,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Administrasi keuangan perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.822.705.191,00	4.897.004.441,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/ bulan	41 orang/ bulan	3.821.805.191,00	4.896.405.191,00		APBD
					Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	149.700,00		APBD
					Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	149.700,00		APBD
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	299.850,00		APBD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
					Administrasi pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Derah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	25.000.000,00	23.249.900,00		
					Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah						Jumlah data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	23.249.900,00		APBD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	87.300.000,00	390.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Babar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	72.000.000,00	0,00		
					Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
					Sosialisasi Peraturan Perundang undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	24 orang	7.500.000,00	240.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	30 orang	0 orang	7.500.000,00	0,00		APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	423.245.000,00	208.665.400,00		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4 paket	4 paket	4.000.000,00	1.932.200,00		APBD
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	7.500.000,00		APBD
					Penyediaan peralatan rumah tangga					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	2 paket	2 paket	11.000.000,00	3.650.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan Logistik					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	70.600.000,00	35.266.500,00		APBD
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	12 paket	12 paket	40.000.000,00	18.665.000,00		APBD
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	1.600.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 paket	12 paket	55.000.000,00	27.411.700,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	224.000.000,00	112.000.000,00		APBD
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	645.000,00	640.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Bangka Barat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.625.200.000,00	1.289.542.950,00		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik					Kab. Bangka Barat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	117.200.000,00	117.199.200,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.500.000.000,00	1.168.343.750,00		APBD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kab. Babar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	25.000.000,00	15.000.000,00		
07	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			0,00	0,00		APBD
					Pengadaan Mebel					Kab. Babar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00		
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Bangka Barat	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	80.450.000,00	21.850.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	3.250.000,00	3.250.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 unit	1 unit	55.000.000,00	7.500.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 unit	5 unit	22.200.000,00	11.100.000,00		APBD
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	9,09%	9,09%	610.000,00	300.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,81%	0,81%	610.000,00	300.000,00		
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 unit usaha	1 unit usaha	610.000,00	300.000,00		APBD
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	61,54%	61,54%	73.842.000,00	300.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Kab. Bangka Barat	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4%	4%	73.842.000,00	300.000,00		
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					Kab. Bangka Barat	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 unit usaha	0 unit usaha	72.442.000,00	0,00		APBD
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 unit usaha	20 unit usaha	1.400.000,00	300.000,00		APBD
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	30%	30%	73.970.000,00	300.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	20 unit	20 unit	73.970.000,00	300.000,00		
2	17	4	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 unit usaha	20 unit usaha	2.000.000,00	300.000,00		APBD
2	17	4	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	25 unit usaha	0 unit usaha	71.970.000,00	0,00		APBD
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75,00%	75,00%	126.890.000,00	28.800.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75,00%	75,00%	126.890.000,00	28.800.000,00		
2	17	5	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Kab. Bangka Barat	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	25 orang	126.890.000,00	28.800.000,00		APBD
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	52,46%	0,00%	150.020.000,00	0,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Persentase Koperasi yang di berdayaan dan memperoleh Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	52,46%	0,00%	150.020.000,00	0,00		
2	17	6	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	120 unit usaha	0 unit usaha	150.020.000,00	0,00		APBD
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	4%	4%	173.586.000,00	35.740.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Kab. Bangka Barat	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	173.586.000,00	35.740.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	17	7	2.01	0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 unit usaha	0 unit usaha	50.790.000,00	0,00		APBD
2	17	7	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					Kab. Bangka Barat	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 unit usaha	0 unit usaha	62.220.000,00	0,00		APBD
2	17	7	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 unit usaha	50 unit usaha	60.576.000,00	35.740.000,00		APBD
2	17	7	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata						APBD
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	3,45%	3,45%	854.050.000,00	437.150.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					Kab. Bangka Barat	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	0,20%	0,20%	854.050.000,00	437.150.000,00		
2	17	8	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	154 unit usaha	129 unit usaha	854.050.000,00	437.150.000,00		APBD, Musren Kec dan Reses
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									6.600.249.000,00	6.428.088.872,00		
					DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									6.600.249.000,00	6.428.088.872,00		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.452.060.000,00	6.130.869.372,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	750.000,00		
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4.100.900.000,00	5.121.402.522,00		
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	4.100.000.000,00	5.120.952.522,00		APBD
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	150.000,00		
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	300.000,00		
2	07	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	300.000,00		APBD
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	67.800.000,00	150.000,00		
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	52.500.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	0 orang	7.500.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	0 orang	7.500.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	472.900.000,00	270.436.850,00		
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	37.576.850,00		APBD
2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	5.110.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.600.000,00	40.300.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	65.000.000,00	32.500.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	125.000.000,00		APBD
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	450.000,00		APBD
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	30.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	0,00		DAK Fisik
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	0 unit	10.000.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	10.000.000,00	0,00		APBD
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	740.290.000,00	711.870.000,00		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	78.600.000,00	78.600.000,00		APBD
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	652.690.000,00	628.770.000,00		APBD
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	38.070.000,00	25.810.000,00		
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	5.750.000,00	5.750.000,00		APBD
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	10.000.000,00	8.900.000,00		APBD
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12 unit	12 unit	7.320.000,00	3.660.000,00		APBD
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	15.000.000,00	7.500.000,00		APBD
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.141 Milyar Rupiah		Persentase peningkatan layanan penanaman modal	7,05 persen	7,05 persen	130.000.000,00	204.757.500,00	PN 5	
2	18	02	01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota						Persentase perusahaan yang mendapatkan Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100 persen	100 persen	10.000.000,00	204.757.500,00		
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					DPMNAKERTRANS	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	204.757.500,00		APBD
2	18	02	2.02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	0 dokumen	120.000.000,00	0,00		
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					DPMNAKERTRANS	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	120.000.000,00	0,00		APBD
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.141 Milyar Rupiah		Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	74 persen	0 persen	826.639.000,00	0,00	PN 5	
2	18	03	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota						Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	0 kali	826.639.000,00	0,00		
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota					DPMNAKERTRANS	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	0 dokumen	5.000.000,00	0,00		APBD
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					DPMNAKERTRANS	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 dokumen	821.639.000,00	0,00		APBD
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.141 Milyar Rupiah		Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	82 Indeks	82 Indeks	141.550.000,00	65.040.000,00	PN 5	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	18	04	2.01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota						jumlah perizinan berusaha bersesiko yang dikeluarkan	1050 izin	1050 izin	141.550.000,00	65.040.000,00		
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinana berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik					DPMNAKERTRANS	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem perizinana berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	700 pelaku usaha	500 pelaku usaha	70.000.000,00	21.842.500,00		APBD
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan Analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko					DPMNAKERTRANS	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	45 kegiatan usaha	45 kegiatan usaha	71.550.000,00	43.197.500,00		APBD
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.141 Milyar Rupiah		Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	27 persen	27 persen	50.000.000,00	27.422.000,00	PN 5	
2	18	05	2.01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota						Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1 aporan	1 laporan	50.000.000,00	27.422.000,00		
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					pelaku usaha dan perusahaan yg ada dibangka barat	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	125 kegiatan Usaha.	10 kegiatan Usaha.	11.500.000,00	7.185.000,00		APBD
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					pelaku usaha dan perusahaan yg ada dibangka barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	230 pelaku usaha	14 pelaku usaha	27.000.000,00	14.156.000,00		APBD
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal					pelaku usaha dan perusahaan yg ada dibangka barat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	125 kegiatan Usaha.	6 kegiatan Usaha.	11.500.000,00	6.081.000,00		APBD
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA									6.784.475.000,00	3.003.313.000,00		
					DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA									6.784.475.000,00	3.003.313.000,00		
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kemudaan	50%	50%	525.000.000,00	83.313.000,00	PN 8	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						Jumlah keikutsertaan pemuda dalam paskibraka tingkat provinsi	3 orang	3 orang	525.000.000,00	83.313.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	80 orang	60 orang	150.000.000,00	43.313.000,00		
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00		
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3 Kegiatan	3 Kegiatan	350.000.000,00	15.000.000,00		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,15		Pencab Aktif	30	30	5.959.475.000,00	2.870.000.000,00	PN 4	
								Prevalensi Stunting	5,52%								
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	2 event	1.689.475.000,00	1.250.000.000,00		
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000.000,00	1.200.000.000,00		APBD
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	389.475.000,00	50.000.000,00		APBD
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	2 Cabor	650.000.000,00	500.000.000,00		
2	19	03	2.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8 Cabor	8 Cabor	500.000.000,00	400.000.000,00		APBD
2	19	03	2.03	0008	Pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga						Jumlah penerima Penghargaan olahraga	20 orang	20 orang	150.000.000,00	100.000.000,00		APBD
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi	50%	50%	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00		APBD
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 cabang	3 cabang	620.000.000,00	120.000.000,00		
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional						Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00		APBD
																	APBD
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	21 Unit	10 Unit	320.000.000,00	20.000.000,00		APBD dan Reses
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	8	8	300.000.000,00	50.000.000,00	PN 8	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						Jumlah gugus depan pramuka yang aktif	80 gugus depan	80 gugus depan	300.000.000,00	50.000.000,00		
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	50.000.000,00		APBD
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									270.000.000,00	235.870.000,00		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									270.000.000,00	235.870.000,00		
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		cakupan data statistik yang terpenuhi	80%	80%	270.000.000,00	235.870.000,00	PN 7	
2	20	02	2	01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan daerah Kabupaten/Kota						Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	80%	80%	270.000.000,00	235.870.000,00		
2	20	02	2	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	40 orang	20 orang	20.000.000,00	11.585.000,00		APBD
2	20	02	2	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral						Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	20 persen	15 persen	50.000.000,00	91.370.000,00		APBD
2	20	02	2	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia						Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	3 dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	80.930.000,00		APBD
2	20	02	2	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	51.985.000,00		APBD
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									150.000.000,00	60.320.000,00		
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									150.000.000,00	60.320.000,00		
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam jaringan Komunikasi Sandi yang aman	80%	80%	150.000.000,00	60.320.000,00	PN 7	
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang mempunyai keamanan informasi	13,79%	13,79%	100.000.000,00	48.150.000,00		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	24.075.000,00		APBD
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi komunikasi, dll)	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50.000.000,00	24.075.000,00		APBD
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang mempunyai akun Government Secured Intramail	4 OPD	4 OPD	50.000.000,00	12.170.000,00		
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	50.000.000,00	12.170.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									7.052.590.359,00	6.355.662.680,00		
					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									7.052.590.359,00	6.355.662.680,00		Parbud
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.773.969.288,00	5.491.015.538,00		
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Disbudpar	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	550.000,00		APBD
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Disbudpar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	100.000,00		APBD
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Disbudpar	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	100.000,00		APBD
2	22	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Disbudpar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	100.000,00		APBD
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Disbudpar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	100.000,00		APBD
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Disbudpar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Disbudpar	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.511.189.288,00	4.585.259.288,00		APBD
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Disbudpar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	33 Orang/Bulan	3.510.289.288,00	4.584.889.288,00		APBD
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Disbudpar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	75.000,00		APBD
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Disbudpar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	125.000,00		APBD
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Disbudpar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	170.000,00		APBD
2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Disbudpar	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	300.000,00		APBD
2	22	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Disbudpar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	300.000,00		APBD
2	22	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Disbudpar	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	55.120.000,00	45.725.000,00		APBD
2	22	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Disbudpar	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	55.120.000,00	45.725.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Disbudpar	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	110.550.000,00	300.000,00		APBD
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Disbudpar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Paket	90.000.000,00			APBD
2	22	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Disbudpar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	300.000,00		APBD
2	22	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Disbudpar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	orang	6.750.000,00			APBD
2	22	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Disbudpar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 Orang	Orang	13.500.000,00			APBD
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Disbudpar	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	444.900.000,00	242.766.250,00		APBD
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Disbudpar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.484.500,00		APBD
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Disbudpar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket	15.000.000,00	0,00		APBD
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Disbudpar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	1.177.500,00		APBD
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Disbudpar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.600.000,00	40.127.500,00		APBD
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Disbudpar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	24.500.000,00		APBD
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Disbudpar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	990.000,00		APBD
2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material					Disbudpar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	49.486.750,00		APBD
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Disbudpar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	125.000.000,00		APBD
2	22	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Disbudpar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Dokumen	300.000,00	0,00		APBD
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen	100 persen	10.000.000,00	0,00		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mobil Operasional atau Lapangan						Jumlah Mobil Operasional yang Disediakan			0,00	0,00		
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0,00	0,00		APBD
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	5.000.000,00	0,00		APBD
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	unit	5.000.000,00	0,00		APBD
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Disbudpar	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	601.460.000,00	595.600.000,00		APBD
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	100.000,00		APBD
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.800.000,00	69.840.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
2	22	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Disbudpar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	522.660.000,00	522.660.000,00		APBD
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Disbudpar	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	38.950.000,00	20.515.000,00		APBD
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Disbudpar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	9.800.000,00	8.440.000,00		APBD
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Disbudpar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	7.500.000,00		APBD
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Disbudpar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	9.150.000,00	4.575.000,00		APBD
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Disbudpar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Unit	5.000.000,00	0,00		APBD
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Cakupan Objek Kebudayaan yang Dikembangkan	15,13%	2,63%	977.871.071,00	325.537.142,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Objek Kebudayaan yang Difasilitasi	25 Objek	4 Objek	895.000.000,00	249.080.000,00		APBD
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Disbudpar	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30 Objek	4 Objek	875.000.000,00	235.640.000,00		APBD & Musren Kec
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan					Disbudpar	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	13.440.000,00		APBD
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Disbudpar	Fasilitasi Atas Pelaku Seni Berprestasi	20 Ceremoni	Ceremoni	0,00	0,00		APBD
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Disbudpar	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			0,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	1 Lembaga Adat	1 Lembaga Adat	82.871.071,00	76.457.142,00		APBD
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat					Disbudpar	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	34 Orang	34 Orang	82.871.071,00	76.457.142,00		APBD
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang Dilaksanakan Sebagai Ajang Promosi Daerah	4	1	100.000.000,00	55.000.000,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Fasilitas Kesenian Kepada Masyarakat pada Tahun n	1	1	100.000.000,00	55.000.000,00		APBD
2	22	03	2.01	02	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Disbudpar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			0,00	0,00		APBD
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					Disbudpar	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	55.000.000,00		APBD
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Jumlah Kekayaan Sejarah Lokal yang Dikelola dan atau Dipublikasi	3	1	139.000.000,00	6.000.000,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang Dilakukan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	139.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	300 Orang	Orang	87.000.000,00	0,00		APBD
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					Disbudpar	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	52.000.000,00	6.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	44,44%	46,43%	803.000.000,00	281.060.000,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	Objek	103.000.000,00	0,00		APBD
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					Disbudpar	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	Objek	12.000.000,00	0,00		APBD
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya					Disbudpar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	Objek	91.000.000,00	0,00		APBD
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	13 Objek	700.000.000,00	281.060.000,00		APBD
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya					Disbudpar	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	13 Objek	700.000.000,00	281.060.000,00		APBD
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Persentase Museum dalam Kondisi Baik	100%	100%	258.750.000,00	197.050.000,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Museum yang Dikelola	100%	100%	258.750.000,00	197.050.000,00		APBD
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu					Disbudpar	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	20.000.000,00		APBD
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman					Disbudpar	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	7 Orang	7 Orang	210.190.000,00	164.490.000,00		APBD
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum					Disbudpar	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum					Disbudpar	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	12 Unit	7.560.000,00	6.560.000,00		APBD
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									6.412.386.000,00	6.432.512.842,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									6.412.386.000,00	6.432.512.842,00		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.728.666.000,00	5.619.546.842,00	PN 7	
2	23	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	350.000,00		
2	23	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.070.900.000,00	3.565.210.000,00		
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.070.000.000,00	3.565.000.000,00		APBD
2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	70.000,00		APBD
2	23	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	70.000,00		APBD
23	01	2.05			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	70.000,00		
2	22	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	70.000,00		APBD
23	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	80.400.000,00	70.000,00		
2	22	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	62.850.000,00	0,00		APBD
2	22	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	70.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	22	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	23 orang	5.750.000,00	0,00		APBD
2	22	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	23 orang	11.500.000,00	0,00		APBD
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	657.900.000,00	412.070.000,00		
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	25.000.000,00	0,00		APBD
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000,00	7.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	80.600.000,00	47.410.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000,00	31.645.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	2.640.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	65.000.000,00	107.225.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	210.000.000,00		APBD
2	23	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.771.170.000,00	1.572.066.842,00		
2	23	01	2.08	0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.750.000,00		APBD
2	23	01	2.08	0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	396.126.842,00		APBD
2	23	01	2.08	0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.920.000,00		APBD
2	23	01	2.08	0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.312.170.000,00	1.167.270.000,00		APBD
2	23	01	2.09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	33.326.000,00	0,00		
2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket mebel yang disediakan	15 unit	unit	15.000.000,00	0,00		APBD
2	23	01	2.09	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	unit	5.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	23	01	2.10	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	13.326.000,00	0,00		APBD
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	113.170.000,00	69.710.000,00		
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 unit	4 unit	36.330.000,00	29.710.000,00		APBD
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	44 unit	44 unit	26.840.000,00	20.000.000,00		APBD
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	0 unit	30.000.000,00	0,00		APBD
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,5		Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	46,84%	16,94%	534.420.000,00	662.816.000,00	PN 4	
								Harapan Lama Sekolah	11,81		Akreditasi perpustakaan daerah	B	B				
								Persentase Sekolah Terakreditasi A	25,95%		Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	15,38%	8,00%				
											Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10,43%	10,43%				
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	197.750.000,00	265.919.120,00		
											Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi minimal B	31	31				
											Jumlah perpustakaan Desa yang terakreditasi minimal B	11	4				
										Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 eksemplar	0 eksemplar	0,00	0,00		APBD
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	37 perpustakaan	perpustakaan	0,00	0,00		APBD
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	1 perpustakaan	45.000.000,00	22.580.000,00		APBD
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 orang	0 orang	0,00	0,00		APBD
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	13 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00		APBD
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.845 Eksemplar	600 Eksemplar	147.750.000,00	60.920.000,00		APBD dan Musren Kec

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		100 Eksemplar		172.089.120,00		DAK Non Fisik
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		1 Perpustakaan		7.830.000,00		DAK Non Fisik
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan sekolah	4,35 Persen	2,17 Persen	336.670.000,00	396.896.880,00		
											masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan promosi budaya baca	1.400 orang	700 orang				
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00		APBD
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 perpustakaan	1 perpustakaan	235.000.000,00	75.850.000,00		APBD, Reses, dan Musren Kec
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0 perpustakaan	1 perpustakaan	0,00	19.990.970,00		DAK Non Fisik
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Membaca Gemar						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	600 orang	0,00	111.630.660,00		DAK Non Fisik
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus	7 Lokus	101.670.000,00	189.425.250,00		APBD dan DAK Non Fisik
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpusnas	4	4	149.300.000,00	150.150.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya naskah kuno yang dapat dijadikan referensi dan daya tarik wisata pendidikan di perpustakaan daerah	4	4	69.300.000,00	130.150.000,00		
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	120 orang	120 orang	69.300.000,00	130.150.000,00		APBD dan DAK Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	23	03	2,02		Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Ketersediaan keragaman bahan pustaka koleksi budaya etnis nusantara di perpustakaan daerah	30 Eksemplar	30 Eksemplar	80.000.000,00	20.000.000,00		
2	23	03	2,02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	30 eksemplar	30 eksemplar	80.000.000,00	20.000.000,00		APBD
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									626.620.000,00	257.578.300,00		
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									626.620.000,00	257.578.300,00		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	83.33 Persen	83.33 Persen	540.220.000,00	206.890.900,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	7.69 Persen	7.69 Persen				
								Maturitas SPIP	Berkembang		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100 Persen	100 Persen				
								Indeks SPBE	Baik		Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	100 Persen	100 Persen				
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
2	24	02	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya kualitas tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	62 Persen	62 Persen	160.000.000,00	54.898.600,00		
2	24	02	2,01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	600 berkas	600 berkas	5.000.000,00	1.500.000,00		APBD
2	24	02	2,01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	3000 berkas	3000 berkas	75.000.000,00	46.238.600,00		APBD
2	24	02	2,01	0003	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	7.160.000,00		APBD
2	24	02	2,02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						Persentase jumlah arsip statis daerah tingkat Kabupaten yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	100 Persen	100 Persen	130.000.000,00	66.699.900,00		
2	24	02	2,02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI						Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	1 Arsip	1 Arsip	30.000.000,00	3.200.000,00		
2	24	02	2,02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Presertasi, dan Akses Arsip Statis						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip	100 Arsip	100.000.000,00	63.499.900,00		
2	24	02	2,03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota						Meningkatnya sistem pelayanan kearsipan berbasis informasi teknologi dan komunikasi	31 OPD	31 OPD	250.220.000,00	85.292.400,00		
2	24	02	2,03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7 pengguna	7 pengguna	300.000,00	300.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	3 Laporan	249.920.000,00	84.992.400,00		APBD dan Musren Kec
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	-	-	71.100.000,00	37.937.400,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	-	-				
								Maturitas SPIP	Berkembang		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	5,26	5,26				
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui penyusunan JRA	15 Persen	15 Persen	800.000,00	650.000,00		
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 arsip	100 arsip	500.000,00	350.000,00		APBD
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 berkas	100 berkas	300.000,00	300.000,00		APBD
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						Tersedianya Daftar Pencarian Arsip (DPA) arsip statis/sejarah peembentukan Kabupaten Bangka Barat	100%	100%	30.300.000,00	18.384.900,00		
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 arsip	5 arsip	30.000.000,00	18.234.900,00		APBD
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	5 arsip	5 arsip	300.000,00	150.000,00		APBD
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						Meningkatnya kualitas penilaian dan penetapan arsip statis daerah yang dinyatakan hilang yang sesuai dengan NSPK	1 Tema	1 Tema	40.000.000,00	18.902.500,00		
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan hilang						Jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	3 arsip	3 arsip	20.000.000,00	16.205.000,00		APBD
2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 arsip	3 arsip	20.000.000,00	2.697.500,00		APBD
2	24	03			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan	12 Kali	12 Kali	15.300.000,00	12.750.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Indeks SPBE	Baik		daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK						
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
2	24	03			Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						Diterbitkannya izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	12 Kali	12 Kali	15.300.000,00	12.750.000,00		
2	24	04	2,01	003	Penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2 SOP	2 SOP	300.000,00	300.000,00		APBD
2	24	04	2,01	004	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 arsip	12 arsip	15.000.000,00	12.450.000,00		APBD
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									23.458.792.200,00	10.931.938.782,00		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									6.455.744.800,00	4.627.872.000,00		
					DINAS PERIKANAN									6.455.744.800,00	4.627.872.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.276.522.000,00	3.508.912.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Babar	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Babar	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Babar	Jumlah Dokumen anggaran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Babar	Jumlah Dokumen perubahan anggaran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Babar	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Babar	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kab. Babar	Persentase pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	2.140.900.000,00	2.699.850.000,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Babar	Gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	15 orang/bulan	15 orang/bulan	2.140.000.000,00	2.699.400.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Babar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Babar	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Babar	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kab. Babar	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	300.000,00	150.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Babar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kab. Babar	Persentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	46.050.000,00	150.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Babar	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	0 Paket	38.250.000,00	0,00		
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Babar	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang dikelola	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					Kab. Babar	Jumlah Sumberdaya ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15 orang	0 orang	3.750.000,00	0,00		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Kab. Babar	Jumlah Sumberdaya ASN yang mengikuti Implementasi Peraturan Perundang Undangan	15 orang	0 orang	3.750.000,00	0,00		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kab. Babar	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	512.600.000,00	266.000.000,00		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Babar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Babar	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00		
					Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia					Kab. Babar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Babar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.600.000,00	40.000.000,00		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Babar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Babar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		
					Penyediaan Bahan/Material					Kab. Babar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	32.500.000,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Babar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	280.000.000,00	140.000.000,00		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kab. Babar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	20.000.000,00	0,00		
07	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						APBD
					Pengadaan Mebel					Kab. Babar	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Unit	Unit	8.000.000,00			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Babar	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0 Unit	12.000.000,00	0,00		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
												Tolok Ukur	Target RKPD INDIUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Babar	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	534.852.000,00	530.352.000,00		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Babar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Babar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	83.652.000,00	83.652.000,00		
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Babar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Babar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	442.200.000,00	442.200.000,00		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Babar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	20.320.000,00	11.660.000,00		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Babar	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang terpelihara	12 UNIT	12 UNIT	3.000.000,00	3.000.000,00		
						Pemeliharaan Mebel					Kab. Babar	Jumlah Mebel yang terpelihara						
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kab. Babar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Babar	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	2.500.000,00		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Babar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	12 Unit	6 Unit	7.320.000,00	3.660.000,00		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Babar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	2.500.000,00		
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Babar	Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)	57.754 Ton / Tahun	57.754 Ton / Tahun	1.949.850.000,00	597.300.000,00	PN 2	
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%										
							Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%										
							Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%										
3	25	03	2.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	9%	9%	1.664.850.000,00	594.800.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap					Kab. Babar	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1.859 UNIT	866 UNIT	416.850.000,00	249.800.000,00		Musren Kec dan Reses
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		207 UNIT		345.000.000,00		
3	25	03	2.01	0000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					Kab. Babar	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			0,00	0,00		
3	25	03	2.01	0000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap					Kab. Babar	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	39 UNIT	UNIT	1.248.000.000,00			Musren Kec dan Reses
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Babar	Jumlah Kelompok Nelayan Nelayan yang dibina	12 KUB	0 KUB	280.000.000,00	0,00		
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					Kab. Babar	Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat Kapasitasnya	35 ORANG	0 ORANG	260.000.000,00	0,00		
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					Kab. Babar	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	20 KELOMPOK	0 KELOMPOK	20.000.000,00	0,00		
3	25	03	2.02	0000	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					Kab. Babar	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 UNIT USAHA	0 UNIT USAHA	0,00	0,00		
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					Kab. Babar	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100%	100%	5.000.000,00	2.500.000,00		
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					Kab. Babar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 LAYANAN	1 LAYANAN	5.000.000,00	2.500.000,00		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Babar	Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)	315,95 Ton/tahun	315,95 Ton/tahun	737.572.800,00	181.405.000,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil						Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	10%	0%	145.000.000,00	0,00		
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil					Kab. Babar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 KELOMPOK	0 KELOMPOK	25.000.000,00	0,00		
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil					Kab. Babar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 KELOMPOK	0 KELOMPOK	15.000.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					Kab. Babar	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	0 Kelompok	105.000.000,00	0,00		APBD & Musren Kec
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	10%	10%	592.572.800,00	181.405.000,00		
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 DOKUMEN	0 DOKUMEN	86.727.800,00	0,00		
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 UNIT	1 UNIT	93.000.000,00	83.790.000,00		
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	15.000.000,00	14.250.000,00		
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota						Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	10 unit	6 unit	397.845.000,00	83.365.000,00		Musren Kec dan Reses
3	25	04	2.04	0000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 ORANG	0 ORANG	0,00	0,00		
3	25	04	2.04	0000	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0 Ha	0 Ha		0,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	100%	100%	200.000.000,00	170.200.000,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						Persentase hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya di wilayah sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	100%	100%	200.000.000,00	170.200.000,00		
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	100.000.000,00	85.100.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	100.000.000,00	85.100.000,00		
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian,	7%		Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23%	23%	291.800.000,00	170.055.000,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	18%	18%	150.000.000,00	100.255.000,00		
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 DOKUMEN	2 DOKUMEN	150.000.000,00	100.255.000,00		
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	18%	0%	15.000.000,00	0,00		
3	25	06	2.02	0006	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 UNIT USAHA	0 UNIT USAHA	15.000.000,00	0,00		
					Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase peningkatan ketersediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	100%	100%	126.800.000,00	69.800.000,00		
					Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	126.800.000,00	69.800.000,00		Musren Kec dan Reses
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									3.620.069.500,00	2.358.798.400,00		
					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									3.620.069.500,00	2.358.798.400,00		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	9 DTW	8 DTW	2.905.069.500,00	2.331.078.400,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	10 DTW	1 DTW	640.000.000,00	152.836.730,00		APBD
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)						APBD
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Dokumen	50.000.000,00			APBD
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	1 Lokasi	590.000.000,00	152.836.730,00		APBD
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Destinasi yang Dikelola	1 Destinasi	1 Destinasi	2.240.069.500,00	2.178.241.670,00		APBD
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	190 Unit	130 Unit	823.689.500,00	761.861.670,00		APBD
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	3 Lokasi	1.416.380.000,00	1.416.380.000,00		APBD
3	26	02	2.04		Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota					Disbudpar	Pengelolaan Data Pelaku Usaha Pariwisata Daerah	21,43%	0,00%	25.000.000,00	0,00		APBD
3	26	02	2	11	Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata di Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Usaha yang Bersedia Memenuhi Standar Usaha	1 Laporan	Laporan	25.000.000,00	0,00		APBD
3	26	02			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	50.000	500 orang	560.000.000,00	16.725.000,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Paket Wisata yang Dipasarkan	12 Paket Wisata	1 Paket Wisata	560.000.000,00	16.725.000,00		APBD
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri					Disbudpar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Dokumen	17.500.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Disbudpar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	1 Laporan	477.500.000,00	16.725.000,00		APBD
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri					Disbudpar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Dokumen	65.000.000,00	0,00		APBD
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri					Disbudpar	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						APBD
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan HaKI	100%	100%	50.000.000,00	10.995.000,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					Disbudpar	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif	40 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	10.995.000,00		APBD
3	26	4	2.02	01	Fasilitasi Kekayaan Intelektual					Disbudpar	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	Dokumen	50.000.000,00	0,00		APBD
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual						Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		10 Dokumen		10.995.000,00		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Disbudpar	Persentase Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100%	0%	105.000.000,00	0,00	PN 3	APBD
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					Disbudpar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	40	0	105.000.000,00	0,00		APBD
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					Disbudpar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Laporan	10.000.000,00	0,00		APBD
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Disbudpar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	Orang	50.000.000,00	0,00		APBD
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					Disbudpar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	Orang	45.000.000,00	0,00		APBD
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									3.267.000.000,00	845.004.532,00		
					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN									3.267.000.000,00	845.004.532,00		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	5%	5%	545.000.000,00	228.828.032,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						Tersedianya sarpras pertanian untuk dikembangkan	6 kecamatan	0 kecamatan	125.000.000,00	0,00		
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00		APBD
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	0,00		APBD
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100%	100%	275.000.000,00	95.362.332,00		
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	4.004.000,00		APBD
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	91.358.332,00		APBD
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					Kab. Bangka Barat	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 VUB (Varietas Unggul Baru)	0 VUB (Varietas Unggul Baru)	150.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						persentase peningkatan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	100%	100%	20.000.000,00	38.410.000,00		
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		1 Laporan	0,00	18.480.000,00		APBD
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.930.000,00		APBD
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						pelaksanaan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 bulan	12 bulan	125.000.000,00	95.055.700,00		
											jumlah luasan pakan tambahan ternak yang tgersedia	1 Ha	1 Ha				
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					Kab. Bangka Barat	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 ton	0,5 ton	125.000.000,00	95.055.700,00		APBD
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	2%	2%	1.962.000.000,00	0,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						Optimalisasi Prasarana pertanian			0,00	0,00		
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			0,00	0,00		APBD
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B					Kab. Bangka Barat	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			0,00	0,00		APBD
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			0,00	0,00		APBD
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			0,00	0,00		APBD
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						persentase pembangunan prasarana pertanian	100%	0%	1.962.000.000,00	0,00		
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					Desa Ibul	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	0 Unit	1.542.000.000,00	0,00		APBD, Musren Kec, dan Reses
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					Ds. Bukit terak	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	420.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						jumlah dokumen pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten			0,00	0,00		
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			0,00	0,00		APBD
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	100%	100%	200.000.000,00	141.160.500,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen pemetaan penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah kabupaten bangka barat	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	141.160.500,00		
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					Kab. Bangka Barat	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	67.364.800,00		APBD
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					Kab. Bangka Barat	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 wilayah	1 wilayah	150.000.000,00	73.795.700,00		APBD
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			0,00	0,00		
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM					Kab. Bangka Barat	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM			0,00	0,00		APBD
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah data pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Kab. Babar			0,00	0,00		
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner						DAK NF
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						jumlah kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			0,00	0,00		
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan					Kab. Bangka Barat	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik						APBD
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						jumlah kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			0,00	0,00		
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha					Kab. Bangka Barat	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan						APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	30%	30%	250.000.000,00	94.556.000,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100%	100%	250.000.000,00	94.556.000,00		
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	350 Ha	150 Ha	250.000.000,00	94.556.000,00		APBD
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase pengendalian izin usaha pertanian	100%	100%	50.000.000,00	5.000.000,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	50.000.000,00	5.000.000,00		
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian					Kab. Bangka Barat	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	5.000.000,00		APBD
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	100%	100%	260.000.000,00	375.460.000,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						jumlah pelaksanaan penyuluhan	1 kelembagaan	1 kelembagaan	260.000.000,00	375.460.000,00		
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	66 Unit	66 Unit	30.000.000,00	15.670.000,00		APBD
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	10.165.000,00		APBD
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	21.110.000,00		APBD
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	36.675.000,00		APBD
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	0 Unit	40.000.000,00	0,00		APBD
3	27	07	2.01	0000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian						Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		64 orang		291.840.000,00		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									495.000.000,00	71.553.300,00		
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									495.000.000,00	71.553.300,00		
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%		Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	6	6	495.000.000,00	71.553.300,00	PN 2	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	495.000.000,00	71.553.300,00		
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	3 Desa	0 Desa	45.000.000,00	0,00		APBD
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	dokumen	350.000.000,00	0,00		APBD
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	3.354,01 Hektar	3.354,01 Hektar	100.000.000,00	71.553.300,00		APBD
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									9.020.977.900,00	2.608.720.550,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN									9.020.977.900,00	2.608.720.550,00		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	100%	100%	350.000,00	299.950,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Kab. Bangka Barat	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1%	1%	350.000,00	299.950,00		
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000,00	299.950,00		APBD
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	83,33%	83,33%	7.419.795.900,00	1.798.473.400,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 unit	1 unit	7.419.795.900,00	1.798.473.400,00		
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit	3 unit	6.664.000.000,00	1.082.729.000,00		APBD
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	6 unit	755.795.900,00	715.744.400,00		APBD
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3,90%	3,90%	1.018.240.000,00	680.221.200,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	1.017.890.000,00	679.921.250,00		
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	7.910.000,00	7.910.000,00		APBD
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.009.980.000,00	672.011.250,00		APBD
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	350.000,00	299.950,00		
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	299.950,00		APBD
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	20%	0%	369.000.000,00	0,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kali	0 kali	369.000.000,00	0,00		
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	0 pelaku usaha	300.000.000,00	0,00		APBD
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	0 pelaku usaha	69.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	100%	100%	163.592.000,00	129.726.000,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					Kab. Bangka Barat	Persentase pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	100%	163.592.000,00	129.726.000,00		
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					Kab. Bangka Barat	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	540 unit	540 unit	101.832.000,00	72.182.000,00		APBD
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	80 orang	80 orang	61.760.000,00	57.544.000,00		APBD
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	PERSENTASE PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (9 BAHAN POKOK)	100 persen	0 persen	50.000.000,00	0,00	PN 3	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					Kab. Bangka Barat	Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	5 jumlah	0 jumlah	50.000.000,00	0,00		
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	0 UMKM	50.000.000,00	0,00		
3	30	07	2.01	0000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	0 UMKM	0 UMKM	0,00	0,00		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									600.000.000,00	419.990.000,00		
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA									600.000.000,00	419.990.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Jumlah Sentra IKM	1 sentra	1 sentra	450.000.000,00	303.915.000,00	PN 5	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	450.000.000,00	303.915.000,00		
3	31	02	2.01	0000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						APBD
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	172.290.000,00		APBD
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	131.625.000,00		APBD
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	100%	100%	100.000.000,00	79.175.000,00	PN 5	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terbit	100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	79.175.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	32.950.000,00		APBD
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)					Kab. Bangka Barat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	46.225.000,00		APBD
3	31	04	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkatan Perekonomian dan Investasi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	7%	Kab. Bangka Barat	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	50%	50%	50.000.000,00	36.900.000,00	PN 5	
								Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	4,86%								
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,42%								
								Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	28,22%								
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	6 kali	6 kali	50.000.000,00	36.900.000,00		
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	36.900.000,00		APBD
3	31	04	2.01	0000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									108.419.453.043,91	83.475.240.602,96		
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									108.419.453.043,91	83.475.240.602,96		
					SEKRETARIAT DAERAH									37.789.791.500,00	34.135.614.960,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	27.726.452.000,00	28.335.012.760,00	PN 7	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	750.000,00		
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	10.482.421.700,00	10.194.171.700,00		
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/Bulan	72 orang/Bulan	10.481.521.700,00	10.193.721.700,00		
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.03	0003	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	249.150.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Paket	194.850.000,00	0,00		
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	orang	18.000.000,00	0,00		
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	orang	36.000.000,00	0,00		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	3.534.550.000,00	2.917.876.768,00		
4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	35.000.000,00		
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	96.000.000,00		
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	118.000.000,00	109.590.000,00		
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	987.250.000,00	1.278.490.000,00		
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	159.000.000,00		
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	39.000.000,00	30.847.000,00		
4	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	420.000.000,00	376.299.768,00		
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.665.000.000,00	832.500.000,00		
4	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.654.410.000,00	5.419.160.000,00		
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	900.000.000,00	800.000.000,00		
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan	1 laporan	150.000.000,00	140.000.000,00		
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	4.602.410.000,00	4.478.160.000,00		
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.630.000.000,00	1.825.000.000,00		
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 Unit	2 Unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			0,00	0,00		
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 unit	10.000.000,00	220.000.000,00		
4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	1 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.330.180.000,00	3.785.446.292,00		
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	205.850.000,00	207.115.400,00		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	50 unit	940.800.000,00	999.234.085,00		
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	35.950.000,00	37.310.000,00		
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	7 unit	1.100.000.000,00	2.220.000.000,00		
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	78 unit	250 unit	47.580.000,00	321.786.807,00		
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Terpenuhinya administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	809.660.000,00	926.317.000,00		
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	200.000.000,00	382.657.000,00		
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 paket	20 paket	77.660.000,00	77.660.000,00		
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	8 orang	132.000.000,00	66.000.000,00		
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	400.000.000,00	400.000.000,00		
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah						Terfasilitasinya Kerumah tanggaan Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	100%	950.000.000,00	1.640.000.000,00		
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	5 paket	400.000.000,00	850.000.000,00		
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	5 paket	350.000.000,00	750.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 paket	5 paket	200.000.000,00	40.000.000,00		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi						Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan	3 kebijakan	3 kebijakan	220.680.300,00	158.491.000,00		
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	2 dokumen	96.360.000,00	72.830.000,00		
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2 laporan	39.775.000,00	27.640.000,00		
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	41.020.000,00	28.730.000,00		
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	1 dokumen	17.063.800,00	12.176.000,00		
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	26.461.500,00	17.115.000,00		
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan	100%	100%	1.863.600.000,00	1.467.500.000,00		
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	1.851.300.000,00	1.455.200.000,00		
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan	12.300.000,00	12.300.000,00		
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%	9.512.339.500,00	5.640.512.200,00	PN 8	
					Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%				PN 7	
							Opini BPK	WTP		Persentase kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%					
							Maturitas SPIP	Berkembang									
							Indeks SPBE	Baik									
							Indeks Profesionalitas ASN	80,00									
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan	6 kebijakan	2 kebijakan	338.062.650,00	155.658.700,00		
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 dokumen	1 dokumen	107.760.500,00	57.315.000,00		
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 dokumen	1 dokumen	30.302.150,00	11.140.000,00		
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 dokumen	4 dokumen	200.000.000,00	87.203.700,00		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan	3 kebijakan	3 kebijakan	8.785.078.850,00	5.346.858.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen	3 dokumen	2.131.835.000,00	1.191.834.000,00		
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	2 dokumen	6.651.469.000,00	4.153.250.000,00		Renja, Musren Kec dan Reses
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	1 dokumen	1.774.850,00	1.774.000,00		
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum	100%	100%	379.198.000,00	134.868.000,00		
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	85 dokumen	85 dokumen	72.723.000,00	70.673.000,00		
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus	75.000.000,00	52.800.000,00		
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 dokumen	1 dokumen	231.475.000,00	11.395.000,00		
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah						Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan	3 kebijakan	3 kebijakan	10.000.000,00	3.127.500,00		
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 dokumen	5 dokumen	10.000.000,00	3.127.500,00		
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Tingkat kematangan UKPBJ	level 5	level 5	551.000.000,00	160.090.000,00	PN 7	
						Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	10,58%		Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	100%				
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	1 kebijakan	434.950.000,00	114.960.000,00		
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	2 dokumen	345.100.000,00	71.300.000,00		
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	4 laporan	83.650.000,00	39.705.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	3.955.000,00		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	1 kebijakan	22.450.000,00	22.450.000,00		
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	1 laporan	6.200.000,00	400.000,00		
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	16.250.000,00	22.050.000,00		
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	3 kebijakan	2 kebijakan	93.600.000,00	22.680.000,00		
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 dokumen	50 dokumen	29.300.000,00	10.650.000,00		
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 dokumen	50 dokumen	29.300.000,00	12.030.000,00		
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	190 orang	orang	35.000.000,00	-		
					SEKRETARIAT DPRD									70.629.661.543,91	49.339.625.642,96		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	30.264.061.205,46	30.325.618.338,96	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.500.000,00	750.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.751.781.092,00	4.583.331.092,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					SEK. DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	22 orang/bulan	2.750.881.092,00	4.582.881.092,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	300.000,00	150.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	91.800.000,00	150.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya					SEK. DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket	0 Paket	73.500.000,00	0,00		
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					SEK. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	0 orang	6.000.000,00	0,00		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					SEK. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	0 orang	12.000.000,00	0,00		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.624.116.525,00	1.778.702.606,00		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					SEK. DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000,00	167.636.193,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					SEK. DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	656.454.000,00	195.027.000,00		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					SEK. DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000,00	111.870.533,00		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					SEK. DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	452.400.000,00	340.459.800,00		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					SEK. DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	731.987.525,00	545.165.974,00		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	75.975.000,00	77.107.500,00		
					Penyediaan Bahan/Material					SEK. DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	360.000.000,00	207.785.606,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	267.000.000,00	133.500.000,00		
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	2.540.921.999,84	2.729.491.999,84		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	798.363.999,84	798.363.999,84		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	35.000.000,00	25.250.000,00		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.705.558.000,00	1.904.878.000,00		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	981.302.000,00	446.870.940,00		
					Pengadaan Mebel					SEK. DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	40 unit	0,00	0,00		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	0,00	0,00		
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	750.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0 unit	0,00	0,00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	231.302.000,00	446.870.940,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	595.494.000,00	359.512.865,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					SEK. DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	104.490.000,00	61.342.000,00		
					Pemeliharaan Mebel					SEK. DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	7 unit	27.750.000,00	19.425.000,00		
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	28.952.000,00	26.360.325,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	354.302.000,00	183.140.540,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	102 unit	102 unit	80.000.000,00	69.245.000,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK. DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 unit	unit	0,00	0,00		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	12 bulan	18.933.985.266,50	18.777.715.425,00		
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	30 orang/bulan	17.482.299.250,00	17.492.530.450,00		
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	190 paket	150 paket	673.186.003,50	506.684.975,00		
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	30 orang	778.500.013,00	778.500.000,00		
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD						Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	1.742.860.322,12	1.648.943.411,12		
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 laporan	4 laporan	980.080.972,00	824.532.319,00		
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	12 paket	762.779.350,12	824.411.092,12		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terintegrasinya Program -- Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	40.365.600.338,45	19.014.007.304,00	PN 7	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100 %	100 %	976.971.661,00	345.860.956,00		
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	10 dokumen	907.387.171,00	324.321.106,00		
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 dokumen	12 dokumen	69.284.490,00	21.539.850,00		
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah					SEK. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	150 orang	0 orang	300.000,00	0,00		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran						Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	175.918.530,00	177.736.208,00		
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	4 dokumen	175.918.530,00	177.736.208,00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	100 %	8.737.270.000,00	5.370.248.000,00		
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 Dokumen		72.478.000,00		
4	02	02	2.04	0003	Pendalaman Tugas DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	6 dokumen	7.225.000.000,00	4.078.000.000,00		
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					SEK. DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 orang	9 orang	381.270.000,00	394.770.000,00		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					SEK. DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	432.000.000,00	460.000.000,00		
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	0 dokumen	144.000.000,00	0,00		
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	12 dokumen	555.000.000,00	365.000.000,00		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	1.449.228.890,00	1.092.629.640,00		
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	1.449.228.890,00	1.092.629.640,00		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD						Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD	100 %	100 %	29.026.211.257,45	12.027.532.500,00		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					SEK. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84 dokumen	84 dokumen	29.026.211.257,45	12.027.532.500,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									154.344.106.961,00	157.133.430.475,00		
5	01				PERENCANAAN									7.226.578.400,00	7.337.652.400,00		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH									7.226.578.400,00	7.337.652.400,00		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang	Nilai SAKIP Opini BPK	70 WTP		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.485.600.000,00	5.745.635.000,00	PN 7	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					KABUPATEN/KOTA	Daerah.	profesional dan akuntabel	Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	1.500.000,00	750.000,00		
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	3.695.900.000,00	4.512.450.000,00		
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/ Bulan	24 orang/ Bulan	3.695.000.000,00	4.512.000.000,00		APBD
5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	300.000,00	150.000,00		
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	68.400.000,00	150.000,00		
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	paket	50.100.000,00	0,00		APBD
5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	orang	6.000.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	orang	12.000.000,00	0,00		APBD
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	882.900.000,00	421.450.000,00		
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	40.000.000,00	0,00		APBD
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000,00	4.000.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	90.600.000,00	45.300.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	60.000.000,00	30.000.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	75.000.000,00	37.500.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	600.000.000,00	300.000.000,00		APBD
5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	0,00	0,00		APBD
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	0 unit				APBD
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit				APBD
5	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit				APBD
5	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 unit	0 unit				APBD
5	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit				APBD
5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	0 unit				APBD
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit				APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	790.740.000,00	785.740.000,00		
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	113.400.000,00	113.400.000,00		APBD
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	8.000.000,00	4.000.000,00		APBD
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	667.340.000,00	667.340.000,00		APBD
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	45.860.000,00	24.945.000,00		
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	4.030.000,00	4.030.000,00		APBD
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0unit	0unit				APBD
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	7.190.000,00	3.595.000,00		APBD
5	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit		0,00		
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	24 unit	24 unit	14.640.000,00	7.320.000,00		APBD
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	100%	100%	1.307.143.400,00	1.146.896.600,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan	100%	100%	1.186.000.000,00	1.061.681.600,00		
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00		APBD
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	200.000.000,00	150.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	01	02	2,01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	986.000.000,00	911.681.600,00		APBD
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100 Persen	100 Persen	54.728.400,00	18.800.000,00		
5	01	02	2,02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 orang	31 orang	54.728.400,00	18.800.000,00		APBD
05	01	02	2,04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun menggunakan aplikasi	100 Persen	100 Persen	6.415.000,00	6.415.000,00		
05	01	02	02,04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.415.000,00	6.415.000,00		APBD
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00		
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 laporan	5 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00		APBD
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00		APBD
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	433.835.000,00	445.120.800,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%				
								Maturitas SPIP	Berkembang		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%				
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan renstra perangkat daerah	100%	100%	115.905.000,00	215.905.000,00		
5	01	03	2,01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	15.005.000,00	15.005.000,00		APBD
5	01	03	2,01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	6.200.000,00	6.200.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	01	03	2,01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 laporan	1 laporan	6.200.000,00	6.200.000,00		APBD
5	01	03	2,01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	30.525.000,00	30.525.000,00		APBD
5	01	03	2,01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	15.050.000,00	15.050.000,00		APBD
5	01	03	2,01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	6.200.000,00	6.200.000,00		APBD
5	01	03	2,01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	6.200.000,00	6.200.000,00		APBD
5	01	03	2,01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	30.525.000,00	130.525.000,00		APBD
5	01	03	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Persentase keselarasan subkegiatan pada renja bidang perekonomian dan SDA dengan Renstra Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	104.741.000,00	8.200.000,00		
5	01	03	2,02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	4.100.000,00		APBD
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	0 laporan	36.386.000,00	0,00		APBD
5	01	03	2,02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	4.100.000,00		APBD
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	0 laporan	55.955.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan renstra perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	213.189.000,00	221.015.800,00		
5	01	03	2,03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	21.200.000,00	16.475.000,00		APBD
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	166.494.000,00	190.965.800,00		APBD
5	01	03	2,03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	6.200.000,00	4.100.000,00		APBD
5	01	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	0 perangkat daerah	0 perangkat daerah	0,00	0,00		APBD
5	01	03	2,03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	19.295.000,00	9.475.000,00		APBD
5	02				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									653.100.000,00	441.656.000,00		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH									653.100.000,00	441.656.000,00		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	100%	100%	653.100.000,00	441.656.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Jumlah Inovasi Daerah	2 Inovasi	2 Inovasi				
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	6 Dokumen	6 Dokumen	8.100.000,00	8.100.000,00		
5	05	02	2,01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	5 Laporan	8.100.000,00	8.100.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	05	02	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	100 Persen	175.000.000,00	75.000.000,00		
5	05	02	2,02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00		APBD
5	05	02	2,02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	Dokumen	100.000.000,00			
5	05	02	2,02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						APBD
5	05	02	2,02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						
5	05	02	2,02	0006	Penelitian dan Pengembangan kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Penelitian	4 Penelitian	350.000.000,00	350.000.000,00		
5	05	02	2,03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
5	05	02	2,03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00		APBD
5	05	02	2,03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan						APBD
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi						Jumlah inovasi daerah	4 inovasi	4 inovasi	120.000.000,00	8.556.000,00		
5	05	02	2,04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						APBD
5	05	02	2,04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	8.556.000,00		APBD
5	03				KEUANGAN									137.596.953.561,00	142.558.792.575,00		
					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									128.982.548.661,00	132.691.108.875,00		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.570.880.000,00	5.864.847.550,00	PN 7	
5	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	750.000,00		
5	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	02	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.700.900.000,00	4.581.850.000,00		
5	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/Bulan	28 orang/Bulan	3.700.000.000,00	4.581.400.000,00		APBD
5	02	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	150.000,00		
5	02	01	2,03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	77.550.000,00	150.000,00		
5	02	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket	55.500.000,00	0,00		APBD
5	02	01	2,05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2,05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 orang	0 orang	7.250.000,00	0,00		APBD
5	02	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 orang	0 orang	14.500.000,00	0,00		APBD
5	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	799.900.000,00	392.747.550,00		
5	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
5	02	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	20.000.000,00	5.000.000,00		
5	02	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	1.500.000,00		APBD
5	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.600.000,00	40.597.550,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	32.500.000,00		APBD
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	567.000.000,00	283.500.000,00		APBD
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	20.000.000,00	0,00		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Unit	10.000.000,00	0,00		
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Unit	10.000.000,00	0,00		
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mobil Operasional						Jumlah Mobil Operasional yang Disediakan			0,00	0,00		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	813.300.000,00	805.610.000,00		
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 laporan	12 laporan	110.000.000,00	110.000.000,00		APBD
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 laporan	12 laporan	694.300.000,00	691.110.000,00		APBD
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	157.430.000,00	83.590.000,00		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	114.990.000,00	64.995.000,00		APBD
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	12.190.000,00	6.095.000,00		APBD
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	15.000.000,00	5.000.000,00		APBD
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	25 unit	25 unit	15.250.000,00	7.500.000,00		APBD
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	100%	100%	123.103.129.511,00	126.584.729.725,00	PN 7	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						Persentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu	100%	100%	743.264.500,00	505.500.000,00		
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	104.150.000,00	59.415.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	02	02	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	107.175.000,00	62.280.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	300.000,00	140.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	300.000,00	140.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	32.550.000,00	27.810.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	31 Dokumen	33.415.000,00	28.560.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	225.719.500,00	163.945.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	230.355.000,00	158.770.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	4.300.000,00		APBD
5	02	02	2,01	0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	31 orang	300.000,00	140.000,00		APBD
5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						Persentase layanan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100%	100%	278.122.511,00	205.780.325,00		
5	02	02	2,02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	1.630.000,00		APBD
5	02	02	2,02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	300.000,00		APBD
5	02	02	2,02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	300.000,00		APBD
5	02	02	2,02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	1.725.000,00		APBD
5	02	02	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	1 laporan	109.973.700,00	70.004.125,00		APBD
5	02	02	2,02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	4 Dokumen	1.775.000,00	1.635.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	02	02	2,02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	1 dokumen	75.823.811,00	46.686.200,00		APBD
5	02	02	2,02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	85 orang	85 orang	83.500.000,00	83.500.000,00		APBD
5	02	02	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	70.176.500,00	40.047.300,00		
5	02	02	2,03	0003	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 dokumen	12 dokumen	1.775.000,00	150.000,00		APBD
5	02	02	2,03	0004	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	2.932.500,00	1.428.700,00		APBD
5	02	02	2,03	0005	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terselenggarakan	1 Laporan	1 Laporan	9.964.000,00	6.863.600,00		APBD
5	02	02	2,03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	53.730.000,00	31.305.000,00		APBD
5	02	02	2,03	0009	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	300.000,00		APBD
5	02	02	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	100%	100%	122.011.566.000,00	125.833.402.100,00		
5	02	02	2,04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah						Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	100.000.000,00	75.000.000,00		APBD
5	02	02	2,04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	1 laporan	115.059.866.000,00	116.068.019.600,00		APBD
5	02	02	2,04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1 laporan	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00		APBD
5	02	02	2,04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	3.851.700.000,00	3.690.382.500,00		APBD
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	308.539.150,00	241.531.600,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5	02	03	2,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						Persentase Laporan BMD yang disusun dengan tepat waktu	100%	100%	308.539.150,00	241.531.600,00		
5	02	03	2,01	0001	Penyusunan Standar Harga						Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.305.000,00	3.027.500,00		APBD
5	02	03	2,01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.015.300,00	1.570.300,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	70.000.000,00		APBD
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	67.657.650,00	56.057.650,00		APBD
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	43.517.000,00	32.492.000,00		APBD
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	4 dokumen	79.130.000,00	71.254.950,00		APBD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	2 laporan	494.200,00	494.200,00		APBD
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	60 orang	9.420.000,00	6.635.000,00		APBD
					BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									8.614.404.900,00	9.867.683.700,00		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	7.796.830.000,00	9.282.788.200,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5.	02.	01	2.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	1.500.000,00	250.000,00		
5.	02.	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat	100%	100%	5.265.400.000,00	7.203.243.200,00		
5.	02.	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	5.264.500.000,00	7.202.643.200,00		
5.	02.	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	200.000,00		
5.	02.	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	200.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5.	02.	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	200.000,00		
5.	02.	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	50.000,00		
5.	02.	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	%	89.550.000,00	0,00		
5.	02.	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	2 Paket	Paket	66.750.000,00	0,00		
5.	02.	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	dokumen	300.000,00	0,00		
5.	02.	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	orang	7.500.000,00	0,00		
5.	02.	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	orang	15.000.000,00	0,00		
5.	02.	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	823.900.000,00	461.865.000,00		
5.	02.	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.500.000,00	6.500.000,00		
5.	02.	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.	02.	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	11.000.000,00	5.950.000,00		
5.	02.	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	110.600.000,00	59.981.000,00		
5.	02.	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	80.000.000,00	38.950.000,00		
5.	02.	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	4.500.000,00	2.500.000,00		
5.	02.	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/ Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	101.000.000,00	82.824.000,00		
5.	02.	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	490.000.000,00	245.000.000,00		
5.	02.	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	300.000,00	160.000,00		
5.	02.	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Presentase terpenuhi Pengadaan Barang	100%	100%	0,00	0,00		
5.	02.	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						
5.	02.	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						
5.	02.	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
5.	02.	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5.	02.	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
5.	02.	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.548.680.000,00	1.559.840.000,00		
5.	02.	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00		
5.	02.	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	386.000.000,00	397.660.000,00		
5.	02.	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	5.000.000,00		
5.	02.	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.152.180.000,00	1.152.180.000,00		
5.	02.	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	67.500.000,00	57.540.000,00		
5.	02.	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	12 unit	43.960.000,00	2.400.000,00		
5.	02.	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	3 unit	15.000.000,00	46.600.000,00		
5.	02.	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	14 unit	8.540.000,00	8.540.000,00		
5.	02.	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	Unit				
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	10,58%		Persentase peningkatan pajak daerah	3,54%	3,54%	817.574.900,00	584.895.500,00	PN 7	
											Persentase peningkatan retribusi daerah	2,93%	2,93%				
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	17 Laporan	17 Laporan	817.574.900,00	584.895.500,00		
											Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	20 Laporan	20 Laporan				
											Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah, Penyelesaian Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	6 Laporan	6 Laporan				
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	77.725.000,00		
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 dokumen	3 dokumen	59.020.000,00	12.844.000,00		
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	46.400.000,00	10.195.000,00		
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	79.793.500,00	21.650.300,00		
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	72.771.100,00	36.900.000,00		
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya	5080 Obyek Pajak	5080 Obyek Pajak	6.200.000,00	150.000,00		
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	10.200.000,00	2.475.000,00		
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	0,00	0,00		
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 dokumen	11 dokumen	135.945.800,00	87.426.500,00		
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	205.710.500,00	179.450.500,00		
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	11.500.000,00	500.000,00		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	58.034.000,00	16.862.400,00		
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	138.716.800,00		
5	04				KEPEGAWAIAN									7.221.850.000,00	6.495.784.500,00		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									7.221.850.000,00	6.495.784.500,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.431.090.000,00	5.495.081.000,00	PN 7	
A					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
2					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
3					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
B					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.605.900.000,00	4.164.850.000,00		
1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/ Bulan	33 orang/ Bulan	3.605.000.000,00	4.164.400.000,00		APBD
2					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
5					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
C					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		
1					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
D					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	86.800.000,00	16.650.000,00		
1					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Unit	10.000.000,00	0,00		APBD
2					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan/atau pakaian khusus hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	2 paket	0 paket	51.750.000,00	0,00		APBD
3					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
4					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	0 Orang	8.250.000,00	0,00		APBD
5					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	0 Orang	16.500.000,00	16.500.000,00		APBD
E					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	666.900.000,00	346.597.000,00		
1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00		APBD
3					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		APBD
4					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.600.000,00	40.300.000,00		APBD
5					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
6					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
7					Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	55.647.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	210.000.000,00		APBD
9					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
F					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Bangka Barat	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	20.000.000,00	0,00		
1					Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	0 unit	10.000.000,00	0,00		APBD
2					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantar Atau Bangunan Lainnya	10 unit	0 unit	10.000.000,00	0,00		APBD
3					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Mobil Operasional yang Disediakan			0,00	0,00		
G					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	950.970.000,00	927.990.000,00		
1					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	250.400.000,00	250.400.000,00		APBD
3					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD
4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	691.570.000,00	673.090.000,00		APBD
H					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	98.720.000,00	38.094.000,00		
2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14 Unit	14 Unit	15.000.000,00	3.424.000,00		APBD
3					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Unit	14.380.000,00	0,00		APBD
4					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1 Unit	37.500.000,00	18.750.000,00		APBD
5					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	22 Unit	26.840.000,00	13.420.000,00		APBD
6					Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	5.000.000,00	2.500.000,00		APBD
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja >76	95,42%	95,42%	1.790.760.000,00	1.000.703.500,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	33 orang	33 orang				
								Maturitas SPIP	Berkembang		Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	82 orang	82 orang				
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	100%	100%	607.485.000,00	201.862.000,00		
5	03	02	2.01	001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000,00	937.500,00		APBD
5	03	02	2.01	002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	887.500,00		APBD
5	03	02	2.01	003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	68.797.500,00		APBD
5	03	02	2.01	004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	200.000,00		APBD
5	03	02	2.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	7.875.000,00	5.207.000,00		APBD
5	03	02	2.01	007	Evaluasi Pemberhentian ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	200.000,00		APBD
5	03	02	2.01	008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	240.000.000,00	13.335.000,00		APBD
5	03	02	2.01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	13.375.000,00	2.257.500,00		APBD
5	03	02	2.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	140.610.000,00	110.040.000,00		APBD
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	92%	92%	361.775.000,00	300.810.000,00		
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.000,00	420.000,00		APBD
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	59.590.000,00		APBD
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000,00	240.800.000,00		APBD
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN						Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%	560.200.000,00	488.228.000,00		
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	20 Orang	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	455.170.500,00		APBD
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	36 Orang	36 Orang	300.000,00	450.000,00		APBD
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	12.657.500,00		APBD
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	7 Orang	7 Orang	300.000,00	17.050.000,00		APBD
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	14 Orang	14 Orang	300.000,00	450.000,00		APBD
5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	450.000,00		APBD
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84%	84%	261.300.000,00	9.803.500,00		
											Persentase Pelayanan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100%				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.923.500,00		APBD
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi ASN						Pelaksanaan pemberian Penghargaan bagi ASN	30 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00		
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	50 Orang	10.100.000,00	6.080.000,00		APBD
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang	30 Orang	300.000,00	450.000,00		APBD
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	450.000,00		APBD
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	450.000,00		APBD
5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	450.000,00		APBD
5	05				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									1.645.625.000,00	299.545.000,00		
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH									1.645.625.000,00	299.545.000,00		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	85,47%	85,47%	1.645.625.000,00	299.545.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	465 Orang	465 Orang				
								Maturitas SPIP	Berkembang		Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	2.092 Orang	2.092 Orang				
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis						Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	100%	895.025.000,00	126.070.000,00		
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	450.000,00		APBD
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1.270 Orang	300 Orang	894.425.000,00	125.170.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	450.000,00		APBD
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	100%	750.600.000,00	173.475.000,00		
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertjabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	450.000,00		APBD
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	172.575.000,00		APBD
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	450.000,00		APBD
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									6.880.099.800,00	7.378.223.000,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									6.880.099.800,00	7.378.223.000,00		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.501.464.800,00	6.007.463.000,00	PN 7	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	750.000,00		
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.194.878.800,00	5.139.450.000,00		
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 org/bln	31 org/bln	4.193.978.800,00	5.139.000.000,00		
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	74.400.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	50.850.000,00	0,00		
6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	31 Orang	0 Orang	7.750.000,00	0,00		
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	0 Orang	15.500.000,00	0,00		
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	616.086.000,00	308.168.000,00		
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.000.000,00		
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.000.000,00		
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	90.600.000,00	45.300.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	30.000.000,00		
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	68.186.000,00	34.093.000,00		
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	180.000.000,00		
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	275.000,00		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	%	10.000.000,00	0,00		
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Pengadaan Mebel yang dilaksanakan	1 unit	unit	10.000.000,00	0,00		
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	550.220.000,00	545.220.000,00		
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	67.200.000,00	67.200.000,00		
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	4.000.000,00		
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	473.020.000,00	473.020.000,00		
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	54.080.000,00	13.575.000,00		
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya, Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	6 Unit	5 Unit	34.930.000,00	4.000.000,00		
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	2 unit	1 unit	10.000.000,00	5.000.000,00		
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	7 Unit	9.150.000,00	4.575.000,00		
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Indeks manajemen resiko	1,90	1,90	1.155.110.000,00	1.153.912.500,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP		Indeks efektivitas pengendalian korupsi	1,3	1,3				
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang sesuai rekomendasi	100%	100%	1.089.325.000,00	1.088.345.000,00		
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	32 Laporan	32 Laporan	165.300.000,00	165.115.000,00		
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						Jumlah laporan hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	18 Laporan	180.200.000,00	180.025.000,00		
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja						Jumlah laporan hasil Reviu laporan kinerja	37 Laporan	37 Laporan	221.500.000,00	221.330.000,00		
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan						Jumlah laporan hasil Reviu laporan keuangan	1 laporan	1 laporan	19.500.000,00	19.375.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa						Jumlah laporan hasil pengawasan desa	22 Laporan	22 Laporan	195.000.000,00	194.825.000,00		
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Tindak	100 dokumen	100 dokumen	307.825.000,00	307.675.000,00		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	100%	100%	65.785.000,00	65.567.500,00		
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang	1 laporan	1 laporan	1.735.000,00	1.667.500,00		
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	10 laporan	10 laporan	64.050.000,00	63.900.000,00		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Level kapabilitas APIP	2+	2+	223.525.000,00	216.847.500,00	PN 7	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi						Level IACM	100%	100%	223.525.000,00	216.847.500,00		
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	13.725.000,00	13.587.500,00		
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	12.250.000,00	12.100.000,00		
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 kegiatan	1 kegiatan	183.825.000,00	177.572.500,00		
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	13.725.000,00	13.587.500,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN									35.486.590.800,00	36.315.460.800,00		
7	01				KECAMATAN MENTOK									13.092.235.000,00	12.926.037.000,00		
					KECAMATAN									8.537.955.000,00	9.471.967.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	8.329.435.000,00	9.445.477.000,00	PN 7	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	1.500.000,00	250.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Mentok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Mentok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					Mentok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Mentok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Mentok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	4.665.900.000,00	7.270.950.000,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Mentok	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	36 orang/bulan	4.665.000.000,00	7.270.800.000,00		APBD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Mentok	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD					Mentok	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Mentok	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	300.000,00	50.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Mentok	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	108.300.000,00	50.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Mentok	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket	90.000.000,00	0,00		APBD
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Mentok	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Mentok	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 orang	0 orang	9.000.000,00	0,00		APBD
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Mentok	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 orang	0 orang	9.000.000,00	0,00		APBD
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	261.300.000,00	255.007.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Mentok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Mentok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket		63.000.000,00		APBD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Mentok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000,00	6.000.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Mentok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	60.000.000,00	60.000.000,00		APBD
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Mentok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Mentok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	2.400.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material					Mentok	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Mentok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	110.000.000,00	41.557.000,00		APBD
					Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Mentok	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	1.340.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						APBD
					Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	unit	40.000.000,00	0,00		APBD
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Mentok	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1unit	unit	300.000.000,00	0,00		APBD
					Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	unit	1.000.000.000,00	0,00		APBD
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	25 unit				APBD
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 unit	22 unit				APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.881.865.000,00	1.852.420.000,00		
					Penyediaan jasa surat-menyurat					Mentok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 laporan	2.000.000,00	0,00		APBD
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik					Mentok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	88.000.000,00	88.500.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor					Mentok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Mentok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.786.865.000,00	1.758.920.000,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	70.270.000,00	66.750.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Mentok	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Mentok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	6 unit	40.450.000,00	36.930.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	17.500.000,00	17.500.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	7.320.000,00	7.320.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100,00%	100,00%	1.625.000,00	100.000,00	PN 8	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25 orang	25 orang	1.625.000,00	100.000,00		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Mentok	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Mentok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	1.325.000,00	50.000,00		APBD
3					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100,00%	100,00%	47.300.000,00	3.520.000,00	PN 8	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 urusan	7 urusan	47.300.000,00	3.520.000,00		
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI					Mentok	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI	100 orang	0 orang	40.000.000,00	0,00		APBD
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Mentok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	7.300.000,00	3.520.000,00		APBD
4					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100,00%	100,00%	7.825.000,00	7.325.000,00	PN 7	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan						Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	150 orang	150 orang	7.225.000,00	7.225.000,00		
					Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Mentok	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	7.225.000,00	7.225.000,00		APBD
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Mentok	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00		APBD
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat						Jumlah urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	8 urusan	8 urusan	600.000,00	100.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					Mentok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan					Mentok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
5					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,50%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	146.850.000,00	10.990.000,00	PN 6	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	52 orang	140.300.000,00	6.030.000,00		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan					Mentok	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	140.300.000,00	6.030.000,00		APBD
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100,00%	100,00%	6.550.000,00	4.960.000,00		
					Evaluasi Kelurahan					Mentok	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	1 laporan	6.550.000,00	4.960.000,00		APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	100,00%	100,00%	4.920.000,00	4.555.000,00	PN 7	
7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa						Jumlah peserta fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	40 orang	40 orang	4.920.000,00	4.555.000,00		
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Mentok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	3.380.000,00	3.285.000,00		APBD
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa					Mentok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1.220.000,00	1.220.000,00		APBD
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Mentok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	320.000,00	50.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TANJUNG									915.200.000,00	849.205.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	.70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	115.200.000,00	105.200.000,00	PN 7	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	79.000.000,00	69.000.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Mentok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Mentok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Mentok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Mentok	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Mentok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Mentok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material					Mentok	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Mentok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	28.200.000,00	28.200.000,00		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik					Mentok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	25.200.000,00	25.200.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor					Mentok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Mentok	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	8.000.000,00	8.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Mentok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Mentok	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Mentok	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	800.000.000,00	744.005.000,00	PN 7	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Mentok	Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100,00%	100,00%	800.000.000,00	744.005.000,00		
					Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan					Mentok	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	2.755.000,00	2.720.000,00		APBD
5					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	3 unit	55.000.000,00	14.800.000,00		APBD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	742.245.000,00	726.485.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUNGAI DAENG									910.110.000,00	828.570.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	110.110.000,00	48.745.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	80.500.000,00	36.245.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	0 paket	3.000.000,00	0,00		APBD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	15.240.000,00		APBD
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	3.720.000,00		APBD
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000,00	750.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	5.535.000,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	21.000.000,00	12.500.000,00		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	18.000.000,00	12.500.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	0 laporan	3.000.000,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	8.610.000,00	0,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	5.000.000,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	610.000,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	3.000.000,00	0,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
							Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	800.000.000,00	779.825.000,00	PN 7	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100,00%	100,00%	800.000.000,00	779.825.000,00		
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	2.755.000,00	2.755.000,00		APBD
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	2.060 unit	30.000.000,00	141.350.000,00		APBD
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	767.245.000,00	635.720.000,00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SUNGAI BARU									918.550.000,00	803.525.000,00		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	118.550.000,00	99.050.000,00	PN 7	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	80.500.000,00	69.000.000,00		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0 paket	0,00	0,00		APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	0 dokumen	1.500.000,00	0,00		APBD
	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	27.000.000,00	27.000.000,00		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	24.000.000,00	24.000.000,00		APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	11.050.000,00	3.050.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	1 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	5.000.000,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	3.050.000,00	3.050.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0 unit	3.000.000,00	0,00		APBD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	800.000.000,00	704.475.000,00	PN 7	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100,00%	100,00%	800.000.000,00	704.475.000,00		
					Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	2.755.000,00	2.455.000,00		APBD
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1767 unit	77 unit	197.750.000,00	77.000.000,00		APBD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	599.495.000,00	625.020.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MENJELANG									899.710.000,00	397.060.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	99.710.000,00	89.710.000,00	PN 7	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	80.500.000,00	70.500.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	18.600.000,00	18.600.000,00		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	15.600.000,00	15.600.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	610.000,00	610.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	610.000,00	610.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	800.000.000,00	307.350.000,00	PN 7	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100,00%	100,00%	800.000.000,00	307.350.000,00		
					Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	1.470.000,00	1.400.000,00		APBD
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 unit	2 unit	329.680.000,00	27.000.000,00		APBD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	468.850.000,00	278.950.000,00		APBD
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KERANGGAN									910.710.000,00	575.710.000,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE	70 WTP Berkembang Baik		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	110.710.000,00	110.710.000,00	PN 7	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	80.500.000,00	80.500.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00		APBD
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	0,00	0,00		APBD
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00		APBD
					Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	24.600.000,00	24.600.000,00		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	21.600.000,00	21.600.000,00		APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	3.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	5.610.000,00	5.610.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	610.000,00	610.000,00		APBD
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	800.000.000,00	465.000.000,00	PN 7	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100,00%	100,00%	800.000.000,00	465.000.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	1.470.000,00	1.470.000,00		APBD
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	1 unit	200.000.000,00	150.000.000,00		APBD
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	598.530.000,00	313.530.000,00		APBD
7	02				KECAMATAN SIMPANGTERITIP									3.497.780.000,00	3.692.652.500,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.136.180.000,00	3.605.550.000,00	PN 7	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100	1.500.000,00	750.000,00		
07	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.118.900.000,00	2.842.250.000,00		APBD
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kec.Simpang teritip	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/14 bulan	17 Orang/14 bulan	2.118.000.000,00	2.841.800.000,00		APBD
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kec.Simpang teritip	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kec.Simpang teritip	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	49.300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	0 Paket	40.500.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	0 Orang	4.250.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	0 Orang	4.250.000,00	0,00		APBD
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kec.Simpang teritip	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	281.300.000,00	135.650.000,00		APBD
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	30.000.000,00		APBD
0	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kec.Simpang teritip	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	60.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
7	01	1	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kec.Simpang teritip	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						APBD
07	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kec.Simpang teritip	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 Unit	Unit	20.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kec.Simpang teritip	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit				APBD
07	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Kec.Simpang teritip	Tersedianya aset Tetap Lainnya						APBD
07	01	01	2.07	0007	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec.Simpang teritip	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec.Simpang teritip	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						APBD
07	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec.Simpang teritip	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kec.Simpang teritip	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	577.840.000,00	570.290.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	40.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	2.500.000,00		
07	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	530.840.000,00	526.790.000,00		APBD
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kec.Simpang teritip	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	77.040.000,00	56.310.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit				APBD
07	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	10 Unit	35.580.000,00	35.580.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kec.Simpang teritip	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	7.190.000,00	3.595.000,00		
07	01	01	2.09	0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kec.Simpang teritip	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya					Kec.Simpang teritip	Jumlah Peralatan Aset tetap lainnya	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		APBD
07	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec.Simpang teritip	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 unit	3 unit	4.270.000,00	2.135.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec.Simpang teritip	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kec.Simpang teritip	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	8.675.000,00	8.435.000,00	PN 7	APBD
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 Orang	95 Orang	8.075.000,00	7.900.000,00		APBD
07	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	8.075.000,00	7.900.000,00		APBD
07	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						APBD
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			0,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						APBD
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Kec.Simpang teritip	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	8 urusan	600.000,00	535.000,00		APBD
07	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	300.000,00		APBD
07	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	235.000,00		APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kec.Simpang teritip	Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100,00%	100,00%	100.000.000,00	46.947.500,00	PN 7	APBD
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kec.Simpang teritip	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	52 Orang	100.000.000,00	46.947.500,00		APBD
07	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	46.947.500,00		APBD
7					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah lembaga Kemasyarakatan			0,00	0,00		APBD
07	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang diselenggarakan			0,00	0,00		APBD
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Kec.Simpang teritip	Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100,00%	100,00%	3.825.000,00	3.540.000,00	PN 8	APBD
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kec.Simpang teritip	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 orang	80 orang	3.825.000,00	3.540.000,00		APBD
07	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kec.Simpang teritip	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	3.525.000,00	3.390.000,00		APBD
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Kec.Simpang teritip	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	209.000.000,00	8.860.000,00	PN 8	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kec.Simpang teritip	Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	209.000.000,00	8.860.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kec.Simpang teritip	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI	100 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00		APBD
07	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	8.860.000,00		APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kec.Simpang teritip	Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	100%	40.100.000,00	19.320.000,00	PN 7	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kec.Simpang teritip	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 Orang	130 Orang	40.100.000,00	19.320.000,00		
07	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.785.000,00		APBD
07	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	14.600.000,00	5.767.500,00		APBD
07	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	5.767.500,00		APBD
07	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kec.Simpang teritip	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Dokumen		0,00		APBD
7	03				KECAMATAN JEBUS									4.617.275.800,00	4.835.678.300,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00	Kecamatan Jebus	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.006.120.000,00	4.493.275.000,00	PN 7	
07	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
07	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.998.900.000,00	3.736.650.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kecamatan Jebus	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2.998.000.000,00	3.736.200.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
07	01	01	2.02	0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	300.000,00		APBD
07	01	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kecamatan Jebus	Jumlah Data Objek Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00		
07	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	58.800.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Kecamatan Jebus	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	46.500.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
07	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kecamatan Jebus	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kecamatan Jebus	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	281.300.000,00	143.820.000,00		
07	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket		0,00		APBD
07	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	33.170.000,00		
07	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00		
07	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	65.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0010	Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kecamatan Jebus	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	40.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						APBD
07	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kecamatan Jebus	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	105 Unit	Unit	25.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				APBD
07	0	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				
07	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				APBD
08	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kecamatan Jebus	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	577.360.000,00	574.710.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.850.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.100.000,00	29.100.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	541.260.000,00	541.260.000,00		APBD
07	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kecamatan Jebus	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	47.660.000,00	36.745.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kecamatan Jebus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	-	-		
07	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kecamatan Jebus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pakal dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	35.830.000,00	35.830.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel					Kecamatan Jebus	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	0 Unit	0 Unit	-	-		APBD
07	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	-		APBD
07	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah aset tetap Lainnya yang Dipelihara	- Unit	- Unit	-	-		
07	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	1 Unit	1.830.000,00	915.000,00		
07	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Jebus	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00		APBD
07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kecamatan Jebus	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	249.920.800,00	249.083.300,00	PN 7	
07	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan Jebus	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125 Orang	125 Orang	8.075.000,00	7.362.500,00		
07	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kecamatan Jebus	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	7.362.500,00		
07	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan Jebus	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Dokumen	0,00	0,00		
07	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Kecamatan Jebus	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kependudukan, Perizinan, Pertanahan)	100%	100%	600.000,00	475.000,00		
07	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan (Kasi Tata Pemerintahan)					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	175.000,00		
07	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan					Kecamatan Jebus	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00		
07	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Kecamatan Jebus	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	241.245.800,00	241.245.800,00		
07	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	241.245.800,00	241.245.800,00		
07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kecamatan Jebus	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100.000.000,00	55.782.500,00	PN 7	
07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kecamatan Jebus	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	55.782.500,00		
07	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	55.782.500,00		APBD

Kode					Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Kecamatan Jebus	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	100%	100%	12.300.000,00	8.435.000,00	PN 8	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Kecamatan Jebus	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	180 Orang	180 Orang	12.300.000,00	8.435.000,00		APBD
7	01	04	2.01	0001	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kecamatan Jebus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	8.285.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Kecamatan Jebus	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	209.000.000,00	8.155.000,00	PN 8	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kecamatan Jebus	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	209.000.000,00	8.155.000,00		APBD
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan NKRI					Kecamatan Jebus	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00		APBD
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	8.155.000,00		
07	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kecamatan Jebus	Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	100%	39.935.000,00	20.947.500,00	PN 7	
07	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					Kecamatan Jebus	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120 Orang	120 Orang	39.935.000,00	20.947.500,00		
07	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.570.000,00	6.787.500,00		
07	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	28.205.000,00	12.000.000,00		
07	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	04				KECAMATAN PARITITIGA									4.079.840.000,00	4.212.290.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70	Kecamatan Parittiga	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.303.040.000,00	3.684.640.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
07	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
07	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100%	100%	2.000.900.000,00	2.867.450.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kecamatan Parittiga	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	2.000.000.000,00	2.867.000.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		
07	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.02	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	260.000,00		APBD
07	01	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retrebusi Daerah					Kecamatan Parittiga	Jumlah data Objek, Subjek dan Wjb Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	260.000,00		
07	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga		100%	100%	50.050.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kecamatan Parittiga	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	41.250.000,00	0,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	01	2.05	0003	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian					Kecamatan Parittiga	jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
07	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan					Kecamatan Parittiga	jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	0 Orang	4.250.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	17 Orang	0 Orang	4.250.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kecamatan Parittiga		100%	100%	321.300.000,00	149.150.000,00		
07	01	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					Kecamatan Parittiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kecamatan Parittiga	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	20.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga					Kecamatan Parittiga	Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik					Kecamatan Parittiga	Jumlah Paket Penyediaan bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	30.000.000,00		
07	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Paker Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00		
07	01	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan	12 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kecamatan Parittiga	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	75.000.000,00		APBD
07	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		APBD
07	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kecamatan Parittiga	Terpenuhinya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	270.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kecamatan Parittiga	Jumlah unit Kendaraan Dinas Oeprasional atau Lapangan yang Disediakan						APBD
07	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kecamatan Parittiga	Jumlah paket Mebel yang disediakan	101 Unit	Unit	20.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kecamatan Parittiga	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				APBD
07	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Kecamatan Parittiga	Jenis Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Parittiga	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				
07	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Parittiga	Jumlah Unit Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diediakan	0	0	0,00	0,00		APBD
07	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Parittiga	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0 Unit				APBD
08	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kecamatan Parittiga	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	593.480.000,00	618.960.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00		APBD
07	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					Kecamatan Parittiga	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air	12 Laporan	12 Laporan	35.500.000,00	31.500.000,00		APBD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
										Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jada peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD
07	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan PenyediaanJ Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	550.980.000,00	582.460.000,00		APBD
07	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				Kecamatan Parittiga	Terpeliharanya Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	65.210.000,00	47.770.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kecamatan Parittiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	-	-		
07	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kecamatan Parittiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan pakal dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	35.330.000,00	35.330.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				Kecamatan Parittiga	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	- Unit	- Unit	-	-		APBD
07	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kecamatan Parittiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Unit	- Unit	-	-		APBD
07	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Kecamatan Parittiga	Jumlah aset tetap Lainnya yang Dipelihara	- Unit	- Unit	-	-		
07	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Kecamatan Parittiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	4 Unit	2 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00		APBD
07	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kecamatan Parittiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	8 Unit	4 Unit	4.880.000,00	2.440.000,00		
07	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kecamatan Parittiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00		APBD
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kecamatan Parittiga	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	100%	100%	21.800.000,00	21.760.000,00	PN 8	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Kecamatan Parittiga	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	180	180	21.800.000,00	21.760.000,00		APBD
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	10.960.000,00		
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan took Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Kecamatan Parittiga	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	229.000.000,00	8.650.000,00	PN 8	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Kecamatan Parittiga	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7	7	229.000.000,00	8.650.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kecamatan Parittiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0 Orang	220.000.000,00	0,00		APBD
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	8.650.000,00		
07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kecamatan Parittiga	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	409.000.000,00	439.000.000,00	PN 7	
07	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125	125	8.400.000,00	8.400.000,00		
07	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00		
07	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00		
07	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Kecamatan Parittiga	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kependudukan, Perizinan, Pertanahan)	8	8	600.000,00	600.000,00		
07	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Non Perizinan (Kasi Tata Pemerintahan)					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00		
07	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00		
07	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	1	400.000.000,00	430.000.000,00		
07	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	430.000.000,00		
07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kecamatan Parittiga	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100.000.000,00	44.610.000,00	PN 7	
07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kecamatan Parittiga	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	1	100.000.000,00	44.610.000,00		
07	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kecamatan Parittiga	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	44.610.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
07	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kecamatan Parittiga	Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	17.000.000,00	13.630.000,00	PN 7	
07	01	06	2.01		Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Parittiga	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120	120	17.000.000,00	13.630.000,00		
07	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa an Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000,00	6.230.000,00		
07	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	3.750.000,00		
07	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kecamatan Parittiga	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangkai Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000,00	3.650.000,00		
7	05				KECAMATAN KELAPA									5.913.265.000,00	6.274.008.000,00		
					KECAMATAN									5.022.155.000,00	5.374.458.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00	Kecamatan Kelapa	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	4.216.270.000,00	4.840.480.000,00	PN 7	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.500.000,00	750.000,00		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.145.900.000,00	4.076.850.000,00		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	26 orang/bulan	3.145.000.000,00	4.076.400.000,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	300.000,00	150.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	300.000,00	150.000,00		
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	300.000,00	150.000,00		
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	115.000,00		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	115.000,00		
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	300.000,00		
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kecamatan Kelapa	Jumlah Data Objek Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	300.000,00		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	69.550.000,00	100.000,00		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	0 paket	56.250.000,00	0,00		
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	100.000,00		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	0 Orang	6.500.000,00	0,00		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	0 Orang	6.500.000,00	0,00		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	292.300.000,00	139.975.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	2.000.000,00	1.000.000,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	0 paket	11.000.000,00	0,00		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000,00	3.000.000,00		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	60.000.000,00	29.375.000,00		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000,00	15.000.000,00		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		
					Penyediaan Bahan/Material					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	50.000.000,00	25.000.000,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	130.000.000,00	65.000.000,00		
					Pentatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	100.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kecamatan Kelapa	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	%	29.000.000,00	0,00		
07	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kecamatan Jebus	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						APBD
					Pengadaan Mebel					Kecamatan Kelapa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 unit	unit	29.000.000,00	0,00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Kelapa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kecamatan Kelapa	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	605.960.000,00	597.850.000,00		
					Penyediaan jasa surat-menyurat					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	0 laporan	2.000.000,00	0,00		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	62.400.000,00	62.400.000,00		
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	2.500.000,00		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	536.560.000,00	532.950.000,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kecamatan Kelapa	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	71.460.000,00	24.540.000,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0 unit	0 unit	0,00	0,00		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	16 unit	36.580.000,00	7.100.000,00		
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kecamatan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	3 unit	25.000.000,00	12.500.000,00		
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 unit	4 unit	4.880.000,00	2.440.000,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kecamatan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	2.500.000,00		
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kecamatan Kelapa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	100%	479.315.000,00	473.678.000,00	PN 7	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 orang	100 orang	8.075.000,00	6.970.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 laporan	8.075.000,00	6.970.000,00		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	467.940.000,00	463.568.000,00		
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	1 laporan	467.940.000,00	463.568.000,00		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					Kecamatan Kelapa	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	8 urusan	3.300.000,00	3.140.000,00		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	155.000,00		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang di Limpahkan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	2.985.000,00		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Kecamatan Kelapa	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	102.110.000,00	48.680.000,00	PN 7	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kecamatan Kelapa	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 orang	100 orang	100.000.000,00	46.845.000,00		
					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	46.845.000,00		
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kecamatan Kelapa	Persentase Usulan Kelurahan yang Terakomodir Pada Saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	2.110.000,00	1.835.000,00		
					Evaluasi Kelurahan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	1 laporan	2.110.000,00	1.835.000,00		
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					Kecamatan Kelapa	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	100%	100%	3.825.000,00	3.617.500,00	PN 8	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Kecamatan Kelapa	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	110 orang	110 orang	3.825.000,00	3.617.500,00		
					Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Hasil Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	215.000,00		
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kecamatan Kelapa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	1 laporan	3.525.000,00	3.402.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum					Kecamatan Kelapa	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	209.000.000,00	7.280.000,00	PN 8	
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kecamatan Kelapa	Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 urusan	7 urusan	209.000.000,00	7.280.000,00		
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan dalam rangka memantapkan Pengamalaan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kecamatan Kelapa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	0 orang	200.000.000,00	0,00		
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	9.000.000,00	7.280.000,00		
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kecamatan Kelapa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	100%	11.635.000,00	722.500,00	PN 7	
					Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kecamatan Kelapa	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 orang	130 orang	11.635.000,00	722.500,00		
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	1 dokumen	7.935.000,00	277.500,00		
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	2.650.000,00	120.000,00		
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa					Kecamatan Kelapa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	1.050.000,00	325.000,00		
					Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA									891.110.000,00	899.550.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	70 WTP Berkembang Baik 80,00	Kelurahan Kelapa	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	91.110.000,00	57.870.000,00	PN 7	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kelurahan Kelapa	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	67.500.000,00	40.065.000,00		
					Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor					Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000,00	500.000,00		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	0 paket				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.000.000,00	1.500.000,00		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000,00	10.000.000,00		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000,00	7.500.000,00		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Kelurahan Kelapa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000,00	750.000,00		
					Penyediaan Bahan/Material					Kelurahan Kelapa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.000.000,00	9.815.000,00		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	10.000.000,00		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kelurahan Kelapa	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	13.500.000,00		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan Listrik					Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	12.000.000,00	12.000.000,00		
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					Kelurahan Kelapa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.000.000,00	1.500.000,00		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kelurahan Kelapa	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8.610.000,00	4.305.000,00		
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kelurahan Kelapa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	5.000.000,00	2.500.000,00		
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	610.000,00	305.000,00		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	3.000.000,00	1.500.000,00		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Kelurahan Kelapa	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	100%	800.000.000,00	841.680.000,00	PN 7	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kelurahan Kelapa	Persentase Usulan Kelurahan yang Terakomodir Pada Saat Musrenbang Kecamatan	100%	100%	800.000.000,00	841.680.000,00		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kelurahan Kelapa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	2.000.000,00	2.000.000,00		
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kelurahan Kelapa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	1 unit	125.000.000,00	178.725.000,00		
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kelurahan Kelapa	Jumlah Pokmas, Ormas dan Lembaga yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ lembaga	3 Pokmas/ lembaga	673.000.000,00	660.955.000,00		
7	06				KECAMATAN TEMPILANG									4.286.195.000,00	4.374.795.000,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE	70 WTP Berkembang Baik	Kec. Tempilang	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.835.810.000,00	4.193.720.000,00	PN 7	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.500.000,00	750.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.800.900.000,00	3.409.850.000,00		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kec. Tempilang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.800.000.000,00	3.409.400.000,00		
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	50.050.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	39.750.000,00	0,00		
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kec. Tempilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	0 orang	5.000.000,00	0,00		
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kec. Tempilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	0 orang	5.000.000,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kec. Tempilang	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	326.300.000,00	151.910.000,00		
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.000.000,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00		
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	3.000.000,00		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	30.000.000,00		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	15.000.000,00		
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.760.000,00		
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	25.000.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	75.000.000,00		
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	150.000,00		
8	01	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kec. Tempilang	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Persen	15.000.000,00	0,00		
07	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Kec. Tempilang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	unit	15.000.000,00	0,00		
07	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kec. Tempilang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0,00	0,00		
7	01	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kec. Tempilang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	460.100.000,00	454.250.000,00		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	419.500.000,00	415.650.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kec. Tempilang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	181.660.000,00	176.660.000,00		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kec. Tempilang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	7 Unit	7 Unit	34.830.000,00	34.830.000,00		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kec. Tempilang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00		
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec. Tempilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.830.000,00	1.830.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kec. Tempilang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kec. Tempilang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	84.255.000,00	83.955.000,00	PN 7	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kec. Tempilang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 orang	85 orang	8.075.000,00	8.075.000,00		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	8.075.000,00	8.075.000,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Kec. Tempilang	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	1 urusan	75.580.000,00	75.580.000,00		
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	75.580.000,00	75.580.000,00		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					Kec. Tempilang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	8 Urusan	600.000,00	300.000,00		
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	150.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					Kec. Tempilang	Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100.000.000,00	45.540.000,00	PN 7	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kec. Tempilang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	52 orang	100.000.000,00	45.540.000,00		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kec. Tempilang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	45.540.000,00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Kec. Tempilang	Terlaksananya Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	100%	19.500.000,00	19.500.000,00	PN 8	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kec. Tempilang	Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	19.500.000,00	19.500.000,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kec. Tempilang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	12.900.000,00	12.900.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Kec. Tempilang	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%	209.000.000,00	9.000.000,00	PN 8	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kec. Tempilang	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	7 Urusan	209.000.000,00	9.000.000,00		
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kec. Tempilang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Kec. Tempilang	Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	100%	37.630.000,00	23.080.000,00	PN 7	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kec. Tempilang	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117 Orang	117 Orang	37.630.000,00	23.080.000,00		
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	20.460.000,00	5.910.000,00		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	13.720.000,00	13.720.000,00		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kec. Tempilang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.450.000,00	3.450.000,00		
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									10.186.956.000,00	7.748.978.150,00		
8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									10.186.956.000,00	7.748.978.150,00		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	5.666.270.000,00	3.627.853.000,00	PN 7	
								Opini BPK	WTP								
								Maturitas SPIP	Berkembang								
								Indeks SPBE	Baik								
								Indeks Profesionalitas ASN	80,00								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	100	1.500.000,00	250.000,00		
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.500.900.000,00	2.930.750.000,00		
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.500.000.000,00	2.930.600.000,00		APBD
8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	300.000,00	50.000,00		
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	43.300.000,00	50.000,00		
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	2 Paket	0 Paket	38.250.000,00	0,00		
8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 orang	0 orang	4.750.000,00	0,00		
8	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0,00	0,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolak Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	657.900.000,00	286.508.000,00		
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	2.989.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Paket	25.000.000,00	0,00		APBD
8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	3.820.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.600.000,00	40.205.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	24.885.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	3.000.000,00	1.500.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	33.024.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	180.035.000,00		APBD
8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	50.000,00		APBD
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	%	2.015.000.000,00	0,00		
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	2 unit	unit	15.000.000,00			APBD
8	01	01	2.10	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	unit	2.000.000.000,00			
8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	0 unit	0 unit	0,00	0,00		APBD
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	403.770.000,00	399.270.000,00		
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00		APBD
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00		APBD
8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	3.500.000,00		APBD
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	358.770.000,00	358.770.000,00		APBD
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	43.600.000,00	10.975.000,00		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	4 Unit	34.330.000,00	6.000.000,00		APBD
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	2.675.000,00		APBD
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	7 unit	7 unit	4.270.000,00	2.300.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Angka kejadian Konflik sosial yang dilatarbelakangi oleh Ideologi	0 kasus	0 kasus	2.384.066.000,00	1.561.431.250,00	PN 1	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100%	100%	2.384.066.000,00	1.561.431.250,00		
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	500 Orang	908.766.000,00	336.616.600,00		APBD
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaann					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440 Orang	100 Orang	14.875.000,00	7.425.000,00		APBD
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 laporan	1 laporan	300.000,00	150.000,00		APBD
8	01	02	2.02	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			0,00	0,00		APBD
8	01	02	2.02	0008	Pembentukan Paskibraka					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paskibraka	100 Orang	100 Orang	1.460.125.000,00	1.217.239.650,00		
8	01	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100,00%	100,00%	1.468.360.000,00	1.998.841.500,00	PN 1	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 dokumen	1 dokumen	1.468.360.000,00	1.998.841.500,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDIK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDIK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2367 Orang	2367 Orang	1.447.785.000,00	1.978.439.000,00		APBD
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang Yang Mangikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23 orang	23 orang	8.475.000,00	8.420.000,00		APBD
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	4 laporan	12.100.000,00	11.982.500,00		APBD
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Persentase ormas yang aktif	100,00%	100,00%	54.700.000,00	43.300.000,00	PN 8	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen	54.700.000,00	43.300.000,00		
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	445 orang	50 orang	40.100.000,00	30.100.000,00		APBD
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 orang	23 orang	12.100.000,00	11.950.000,00		APBD
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.250.000,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Angka kejadian konflik sosial berlatarbelakang ekonomi, sosial, dan budaya	0 kasus	0 kasus	158.300.000,00	141.617.400,00	PN 8	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 dokumen	1 dokumen	158.300.000,00	141.617.400,00		
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	57 Orang	57.000.000,00	54.494.700,00		APBD
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	57 Orang	101.000.000,00	87.022.700,00		APBD
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	1 laporan	300.000,00	100.000,00		APBD
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar;	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100%	100%	455.260.000,00	375.935.000,00	PN 8	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	1 dokumen	455.260.000,00	375.935.000,00		
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	408 orang	204 orang	90.285.000,00	83.772.500,00		APBD
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 orang	25 orang	17.325.000,00	16.062.500,00		APBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target PERUBAHAN RKPD 2025	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu RKPD INDUK 2025	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2025	Keterangan	
											Tolok Ukur	Target RKPD INDUK 2025	Target Perubahan RKPD 2025			Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	8.350.000,00		APBD
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	337.650.000,00	267.750.000,00		APBD
														1.122.282.183.064,41	1.114.164.641.841,13		



BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan tema pembangunan yang disesuaikan terkait perkembangan/perubahan keadaan dan kondisi yang terjadi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaedah-kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, serta belanja yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera;
2. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan Rancangan APBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD;
3. Berdasarkan Perubahan RKPD, setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang bertujuan mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN;
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
6. Pada akhir anggaran Tahun 2025, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi anggaran dan kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2025;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyusun evaluasi hasil rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode selanjutnya.



Dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025, prioritas pembangunan serta arah kebijakan pembangunan daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan.

Bupati Bangka Barat,

H. Sidiqman, S.H.